



**LAPORAN PENELITIAN  
KEILMUAN MANDIRI BIDANG ILMU UNTUK  
PENGAYAAN BAHAN AJAR**

**POTRET PERS SEBELUM DAN SESUDAH  
REFORMASI**

**(Analisis Framing pada Tajuk Rencana Surat Kabar  
"Kompas" dan "Republika")**

Oleh:

Dra. Arifah Bintarti, M. Si.

Dra. Ace Sriati Rachman, M. Si.

Hascaryo Pramudibyanto, Sos. M. Pd.

**PUSAT KEILMUAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TERBUKA  
2007**



**Lembar Pengesahan**  
**Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Judul Penelitian       | : Potret Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi.<br>: (Analisis Framing pada Tajuk Rencana Surat Kabar "Kompas" dan "Republika") |
| 2. a. Mata Kuliah         | : Hukum dan Etika Komunikasi (SKOM4439)  |
| b. Bidang Kajian          | : Keilmuan   |
| 3. Ketua Peneliti         | : Dra. Arifah Bintarti, M.Si.  |
| a. Nama Lengkap & Gelar   | : Perempuan  |
| 1. Jenis Kelamin          | : Penata, Tk 1 (Gol III/d), 131 879 645  |
| 2. Pangkat, Golongan, NIP | : S-1 Ilmu Komunikasi/ Ilmu Komunikasi   |
| 3. Program Studi/Jurusan  | : FISIP  |
| 4. Fakultas               | : Komplek Perum UT Jabon Mekar Blok G/2,<br>: Parung Bogor 16330   |
| 5. Alamat rumah:          | : (0251) 614647 / 0817101018   |
| b. Nomor Telepon/HP       | : arifahb@mail.ut.ac.id  |
| c. Email                  | : Dra. Ace Sriati Rachman, M. Si.  |
| 4. Nama Anggota Peneliti  | : Hascaryo Pramudibyanto, S Sos. M.Pd.   |
| 5. a. Periode Penelitian  | : 2007   |
| b. Lama Penelitian        | : 8 (delapan) bulan  |
| 6. Biaya Penelitian       | : Rp. 10.000.000,-<br>(sepuluh Juta Rupiah)  |

Mengetahui,  
Dekan

Dr. Tri Darmayanti, M.A.  
NIP 131866177

Mengetahui,  
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed.  
NIP 131476464

Pondok Cabe, 12 Desember 2007  
Ketua Peneliti,

Drs. Arifah Bintarti, M.Si.  
NIP 131879645



Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si.  
NIP 131879645

## ABSTRAK

Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara dan hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28. Ada banyak media yang dapat dijadikan saluran untuk menyatakan pendapat seseorang atau suatu institusi terhadap ketidakadilan yang ada di masyarakat, di antaranya adalah surat kabar.

Dalam masyarakat modern, surat kabar sebagai salah bentuk media massa mempunyai peran yang signifikan sebagai bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Hampir pada setiap aspek kegiatan manusia baik yang dilakukan secara pribadi ataupun bersama-sama mempunyai hubungan dengan aktivitas komunikasi massa. Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita atau informasi tentang banyak hal, surat kabar mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, yang pada perkembangannya juga dapat menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana isi berita yang disajikan dalam “Tajuk Rencana” pada surat kabar Kompas dan Republika pada masa menjelang reformasi dan setelah reformasi yang ditandai dengan jatuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Metode analisis *Framing* digunakan untuk melihat kategori isi dan kecenderungan isi “Tajuk Rencana” Kompas dan Republika pada masa satu bulan sebelum dan sesudah Reformasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

- (1) Kecenderungan isi tajuk rencana pada surat kabar Kompas menunjukkan bahwa redaksi Kompas cenderung hati-hati dan bersikap netral ketika menyajikan berita-berita Reformasi yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi dan sosial. Pemilihan sumber berita juga hanya berasal dari elit politik. Sementara itu Republika, lebih terbuka dengan sumber berita yang lebih variatif, misalnya ada yang dari organisasi keagamaan. Kategori isi pada tajuk rencana Kompas setelah reformasi lebih banyak mengangkat tentang kebebasan pers, politik ekonomi, demokrasi dan mengusut tindak korupsi. Isi berita cenderung lebih terbuka dan berani ketika menyampaikan isi berita reformasi. Sementara Redaksi Republika menyajikan berita-berita dengan cara lebih berani dan terbuka dibanding sebelum reformasi.
- (2) kategori isi tajuk rencana surat kabar Kompas dan Republika sebelum dan sesudah reformasi menunjukkan masih berkisar tentang masalah-masalah reformasi, mengajak elemen masyarakat, elit pemerintah untuk bersatu membangun pemerintahan yang bersih.

Kata kunci: tajuk rencana, analisis framing, reformasi

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penulis bersyukur akhirnya laporan penelitian yang berjudul Potret Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi. (Analisis Framing pada Tajuk Rencana Surat Kabar "Kompas" dan "Republika") dapat kami selesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional yang telah mempercayakan kepada kami kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lit Bang Kompas dan Republika yang telah memberikan ijin kepada kami untuk mendapatkan naskah cetak materi yang kita teliti. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP-UT) yang telah memberikan bimbingan, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada kami sampai terselesaikannya penulisan laporan ini.

Bagaimanapun juga laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dari pembaca untuk memperbaiki hasil penelitian ini, sangat kami harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pondok Cabe, 12 Desember 2007

Tim Peneliti

## Daftar Isi

	Halaman
Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	v
Pendahuluan	1
Tinjauan Pustaka	4
Metode Penelitian	19
Hasil Penelitian	25
Kesimpulan	63
Daftar Pustaka	65
Lampiran	

Universitas Terbuka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era reformasi sekarang ini kebebasan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara dan hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28. Ada banyak media yang dapat dijadikan saluran untuk menyatakan pendapat seseorang atau suatu institusi terhadap ketidakadilan yang ada di masyarakat, di antaranya adalah media elektronik seperti media radio, media televisi, maupun media film, serta media cetak seperti majalah, tabloid serta surat kabar.

Memasuki era global saat ini, salah satu hal yang secara signifikan mengalami perubahan adalah semakin deras dan beragamnya arus berita dan informasi. Dalam hal ini, yang bertambah bukan hanya jumlah dan jenis media saja, tetapi juga terlihat adanya penambahan keragaman berita, penambahan keragaman sumber berita, semakin variatif dan kreatifnya cara penyajian berita dan semakin hausnya masyarakat akan berita dan informasi yang terlihat dari semakin besarnya pengeluaran (*spending*) masyarakat untuk “membeli” dan/atau “menikmati” berita dan informasi.

Media surat kabar (*pers*) dianggap menarik untuk dikaji karena media ini mempunyai beberapa kelebihan di antaranya adalah (Littlejohn, 1995) khalayak yang khalayaknya bersifat anonim dan heterogen, tersebar serta tidak mengenal batas geografis dan batas kultural, khalayak juga bersifat umum di mana isi pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan banyak orang, penyampaian pesannya berjalan cepat dan mampu menjangkau khalayak luas, juga cenderung bersifat searah, kegiatan komunikasinya dilakukan secara terencana, terjadwal serta terorganisasi, penyampaian *feedback*nya bersifat tertunda (*delayed*) dan orang yang bekerja adalah orang yang terlembagakan (*institutionalized*). Isi pesan yang disampaikan melalui media massa surat kabar dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia (sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain), baik yang bersifat informasi, edukasi maupun hiburan. Media surat kabar adalah termasuk media cetak atau disebut juga pers dalam arti sempit.

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah “Tajuk Rencana” suatu surat kabar. Tajuk rencana adalah salah satu bentuk opini yang lazim ditemukan dalam surat kabar. Opini pada tajuk rencana mencerminkan aspirasi, pendapat dan sikap resmi suatu media pers terhadap persoalan potensial, fenomenal dan atau aktual yang terjadi dalam masyarakat. Karena fungsinya yang sangat strategis maka mayoritas surat kabar yang ada di Indonesia menyediakan ruangan khusus secara tetap untuk opini tajuk rencana.

Karakter dan kepribadian pers tercermin dalam tajuk rencana. Tajuk rencana diartikan sebagai opini redaksi yang berisi aspirasi, pendapat dan sikap resmi media surat kabar terhadap persoalan potensial, fenomenal, aktual dan atau kontroversial yang terdapat dalam masyarakat. Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi pers yang bersangkutan secara keseluruhan sebagai suatu lembaga penerbitan media berkala. Suara tajuk rencana bukanlah suara perorangan atau pribadi-pribadi yang terdapat di jajaran redaksi atau bagian produksi dan sirkulasi, melainkan suara kolektif seluruh wartawan dan karyawan dari suatu lembaga penerbitan pers. Karena merupakan suara lembaga maka tajuk rencana tidak ditulis dengan mencantumkan nama penulisnya.

Dengan adanya era reformasi di Indonesia yang ditandai dengan lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998, memperlihatkan iklim demokrasi semakin kental, yang tentunya membawa dampak terhadap cara penyampaian pendapat ke dalam bentuk tulisan di media surat kabar bagi para jurnalis, tidak terkecuali cara penerbitan tulisan oleh para tim redaksi pada kolom tajuk rencana suatu surat kabar. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti ingin melihat sejauh mana perbedaan penerbitan tulisan oleh tim redaksi dalam tajuk rencana sebelum dan sesudah reformasi berlangsung.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kategori isi berita pada tajuk rencana surat kabar "Kompas" dan "Republika" sebelum dan sesudah reformasi?
2. Bagaimanakah kecenderungan isi berita pada tajuk rencana surat kabar "Kompas" dan "Republika" sebelum dan sesudah reformasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi kategori isi berita tajuk rencana surat kabar "Kompas" dan "Republika" sebelum dan sesudah reformasi.
2. Menganalisis kecenderungan isi berita tajuk rencana surat kabar "Kompas" dan "Republika" sebelum dan sesudah reformasi

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menemukan kategori isu-isu berita tajuk rencana surat kabar "Kompas" dan "Republika" sebelum dan sesudah reformasi
2. Menemukan kecenderungan isi berita tajuk rencana surat kabar "Kompas" dan "Republika" sebelum dan sesudah reformasi

Universitas Terbuka



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Komunikasi dan Komunikasi Massa

Komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia. Kehidupan manusia akan tampak “hampa” tanpa komunikasi, karenanya tidak mungkin manusia dapat menjalani hidupnya tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Seluruh kegiatan komunikasi berlangsung dari waktu ke waktu selama manusia hidup dan melakukan aktivitas. Menegaskan hal ini *Wright* (1986) mengatakan bahwa melalui proses komunikasi, setiap manusia berkeinginan untuk mempertahankan persetujuan mengenai aturan sosial dan dengan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan individu lainnya, setiap individu dapat menetapkan kredibilitasnya sebagai anggota masyarakat.

Menurut Harold Lasswell, persoalan komunikasi berkaitan dengan suatu proses yang menjelaskan “siapa”, “mengatakan apa”, “dengan saluran apa”, “kepada siapa” dan “dengan akibat atau hasil apa”. (*Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?*). Model komunikasi klasik dari Lasswell memperlihatkan bahwa dalam menyampaikan pesannya, pihak pengirim pesan (komunikator) juga mempunyai keinginan untuk dapat mempengaruhi (sebagai upaya persuasif) pihak penerima pesan (komunikan), karena upaya penyampaian pesan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan suatu akibat, baik yang bersifat positif maupun negatif (Senjaya, 1999: 178)

Salah satu bentuk komunikasi yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai, “Suatu proses komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas, yang heterogen, dan anonim, di mana bentuk komunikasinya bersifat umum, cepat, dan selintas. Pesan komunikasi massa diorganisir melalui sumber berupa organisasi media massa (Wright, 1986). Littlejohn (1998:325), menyatakan komunikasi massa merupakan proses di mana organisasi media menghasilkan dan mengirimkan pesan kepada masyarakat umum dan proses yang terdiri dari pesan yang dicari, digunakan, dipahami dan dipengaruhi oleh khalayak. Sedangkan Straubhaar dan La Rose (2002 :19) menyatakan : “ *Mass communication is one-to-many, with limited audience feedback*”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tersebut, pada hakekatnya proses komunikasi massa merupakan proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti yang dilakukan melalui saluran atau media massa tertentu. Sasa D. Sendjaya (1996, 73) mengemukakan beberapa karakteristik dari komunikasi massa, yaitu :

1. Komunikasi melalui media massa pada dasarnya ditujukan ke khalayak yang luas, heterogen, anonim, tersebar, serta tidak mengenal batas geografis-kultural.
2. Bentuk kegiatan komunikasi melalui media massa bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi.
3. Pola penyampaian pesan media massa berjalan secara cepat dan mampu menjangkau khalayak luas, bahkan tidak terbatas secara geografis maupun kultural.
4. Penyampaian pesan melalui media massa cenderung berjalan satu arah, karena umpan balik atau tanggapan dari pihak penerima berlangsung secara tertunda.
5. Kegiatan komunikasi melalui media massa dilakukan secara terencana, terjadwal dan terorganisasi.
6. Penyampaian pesan melalui media massa dilakukan secara berkala, tidak bersifat temporer.
7. Isi pesan yang disampaikan melalui media massa dapat mencakup berbagai aspek kehidupan manusia (sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain), baik yang bersifat informatif, edukatif maupun hiburan.

Saat ini media massa diharapkan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme sederhana untuk menyebarluaskan informasi atau juga bukan sekedar sebagai institusi bisnis tempat orang bekerja dan mencari keuntungan, namun media massa adalah suatu institusi sosial, sekaligus politik yang menyentuh alam pikiran masyarakat luas, yang dalam menjalankan prosesnya media akan sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang akan terjadi pada masa mendatang, baik dalam proses politik, kehidupan sosial atau ekonomi. McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theories* (2000:66), menjelaskan bahwa khalayak

memandang peran media massa sebagai *filter* atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Para pengelola media memilih isu, informasi, atau bentuk isi yang sesuai dengan standarnya dan kemudian berita yang “dipilihkan” oleh media tersebut disajikan kepada khalayak. Pada peran ini, media melalui para pekerjanya melakukan seleksi atas isu-isu atau peristiwa/realitas tertentu yang akan disajikan. Media berperan dalam membentuk realitas karena ia adalah subjek yang mengkonstruksi realitas.

Media mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, karena khalayak tidak sekedar mengkonsumsi media sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan dan melepas ketegangan, tetapi informasi yang disajikan media sangat dibutuhkan khalayak sebagai “konsumsi untuk otaknya”, yang pada akhirnya akan mempengaruhi realitas subjektif dari khalayak sebagai para pelaku interaksi sosial. Walter Lippman seperti dikutip McQuail menegaskan, bahwa media massa mampu menanamkan *the pictures in our heads* tentang realitas yang terjadi di dunia ini.

Ahli yang pertama kali berusaha menformulasikan fungsi media adalah *Lasswell* dan *Wright* (Littlejohn 1996:334), (Shoemaker dan Reese 1991:24-25). Menurutnya, media mempunyai fungsi-fungsi yang penting, yaitu :

1. Untuk pengawasan lingkungan atau fungsi *Surveillance of Environment*

Dalam fungsi pengawasan ini, media berupaya mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai berbagai peristiwa di dalam atau di luar lingkungan suatu masyarakat. Berita yang disebarluaskan diharapkan oleh khalayak sebagai peringatan awal agar khalayak dapat menilai dan menyesuaikan pada kondisi yang sedang berkembang dan berubah. Fungsi ini terlihat jelas dalam upaya mengatur opini publik, memonitor dan mengontrol kekuasaan, dsb.

2. Untuk korelasi antar bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap

lingkungan atau *correlation of the parts of Society*. Fungsi ini berkaitan dengan interpretasi terhadap informasi dan preskripsi untuk mencapai konsensus dalam upaya mencegah konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan akan terjadi.

3. Untuk transmisi/sosialisasi atau pewarisan nilai-nilai serta pengetahuan dari satu generasi kepada generasi berikutnya atau fungsi *transmission of the social heritage* Pada fungsi ini, media massa diharapkan dapat melakukan pendidikan kepada masyarakat melalui informasi. Melalui informasi yang diterimanya ini anggota masyarakat tertentu merasa menjadi satu dengan anggota masyarakat lainnya. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam memelihara identifikasi anggota-anggota masyarakat dengan nilai-nilai dan simbol-simbol utama dari masyarakat bersangkutan. Dahulu fungsi ini banyak dilakukan oleh para orang tua dan guru-guru sekolah, namun kini dengan adanya urbanisasi, setelah banyak orang meninggalkan keluarga untuk merantau, atau terjadi isolasi dan anonimitas pada banyak orang, peranan media massa amat esensial dalam proses sosialisasi dan pemindahan warisan sosial.
- 4 . Untuk mendapatkan hiburan atau *Entertainment*. Fungsi ini menunjuk pada usaha-usaha yang dilakukan media massa dalam memberikan hiburan pada masyarakat. Anggota masyarakat yang memanfaatkan media untuk fungsi ini menjadikan media sebagai salah satu sarana untuk melepas rasa lelahnya dan sarana untuk mengatasi kejenuhan.

Sedangkan media massa diartikan sebagai perangkat dari komunikasi massa yang digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan secara terus menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Media massa yang dimaksud adalah televisi, radio, surat kabar dan film.

Media yang dijadikan objek penelitian ini adalah surat kabar. Surat kabar termasuk ke dalam kategori media massa karena mempunyai beberapa karakteristik, yaitu : *publisitas*, penyebaran pesan pada khalayak; *periodesitas*, yaitu menunjuk pada keteraturan terbitnya (harian, mingguan atau dwimingguan); *universalitas* menunjuk pada kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia; dan *aktualitas* yang artinya “kini dan keadaan sebenarnya”.

## 2.2. Media Massa dan Konstruksi Realitas

Media telah menjadi sumber yang dominan tidak saja bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran dan citra realitas sosial. Melalui isi media, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia direfleksikan. Shoemaker dan Reese menyebutkan dua konsep utama dalam melihat refleksi realitas media, yaitu *konsep media secara aktif* yang memandang media sebagai partisipan yang turut mengkonstruksi pesan sehingga muncul pandangan bahwa tidak ada realitas sesungguhnya dalam media dan *konsep media secara pasif* yang memandang media hanya sebagai saluran yang menyalurkan pesan-pesan sesungguhnya, dalam hal ini media berfungsi sebagai sarana netral, media menampilkan suatu realitas apa adanya.

Konsep media secara aktif menjadi relevan dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Sesuai dengan pandangan konstruksionis sebagai paradigma penelitian yang dipilih, media dilihat bukan sebagai saluran yang bebas atau netral, tetapi sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas, di mana para pekerja yang terlibat dalam produksi pesan juga menyertakan pandangan, bias dan pemihakannya. Oleh karenanya, media massa memiliki “realitas” - yang kita sebut saja dengan “*realitas media*” yang berbeda dengan realitas yang sebenarnya (empiris), walaupun realitas media diproduksi sepenuhnya berdasarkan realitas empiris. Realitas empiris berupa fakta-fakta, memiliki keutuhan dan kerangka. Ketika suatu peristiwa direkam oleh kamera, atau ditulis oleh wartawan sesungguhnya yang direkam atau ditulis itu hanyalah “potongan-potongan peristiwa dari suatu peristiwa yang utuh dan berkerangka”. Suatu peristiwa yang dijadikan berita oleh wartawan tadi kemudian diedit, dikemas, dan dijadikan jalinan cerita baru, dan mungkin ditulis atau disajikan untuk mendukung suatu kepentingan atau menghindari tekanan suatu kekuasaan. Idealnya, setiap media menyajikan secara utuh suatu peristiwa, namun pada kenyataannya banyak penelitian yang membuktikan bahwa isi media tidak selalu mencerminkan seluruh realitas sosial yang ingin disampaikan dan media yang berbeda akan menghasilkan isi yang berbeda dalam menyajikan suatu realitas yang sama.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pada dasarnya pekerjaan media (termasuk surat kabar) adalah kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana pekerja

media mengkonstruksikan suatu realitas. Isi media merupakan hasil dari para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, begitu pula dengan berita yang disajikan dalam tajuk rencana yang disajikan pada surat kabar Kompas dan Republika. Tuchman (1980) menyatakan bahwa, pembuatan berita di media massa pada dasarnya merupakan penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah “cerita”. Karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) (Sobur, 2001:87-89).

Istilah konstruksi realitas diperkenalkan pertama kali oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) melalui bukunya *The Social Construction of Reality : A Treatise in Sociological of Knowledge*. Menurut Berger dan Luckman, proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Berger dan Luckmann (1960:61 dalam Sobur, 2001:91) menjelaskan bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama . Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan.

Realitas sosial dikonstruksi melalui proses *eksternalisasi*, *objektivasi* dan *internalisasi*. Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan. *Eksternalisasi* adalah penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. *Internalisasi* adalah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Sedangkan *obyektivasi* adalah interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

Salah satu teori yang terkenal dalam media yang membahas hubungan antara media dengan realitas sosial adalah teori konstruksi sosial atas realitas yang dikembangkan oleh Adoni dan Mane. Teori ini memusatkan perhatian kepada proses pembentukan realitas, yaitu bagaimana realitas dibentuk oleh individu dan bagaimana individu juga menginternalisasi realitas yang disajikan oleh media. Adoni dan Mane, membagi realitas dalam tiga bentuk. *Pertama*, realitas objektif yang dilihat sebagai dunia yang objektif, diterima secara *common sense* sebagai fakta dan tidak diperlukan verifikasi untuk membuktikannya. Semua realitas itu dipandang sebagai fakta yang diterima sebagai kebenaran dan dapat dilihat misalnya umur, pendapatan dan pendidikan. *Kedua*, realitas simbolik diartikan sebagai bentuk ekspresi simbolik dari realitas objektif, misalnya seni, sastra dan isi media. Realitas ini menafsirkan dan mengekspresikan dunia yang objektif dan menterjemahkannya ke dalam realitas baru. Realitas ini tidak sama dengan realitas yang sebenarnya karena telah melewati berbagai saringan dan predisposisi individual. Tayangan berita dan iklan di televisi, surat kabar dan majalah adalah contoh-contoh dari realitas simbolik. Pada tahap ini, realitas yang terjadi di dunia nyata, diubah dan dibentuk dalam kodifikasi dan simbol-simbol yang bisa diterima oleh khalayak. Suatu peristiwa yang terjadi pada dunia nyata berusaha untuk ditampilkan oleh wartawan dalam media dan setelah melalui berbagai proses produksi berita yang panjang menjadi gambar-gambar atau berita-berita dalam media yang bisa diterjemahkan oleh khalayak. Betapapun para pekerja media berusaha untuk menerjemahkan dan mengkopi realitas yang sesungguhnya, namun realitas simbolik yang ditampilkan tetap berbeda dengan realitas yang sesungguhnya.

*Ketiga*, realitas subjektif yaitu realitas yang hadir dalam benak dan kesadaran individu. Realitas tersebut dapat berasal dari realitas objektif maupun realitas imbolik, yang secara bersama-sama dapat mempengaruhi realitas subjektif seseorang sehingga setiap individu bisa jadi mempunyai penafsiran dan realitas masing-masing. Segala aspek yang terdapat dalam diri individu seperti pengalaman dan latar belakang kehidupannya mempunyai andil dalam membentuk persepsi dan pemahanan individu atas realitas.



Dalam menyajikan realitas sosial, media memiliki “bahasa” tersendiri, bahasa yang terdiri atas seperangkat tanda tidak pernah membawa makna tunggal di dalamnya. Isi/teks media selalu memiliki ideologi dominan yang terbentuk melalui tanda tersebut, artinya jika kita gali lebih dalam, teks media membawa kepentingan-kepentingan yang lebih luas dan kompleks. Oleh karenanya, apa yang dimuat media massa tidak terlepas dari berbagai kepentingan atau kekuatan yang dibelakangnya. Media juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk kecenderungan opini yang berkembang dan ideologi yang berkembang di masyarakat.

DeFleur dan Rokeach (1989: 265-269) menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengkonseptualisasikan sebuah peristiwa atau keadaan oleh seseorang merupakan usaha untuk mengkonstruksi realitas, demikian halnya dengan upaya para pekerja media ketika berusaha untuk menampilkan suatu realitas tertentu dalam medianya. Unsur utama dan penting yang dipakai dalam konstruksi realitas adalah bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non verbal, seperti gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka dan tabel.

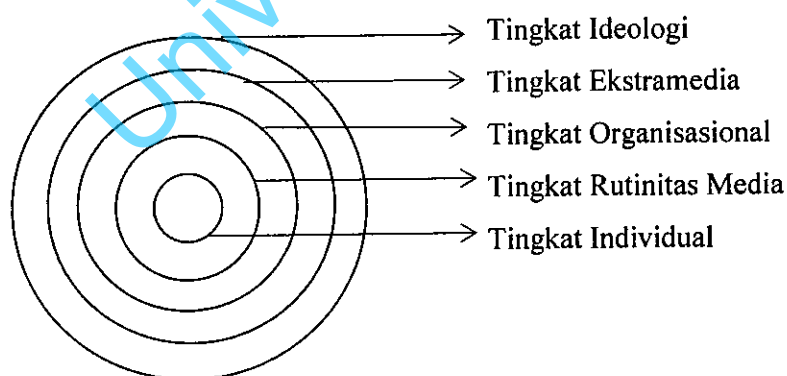
Bahasa bukanlah sesuatu yang netral, tetapi mengandung makna. Sebagai alat untuk mempresentasikan realitas, melalui pilihan kata-kata dan cara penyajiannya, bahasa juga dapat menciptakan realitas dan menentukan corak dari realitas yang ditampilkannya, sekaligus menentukan makna yang muncul darinya. Bahasa dapat memberikan aksentuasi tertentu terhadap suatu peristiwa atau tindakan tertentu, dengan cara mempertajam, memperlambatkan, melecehkan, membelokkan atau mengaburkan peristiwa atau tindakan tersebut. Walaupun kegiatan jurnalistik menggunakan bahasa dalam memproduksi berita. Namun, bagi media bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, namun juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik (Sobur, 2001:89). Berger dan Luckman (dalam Littlejohn, 1999) menyatakan bahwa ada serangkaian cara untuk memahami objek. Bahasa yang kita gunakan adalah salah satu cara untuk memahami objek dan untuk memberikan label terhadap suatu objek agar dapat dibedakan dengan objek lainnya.



Demikian halnya dengan berita-berita yang disajikan dalam tajuk rencana, bahasa yang digunakan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme dan nilai atau aturan yang ada di masyarakat. Media menentukan suatu realitas melalui berbagai cara, yaitu pemakaian kata-kata yang terpilih untuk tujuan tertentu, melakukan pembingkai berita, dan mempergunakan simbol-simbol agar menimbulkan citra tertentu ketika diterima khalayak serta menentukan apakah isu tersebut penting atau tidak penting. Di sini media merupakan agen konstruksi pesan yang mencerminkan bagaimana seseorang atau kelompok mempunyai konstruksi dan pemaknaan yang berbeda atas suatu realitas. Media adalah subjek yang mengkonstruksi realitas.

Selain aspek penggunaan bahasa yang dianggap turut mempengaruhi adanya perbedaan dalam penyajian suatu realitas, perbedaan dan kecenderungan tertentu setiap media dalam memproduksi isi media dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari sikap pribadi dan konsepsi peran para pekerja media, rutinitas pekerjaan media, struktur dan budaya organisasi media, hubungan antara media dengan institusi sosial lainnya serta kekuatan ideologi dan budaya yang luas. Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese menyebut pengaruh-pengaruh "*hierarchy of influence*" yang merupakan lapisan-lapisan yang melingkupi institusi media tersebut (Shoemaker dan Reese, 1996).

**Gambar 1**  
**Hierarchy of Influence**



Sumber : Shoemaker dan Reese, 1993

### 1. Faktor pada tingkat individual

Faktor individu-individu pekerja media juga turut mempengaruhi produksi isi media. Sejumlah faktor individual seperti karakteristik dari pekerja, latar belakang personal dan profesional atau pengalaman individual, juga nilai-nilai serta kepercayaan serta etika yang mereka anut.

### 2. Faktor pada tingkat rutinitas media

Faktor rutinitas institusi media juga akan mempengaruhi isi media, bahkan rutinitas mempunyai dampak yang besar terhadap isi media, karena rutinitas adalah lingkungan sesungguhnya dari pekerja media dan tidak dapat dipisahkan dengan pekerja media dalam melakukan pekerjaan mereka. Rutinitas dalam media biasanya berkaitan dengan kegiatan seleksi yang dilakukan oleh wartawan yang menjalankan fungsinya sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang). Tugas *gatekeeper* adalah memilih sedemikian banyak berita yang masuk untuk dibuat pada halaman tertentu. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah adanya *deadline* dan rintangan waktu yang lain, keterbatasan *space* untuk menyajikan berita, struktur piramida terbalik dalam penulisan berita dan kepercayaan reporter pada sumber-sumber resmi dalam suatu berita.

### 3. Faktor pada tingkat organisasional

Level organisasi media yang memperkerjakan karyawannya, memberi mereka upah dan mempromosikan mereka juga akan mempengaruhi produksi isi media yang akan dihasilkannya. Hal-hal pada level organisasi media seperti peranan yang diemban pekerja media, struktur dan bentuk dari organisasi serta tujuan utama dari organisasi media yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap produksi media. Selain itu, kekuasaan organisasi media terletak pada pemiliknya, sebagai pihak yang menentukan dan mendorong pelaksanaan kebijakannya tidak dapat dielakkan sangat besar pengaruhnya terhadap produksi isi media.

### 4. Faktor pada tingkat ekstra media

Tingkat ekstra media berkaitan dengan faktor lingkungan di luar media yang sedikit banyak akan mempengaruhi pemberitaan media. Faktor ekstramedia yang mempengaruhi isi media berkaitan dengan beberapa hal, yaitu : Sumber-

sumber berita, kelompok kepentingan tertentu, kampanye *public relations*, pemasangan iklan dan khalayak, pengawasan dari pemerintah berupa peraturan-peraturan pers, pasar dan lingkungan ekonomi, serta teknologi.

#### 5. Faktor pada tingkal Ideologi

Ideologi diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan faktor-faktor lain yang tampak konkret, level ideologi bersifat abstrak, karena berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Faktor ideologi mempengaruhi isi media, berkaitan dengan mekanisme simbolik yang berfungsi sebagai sebuah kekuatan kohesif dan terpadu pada masyarakat. Ideologi dari suatu media dapat terlihat dari bagaimana media massa mengatur untuk mempropagandakan ideologi ini, dan kekuatan yang mengatur kealamian ideologi tersebut.

#### 2.3. Surat Kabar sebagai Agen sosialisasi.

Dari empat fungsi media massa yaitu menginformasikan berita, mendidik (edukasi), memberi hiburan dan persuasif maka fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah menginformasikan berita. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pada umumnya khalayak yang membaca surat kabar. Disamping itu, sejarah dibuatnya media ini adalah untuk memenuhi keingintahuan khalayak akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karenanya rubrik-rubrik yang disajikan dalam surat kabar sebagian besar terdiri dari berbagai jenis berita. Pada perkembangannya surat kabar juga berfungsi membangun dan mengembangkan rasa keterlibatan di lingkup global dan menjadikannya sebagai bagian penting dari identitas sosial kebudayaan yang dapat dilakukan ketika menyajikan berita. (Whetmore. 1987:33).

Dalam kehidupan masyarakat, selain menjalankan fungsi sebagai saluran untuk menyajikan berita dan hiburan, surat kabar mempunyai peranan yang penting sebagai agen sosialisasi dengan kemampuan yang dimilikinya yaitu mengajak dan mengukuhkan norma-norma tertentu dalam masyarakat. Debra Yatim ( dalam Ibrahim dan Susanto,1999:108-109) menyatakan bahwa media

massa memiliki hubungan dua arah dengan realitas sosial. Di satu pihak media menjadi cermin bagi keadaan di sekelilingnya, namun di lain pihak ia juga membentuk realitas sosial itu sendiri. Melalui sikapnya yang selektif dalam memilih hal-hal yang ingin diungkapkan dan melalui caranya menyajikan informasi tersebut. Media memberi interpretasi, bahkan membentuk realitasnya sendiri. Termasuk di dalam interpretasi selektif ini yakni pengukuhan nilai, sikap serta pola-pola perilaku masyarakat.

#### **2.4. Paradigma Konstruktivisme dan Media massa**

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah hasil dari konstruksi (bentukan) kita yang mengetahui sesuatu. (Suparno, 1997:11). Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Pengetahuan adalah suatu kerangka untuk mengerti bagaimana seseorang mengorganisasikan pengalaman dan apa yang mereka percayai sebagai realitas. Von Glasersfeld (seperti dikutip Suparno, 1997:18) menegaskan bahwa, pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas). Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Bettencourt menyatakan bahwa, seseorang membentuk skema, kategori, konsep dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Pengetahuan tidak terlepas dari pengamatan, tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman atau dunia sejauh dialaminya. Proses pembentukan ini berlangsung terus menerus dengan setiap saat dilakukan reorganisasi karena adanya suatu pemahaman yang baru. Oleh karenanya ditekankan oleh para konstruktivis bahwa satu-satunya alat/sarana yang yang digunakan seseorang untuk mengetahui sesuatu adalah melalui alat inderanya. Dengan cara melihat, mendengar, menjamah, mencium dan merasakan. Bagi konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Tiap orang harus mengkonstruksi pengetahuan.

Paradigma konstruktivisme melihat komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna, di mana kegiatan komunikasinya berlangsung secara terus menerus dan dinamis. Pendekatan ini menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Konsep makna menunjuk pada sesuatu yang diharapkan untuk ditampilkan, khususnya melalui bahasa dan merupakan suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang ketika menerima suatu pesan. (Crigler, 1996:7-9).

Secara lebih khusus, Eriyanto (2002:37-63) merangkum beberapa pendapat para ahli tentang bagaimana pendekatan konstruksionis menilai media, wartawan dan berita, yaitu :

1. Menurut pendekatan konstruksionis, tidak ada realitas yang bersifat objektif. Realitas tercipta karena proses konstruksi berdasarkan sudut pandang dari para pekerja media (wartawan, editor, nara sumber). Oleh karenanya realitas itu bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh pekerja media yang mempunyai pandangan berbeda.
2. Menurut pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas atau netral yang menyajikan berita apa adanya atau cermin dari realitas. Ia adalah subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang secara aktif mendefinisikan realitas untuk disajikan pada khalayak (Bennett, 1982:287). Melalui berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Sebagai agen konstruksi dari realitas, media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil untuk disajikan dalam berita. Media juga memilih aktor-aktor yang dijadikan sumber berita sehingga hanya sebagian dari sumber berita yang tampil dalam pemberitaan. Lewat pemakaian bahasa, media juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa. Selain itu, media juga membingkai suatu peristiwa dengan bingkai tertentu untuk menentukan bagaimana khalayak harus melihat dan memahami peristiwa dalam pandangan tertentu. .

3. Dalam pandangan konstruksionis berita bukan merupakan cermin dan refleksi dari realitas, tetapi konstruksi dari realitas. Ketika suatu peristiwa menjadi sebuah berita yang ditampilkan dalam media, maka berita tersebut adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu menyertakan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai (Schudson, dalam Curran dan Gurevitch, 1991:141-142).
4. Dalam pandangan konstruksionis, khalayak dipandang bukan sebagai subjek yang pasif tetapi mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita. Pemaknaan atas berita yang diterimanya sangat tergantung pada masing-masing khalayak yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap orang bisa mempunyai pemaknaan yang berbeda atas teks yang sama.

Analisis *framing* erat kaitannya dengan studi mengenai pemakaian bahasa yang dipergunakan dalam teks/isi media. Dalam konstruktivisme yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan, tetapi menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya.

### **2.5. Pengertian Tajuk Rencana**

Tajuk rencana adalah satu bentuk opini yang biasa disajikan dalam surat kabar, tabloid, atau majalah. Opini pada tajuk rencana memperlihatkan bagaimana aspirasi, pendapat, dan sikap resmi suatu media pers terhadap persoalan potensial, fenomenal dan atau aktual yang terjadi dalam masyarakat. Karakter dan kepribadian pers tercermin dalam tajuk rencana, karena opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi pers yang bersangkutan secara keseluruhan sebagai suatu lembaga penerbitan media berkala. Oleh karena merupakan suara lembaga, maka tajuk rencana tidak ditulis dengan mencantumkan nama penulisnya. Umumnya penulis tajuk rencana adalah pemimpin redaksi atau redaktur senior yaitu orang yang terpercaya, dan

mengetahui kebijakan pemberitaan serta kebijakan surat kabar tempat dia bekerja. (AS Haris S,2004:83)

Menurut Assegaff (dalam AS Haris S, 2004:83) menyatakan bahwa tajuk rencana sedikitnya harus mengandung lima unsur yang satu sama lain saling terkait, yaitu :

1. menyatakan suatu pendapat
2. pendapat itu disusun secara logis
3. singkat
4. menarik
5. dimaksudkan untuk mempengaruhi pendapat para pembuat kebijakan dalam pemerintah atau masyarakat

Universitas Terbuka

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 . Paradigma Penelitian

Paradigma didefinisikan Guba sebagai “.....a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principles ... a world view that defines, for its holder, the nature of the “world” .... “ (dalam Denzin dan Lincoln, 1994:107). Studi ini memakai paradigma konstruktivisme yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam *setting* keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

Beberapa ciri paradigma konstruktivisme berdasarkan elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut (Hidayat, 1999:41)

1. Berdasarkan *epistemologis*, konstruktivisme bersifat *transactionalist/subjectivist*, artinya pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.
2. Secara *ontologis*, paradigma ini melihat bahwa suatu realitas merupakan suatu konstruksi sosial, di mana kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
3. Berdasarkan perbedaan *axiologis*, konstruktivist berpendapat bahwa nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. Peneliti berperan sebagai *passionate participant*, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas dari pelaku sosial. Tujuan penelitian adalah merekonstruksi suatu realitas sosial secara dialektis antara peneliti dengan pelaku sosial yang diteliti.
4. Secara *metodologis*, konstruktivisme bersifat *reflective/dialectical* yang menekankan empati, dan interaksi dialektis antara peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif, seperti *participant observation*.



5. Kriteria kualitas penelitian adalah *authenticity* dan *reflectivity*, yaitu sejauhmana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas dihayati oleh para pelaku sosial.

Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri, oleh karenanya pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas) atau gambaran dari kenyataan yang ada. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Pada proses ini seseorang membentuk skema, kategori, konsep dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan, sehingga suatu pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas dari pengamat tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman atau dunia yang secara terus menerus dialaminya (Suparno, 1997:11-15).

Konstruktivis percaya bahwa untuk dapat memahami suatu arti orang harus menterjemahkan pengertian tentang sesuatu. Para peneliti harus menguraikan konstruksi dari suatu pengertian/makna dan melakukan klarifikasi tentang apa dan bagaimana suatu arti dibentuk melalui bahasa serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor/pelaku sosialnya.

Konstruktivisme melihat proses sosialisasi akan berhasil jika individu dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat. Individu mengikuti konstruksi yang dipandang objektif pada saat itu dan keberhasilan sosiologi menurut individu adalah jika ia menerima legitimasi dari masyarakat. Proses dialektis ini mempunyai implikasi bahwa dalam proses internalisasi tidak semua realitas terserap kesadaran subjektif dengan baik sehingga konstruksi manusia tentang realitas dunia itu tidak tunggal, melainkan berganda (*multiple*), di mana realitas yang menonjol yang menjadi realitas keseharian, yang dianggap normal, objektif, dan wajar.

### 3.2 . Pendekatan/Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami realitas yang diteliti dengan pendekatan menyeluruh, tidak melakukan pengukuran pada realitas. Menurut Denzin dan Lincoln (1994:4), istilah kualitatif menunjuk pada suatu penekanan pada proses-proses dan

makna-makna yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, intensitas ataupun frekuensi.

Penelitian kualitatif memberi penekanan pada sifat bentukan sosial realitas, hubungan akrab antara peneliti dan objek yang diteliti, dan kendala-kendala situasional yang menyertai penelitian. Penelitian kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan yang menekankan pada bagaimana pengalaman sosial dibentuk dan diberi makna. Neuman, menegaskan bahwa ciri dari penelitian kualitatif dimulai dengan pertanyaan penelitian.

Suatu penelitian kualitatif dilandasi oleh beberapa asumsi dasar tentang realitas sosial, hubungan peneliti dengan realitas sosial dan cara peneliti mengungkap realitas sosial tersebut (MT. Felix Sitorus, 1998). Asumsi-asumsi tersebut adalah :

- a. Realitas sosial adalah fakta subjektif. Realitas sosial adalah fakta tentang perilaku manusia. Perilaku manusia selalu bersifat subjektif. Artinya setiap individu secara subjektif mengenakan makna dan maksud tertentu terhadap tindakan sosialnya. Peter L. Berger (1966) menekankan bahwa, realitas sosial terbentuk secara sosial melalui proses dialektis yang timbal balik, berulang, dan berjalan sekaligus antara individu dengan struktur sosial. Realitas sosial tak terpisah dari manusia karena manusia adalah produk masyarakat.
- b. Fakta sosial selalu sarat nilai, karenanya apa yang dimaksud sebagai fakta ilmiah tentang realitas sosial adalah konstruksi sosial, yaitu konsensus dari interaksi subjektif antar pihak/objek yang diteliti.
- c. Realitas sosial yaitu perilaku manusia yang harus dipahami dari sisi pandang subjek dari pihak/objek yang diteliti. Peneliti kualitatif dapat mengungkap kebenaran tentang realitas sosial yaitu dengan menangkap pandangan subjektif dari orang yang diteliti. Oleh karenanya, dalam penelitian kualitatif hubungan antara peneliti dengan objek yang diteliti adalah hubungan yang setara (Subjek – Subjek).

Bagian yang terpenting dari pengamatan terhadap media adalah pada teks/isi media (*media content*), di mana pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Berbeda dengan analisis isi yang bersifat kuantitatif yang lebih menekankan pada pertanyaan “apa” (*what*), analisis isi kualitatif lebih melihat pada “bagaimana” (*how*) dari pesan atau teks yang disajikan dalam media. Eriyanto (2001:xvi) menjelaskan bahwa, melalui analisis isi kualitatif kita bukan hanya dapat mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi lebih jauh lagi dapat diketahui bagaimana pesan itu disampaikan. Melalui analisis

ini dapat dilihat makna yang tersembunyi dari suatu teks dengan melihat atau membaca bangunan struktur kebahasaan - melalui kata, frasa, kalimat, jenis metafora yang dipakai – dari berita yang disajikannya.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana Kompas & Republika menyajikan berita-berita yang disajikan dalam tajuk rencana sebelum dan sesudah reformasi, bagaimanakah kecenderungan isinya. Sebagai surat kabar yang mempunyai distribusi berskala nasional, Kompas dan Republika mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah-masalah yang potensial, fenomenal, aktual dan atau kontroversial yang terdapat dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam analisis isi pada penelitian ini adalah analisis *framing*.

### 3.3. Metode Analisis

Analisis *framing* adalah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Pendekatan ini melihat realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang sesungguhnya, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, analisis *framing* difokuskan untuk menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi oleh media dan dengan cara apa konstruksi itu dibentuk, (Eriyanto, 2002:37)

Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis media yang digunakan untuk mengetahui bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses ini dilakukan dengan memilih suatu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang terjadi untuk diberitakan serta menekankan aspek tertentu dari peristiwa tersebut melalui bantuan kata, pemakaian *frase* atau kalimat, gambar dan perangkat lainnya. Proses seleksi tersebut berkaitan dengan bagaimana media menempatkan isu-isu tertentu lebih menonjol dibandingkan dengan isu-isu yang lain.

Analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh W.A. Gamson dan Modigliani. Konsep *framing* yang dikemukakannya didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media. Mereka memakai istilah kemasan (*package*) untuk menyebutkan perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan/pekerja media ketika menyeleksi isu-isu tertentu dari suatu peristiwa dan menulisnya

dalam bentuk berita. Kemasan (*package*) atau cara pandang (perspektif) inilah yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. (Nugroho, 2001:21). Konsep ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *Shoemaker* dan *Reese* yang menyatakan bahwa, ketika suatu realitas yang ada dalam masyarakat ditulis oleh para pekerja media maka apa yang disajikan dalam media tersebut merupakan realitas simbolik yang dihasilkan oleh pekerja media karena pengaruh-pengaruh pada level pekerja media, rutinitas media, level ekstramedia, organisasi media dan pengaruh pada level ideologi. Dalam konsep *framing* ditekankan bahwa ketika individu wartawan menulis suatu berita maka mereka selalu menyertakan pengalaman hidup, pengalaman sosial dan kecenderungan psikologisnya ketika menafsirkan pesan yang datang kepadanya. Wartawan dilihat sebagai individu yang besikap aktif dan otonom. Pengalaman dan kecenderungan dari individu wartawan mengendap, memkristal dan membentuk pemahaman tertentu sehingga mereka mempunyai kemampuan dalam proses konstruksi sosial terhadap sebuah wacana. Mereka memetakan, menerima, mengidentifikasi dan memberi label pada peristiwa atau informasi yang dihadapinya.

Gamson dan Modigliani menjelaskan bahwa *Frame* adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Sedangkan istilah kemasan (*package*) adalah gugusan ide-ide yang mengindikasikan tentang isu-isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan dengan wacana yang terbentuk. *Package* adalah semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. Perangkat *framing* yang digunakan oleh Gamson dan Modigliani adalah seperti digambarkan di bawah ini :

**Tabel. 1**  
**Model Framing Gamson & Modigliani**

<p><b>Frame (Media Package)</b></p> <p>Seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. Frame ini akan didukung oleh perangkat wacana lain, seperti kalimat, kata, dan sebagainya. Secara umum, perangkat ide sentral dikelompokkan menjadi dua, yaitu <i>framing device</i> dan <i>reasoning device</i></p>	
<p><b>Framing Devices (Perangkat Framing)</b></p> <p>Berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat ini antara lain, pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar dan metafora tertentu</p>	<p><b>Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)</b></p> <p>Berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Artinya ada dasar pembenar dan penalaran alasan tertentu sehingga membuat gagasan yang disampaikan media atau seseorang tampak benar, alamiah, dan wajar.</p>
<p><b>Metaphor</b></p> <p>Perumpamaan atau pengandaian</p>	<p><b>Roots</b></p> <p>Analisis kausal atau sebab akibat</p>
<p><b>Catchphrases</b></p> <p>Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.</p>	<p><b>Appeals to principle</b></p> <p>Premis dasar, klaim-klaim moral</p>
<p><b>Exemplar</b></p> <p>Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.</p>	<p><b>Consequences</b></p> <p>Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai</p>
<p><b>Depiction</b></p> <p>Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu</p> <p><b>Visual Images</b></p> <p>Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun atau grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.</p>	

Diadaptasi dari Eriyanto, 2002:255

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi berita tajuk rencana surat kabar "Kompas" dan "Republika" selama satu bulan sebelum dan satu bulan sesudah reformasi (21 Mei- 1998) dianalisis dengan menggunakan kategori-kategori berdasarkan isu yang dimuatnya. Secara rinci berbagai macam isu yang muncul pada tajuk rencana surat kabar Kompas dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Kategori Isi Tajuk Rencana Surat Kabar**  
**"Kompas" Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998**

NO	ISU YANG MUNCUL	SEBELUM REFORMASI		SESUDAH REFORMASI	
		Frek	(%)	Frek	(%)
1.	Politik dan Ekonomi	10	37.04	8	40
2.	Hukum dan HAM	1	3.70	1	5
3.	Kebebasan Pers	1	3.70	2	10
4.	Reformasi/Demokrasi	15	55.56	6	30
5.	Korupsi	0	0	3	15
	Jumlah	27	100%	20	100%

Sumber : Pusat Informasi Kompas

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa isu Reformasi/demokrasi menduduki tempat paling atas pada surat kabar "Kompas" yaitu sebesar 55.56% (sebelum reformasi) dan 30% (sesudah reformasi), informasi ini memberikan gambaran bahwa reformasi/demokrasi merupakan suatu hal yang sangat mendesak, karena sudah banyaknya ketidakadilan dilihat, didengar dan dibaca oleh masyarakat. Isu berikutnya yang muncul cukup dominan adalah isu tentang politik dan ekonomi pada tajuk rencana surat kabar "Kompas" yaitu sebesar 37.04% (sebelum reformasi) dan 40% (sesudah reformasi).

Untuk melihat isu yang muncul pada tajuk rencana surat kabar "Republika" selama satu bulan sebelum dan satu bulan sesudah reformasi (21 Mei 1998), secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Kategori Isi Tajuk Rencana Surat Kabar**  
**Republika Sebelum dan Sesudah Reformasi 1998**

NO	ISU YANG MUNCUL	SEBELUM REFORMASI		SESUDAH REFORMASI	
		Frek	(%)	Frek	(%)
1.	Nuansa Keagamaan	3	14.29	0	0
2	Politik dan Ekonomi	7	33.33	12	54.55
2.	Hukum dan HAM	4	19.05	3	13.64
4.	Reformasi/Demokrasi	7	33.33	4	18.18
5.	Korupsi	0	0	3	13.63
	Jumlah	21	100%	22	100%

Sumber: Pusat Informasi Republika

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa isu Reformasi/demokrasi menduduki tempat sama dengan isu tentang politik dan ekonomi pada surat kabar "Republika" yaitu sebesar 33.33% (sebelum reformasi) dan 54.55 % untuk isu tentang politik dan ekonomi (sesudah reformasi), informasi ini memberikan gambaran bahwa isu tentang reformasi/demokrasi serta isu tentang politik dan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat mendesak, yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia sehingga dapat terbentuk Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta dengan adanya stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dapat menjadikan Indonesia dapat meraih kembali kepercayaan dari negara lain yang selama ini telah menjalin kerja sama.

Yang menarik untuk dicermati adalah munculnya isu tentang Korupsi baik di surat kabar "Kompas" dan "Republika", informasi ini memberikan tafsiran bahwa pengusutan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah berani dikemukakan secara terbuka oleh dua surat kabar tersebut. Hal ini mempunyai arti bahwa iklim demokrasi dan reformasi sudah mengalami perkembangan yang lebih bagus di Indonesia.



Setelah mencermati Tabel 2 dan Tabel 3, peneliti memilih 3 buah tajuk rencana dari surat kabar Kompas dan Republika masing-masing sebelum dan sesudah Reformasi untuk dianalisis dengan metode *framing* dari Gamson dan Modigliani. Jadi jumlah keseluruhan tajuk rencana yang dianalisis *framing* adalah 12 buah dan secara rinci dapat dilihat pada analisis berikut.

#### 4.1. Analisis *Framing* 3 Tajuk Rencana Sebelum Reformasi Tahun 1998.

##### A. Kompas

##### 1. Judul “Komitmen Reformasi Ekonomi Dilaksanakan Konsisten dan Kontekstual” (24 April 2007)

Tajuk rencana pertama yang dianalisa dalam periode sebulan sebelum reformasi berjudul “Komitmen Reformasi Ekonomi Dilaksanakan Konsisten dan Kontekstual”. Kompas mewacanakan keterpurukan ekonomi negara pada saat itu tidak hanya disebabkan kurangnya komitmen dan konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah semata, namun juga disebabkan karena terpuruknya kondisi sosial, budaya, politik dan terutama juga karena tidak ditegakkannya keadaan terhadap kasus-kasus kolusi, korupsi, nepotisme dan monopoli yang terjadi di negeri ini.

Elemen inti tulisan (*Idea Element*). Dalam menyajikan dan membahas reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah saat itu, Kompas mengemukakan 4 (empat) isu sentral, yaitu *pertama*, bahwa pemerintah haruslah memiliki komitmen dan konsistensi yang kuat dalam melaksanakan program-program reformasi ekonomi. Hal tersebut dikemukakan melalui teks berikut :

“.... Kita berpendapat sama, kunci keberhasilan mengatasi krisis ekonomi ialah komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi”. (Lampiran 1, hal 1)

*Kedua*, bahwa reformasi ekonomi harus dilaksanakan secara kontekstual, karena masalah perekonomian tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan hal-hal lain terutama penegakan hukum. Karenanya, Kompas berpendapat reformasi perlu dilakukan pula di bidang-bidang sosial, budaya, hukum dan politik. Hal ini dikemukakan melalui teks berikut,

“Apakah implikasi dari kenyataan itu, yakni bertali temalnya krisis dan persoalan ekonomi dengan bidang-bidang lain seperti sosial, budaya, hukum



dan politik ?..... bahwa tali temali itu membuat kita harus melakukan reformasi secara kontekstual. (Lampiran 1, hal 2)

*Ketiga*, tentang perlunya pemerintah mau mengoreksi diri sendiri serta mau memperhatikan isyarat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media. Hal ini disampaikan melalui teks berikut,

“Mengapa isyarat dini, kontrol dan koreksi yang disuarakan lewat media massa, lembaga perwakilan, gerakan kemasyarakatan idak terdengar, tidak didengar dan karena itu tidak mempunyai daya serta dampak kontrol dan koreksi yang efektif dan konstruktif?”. (Lampiran 1, hal. 2)

*Keempat*, bahwa keberhasilan gerakan reformasi di segala bidang tidak ringan, membutuhkan waktu dan hanya akan berhasil apabila dipahami dan dihayati oleh semua pihak terutama para penguasa dan para pengusaha. Hal ini disampaikan melalui teks,

“Agar hasil itu berlangsung terus serta mengikat tali temalnya dengan hal-hal nonekonomi, harus juga ditangkap dan dihayati oleh pemerintah, para menteri, semua jajarannya serta masyarakat bisnis”. (Lampiran 1, hal. 3)

Perangkat pembingkai (*Framing Devices*). Perangkat pembingkai difokuskan pada tujuan untuk dapat “menangkap” ide-ide sentral di atas, melalui elemen-elemen *metaphor*, *exemplars*, *catchphrases* dan *depictions*, yang semuanya diarahkan pada *frame* yang dibentuk oleh redaksi Kompas. Semua elemen dalam perangkat pembingkai digunakan, kecuali *visual images*. Perlunya komitmen dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program-program reformasi ekonomi, diungkapkan dalam *catchphrases* berikut:

“Itulah syarat pokok, melaksanakan program reformasi ekonomi secara konsisten sesuai dengan kesepakatan dan komitmen”. (Lampiran 1, hal 2)

Untuk menguatkan bingkai melalui contoh dalam mengilustrasikan bahwa reformasi ekonomi perlu dilakukan secara kontekstual terutama dalam penegakkan hukum, dinyatakan dalam *exemplars* berikut :

“Sangatlah kuat bahkan *demanding*, mendesak atau menuntut, konteks reformasi ekonomi itu dengan koreksi, perbaikan, transparansi, keadilan dan rasa keadilan. ....kini ada desakan agar yang menyalahgunakan sehingga bank itu bermasalah harus diminta pertanggungjawaban secara hukum”. (Lampiran 1, hal 2).

Redaksi Kompas memberi label pemerintah saat itu sebagai feodal dan hanya mau membelenggu rakyat dan penuh formalitas, karenanya perlu mengkoreksi diri. Hal ini dikemukakan dengan *depiction* berikut :

“Itulah sebabnya, mau tidak mau, secara objektif dan secara logis, krisis dan permasalahan....serta maraknya budaya feodal yang membelenggu daya kerakyatan dan memperkuat formalitas”. (Lampiran 1, hal 3).

Perjuangan reformasi diandaikan sebagai sesuatu yang berat, pahit dan makan waktu dan kesepakatan yang telah dibuat harus secara konsisten dilaksanakan oleh semua pihak. Hal tersebut diungkapkan melalui *metaphor* berikut :

“Memang berat dan pahit, dan tetap makan waktu, tetapi itulah jalan yang telah menjadi kesepakatan ....(Lampiran 1, hal 2)

Perangkat penalaran (*Reasoning Devices*) yang dipakai sebagai alasan pembenar. Sebuah berita tidak semata-mata sebuah gagasan, tetapi juga merupakan sekelompok fakta yang dipilih dan disusun sedemikian rupa untuk membingkai informasi dengan perspektif/pandangan tertentu yang membutuhkan pembenaran. *Roots* atau analisis kausal dari problem besar bangsa pada saat itu, ditampilkan dalam teks berikut,

“.... sebab serta latar belakang itu tidak terbatas hanya pada bidang moneter dan ekonomi, tetapi yang juga bertalian dengan efektifitasnya isyarat-isyarat dini, kontrol, koreksi dan pertanggungjawaban (Lampiran 1, hal 2).

Perangkat pendukung lain berupa klaim moral, disajikan dengan cukup hati-hati sehingga tersirat “masih membolehkan”adanya kolusi, korupsi, nepotisme dan monopoli, asalkan dilakukan dalam “batas kepatutan”. Hal ini terlihat dalam *appeals to principle* pada teks berikut :

“Konteks itu sangat melibatkan kehendak untuk mengakhiri atau membatasi pada ukuran kepatutan segala sesuatu yang terumus dalam formula kolusi, korupsi, nepotisme, monopoli.” (Lampiran 1, hal. 3)

Konsekuensi logis dari komitmen bangsa untuk keluar dari keterpurukan multi dimensi saat ini adalah adanya cara berpikir dan sikap kenegarawanan dari semua elemen bangsa terutama para pemimpin dan melaksanakan demokrasi Pancasila secara murni, sesuai dengan substansi dan semangatnya. *Consequences* tersebut ditampilkan Kompas dalam teks berikut :

“..... dituntut agar tidak lagi memperlakukan pelaksanaan demokrasi Pancasila lebih dari segi dan format sekadar basa basi, sekedar memenuhi persyaratan peraturan dan hukum menurut aksaranya, bukan menurut substansi serta semangatnya”. (Lampiran 1, hal. 3).

## 2. Judul “Yang Harus Kita Usahakan Adalah Menemukan Titik-Titik Temu“ (4 Mei 1998).

Pada 3 minggu terakhir menjelang jatuhnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan “lengsernya” Soeharto tanggal 21 Mei 1998, Kompas menurunkan Tajuk Rencana berjudul “Yang Harus Kita Usahakan Adalah Menemukan Titik-Titik Temu”, yang pada dasarnya membingkai 4 (empat) gagasan pokok yang saling berkaitan, yaitu;

*Pertama*, meski sulit, ada harapan untuk mendapatkan titik-titik temu atau kesepakatan bersama tentang konsep Reformasi antara penguasa dengan rakyat, khususnya mahasiswa. Hal tersebut dituangkan dalam teks berikut,

“Susulan penjelasan itu justru menekankan peluang untuk reformasi. Usaha reformasi tidak menunggu sampai tahun 2003”. (Lampiran 3, hal.1).

*Kedua*, harapan di atas hanya akan tercapai bila masing-masing pihak siap atau bersedia untuk saling mengalah. Artinya, tidak akan ada pihak yang sepenuhnya mendapatkan apa yang diinginkan, dan begitu juga sebaliknya. Perbedaan tentang visi reformasi tidak mungkin sepenuhnya dapat terjembatani. Hal tersebut tertera dalam teks berikut,

“Kedengarannya seperti suatu paradoks-pertentangan semu-jika kita segera mengemukakan, bahwa titik temu berikutnya justru bahwa ada perbedaan antara pemerintah dan-sebut saja-mahasiswa, tentang isi, makna serta skala reformasi itu”. (Lampiran 3, hal.2).

*Ketiga*, agar reformasi dilaksanakan dengan cara-cara yang konstitusional-sehingga mengurangi biaya dan kerugian yang masif sekaligus berbobot edukasi politik maka DPR, masyarakat dan pemerintah perlu mengoreksi diri, sehingga jurang kesenjangan sosial-politik yang ada dapat dipersempit. Gagasan ini dinyatakan melalui teks berikut,

“... hal itu disebabkan di antaranya karena DPR/MPR lebih bekerja menurut pola basa-basi serta formalitas formal tanpa disertai kejujuran yang optimal tentang substansi permasalahannya. Timbullah kesenjangan sosial politik seperti yang tampak dan terasa sekarang”. (Lampiran 3, hal.2).

Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*). Empat ide sentral di atas di *framing* oleh redaksi Kompas dengan *metaphors*, *catchphrases*, *exemplar* dan *depiction*. Untuk menguatkan bingkai ide sentral yang pertama digunakan *catchphrases* berikut,

“Peluang untuk Reformasi tetap terbuka”. (Lampiran 3, hal.1).

Bingkai ide sentral kedua ditonjolkan dengan menggunakan pengandaian (*metaphor*), “Karena itu kita akan menerima sebagai hal yang wajar. Jika tidak semua pendapat kita ini bisa disepakati”. Hal tersebut dituangkan dalam teks berikut,

“Titik temu ini modal yang positif. Marilah kita coba kembangkan lebih jauh dengan pemikiran kritis konstruktif yang disertai sikap sejujur dan setulus mungkin....”. (Lampiran 3, hal.2).

Ide sentral ketiga, ditunjukkan oleh Kompas dengan memberi label (*depiction*) tentang ketidaklayakan DPR saat itu dinyatakan dalam teks tersebut,

“Dapatkan lembaga legislatif yang sama dapat menjadi forum reformasi seperti yang tersurat dan tersirat oleh gerakan reformasi mahasiswa ? Kemungkinan itu ada, asalkan DPR, para anggotanya, fraksinya, pimpinannya, mau melakukan refleksi dan koreksi sikap serta orientasi, sehingga .....”. (Lampiran 3, hal.2).

Sedangkan ide sentral tentang perlu adanya kesepakatan nasional, Kompas memberi contoh adanya titik temu yang kiranya dimaksudkan pula untuk memperbesar harapan terjadinya kesepakatan antara pemerintah dengan mahasiswa-melalui *exemplar* berikut,

“Di sinilah justru terdapat titik temu awal antara pendapat dan sikap pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Presiden dengan maraknya pemikiran, harapan bahwa tuntutan perihal reformasi ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya yang disuarakan oleh para mahasiswa dengan disertai unjuk rasa di kampus-kampus”. (Lampiran 3, hal.2).

Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*). Perangkat penalaran sebagai pembenar gagasan yang ditampilkan, digunakan oleh redaksi Kompas melalui analisis kausal atau sebab akibat (*roots*), premis dasar atau klaim moral (*appeals to principle*) dan konsekuensi yang didapat dari bingkai (*consequences*) yang terlihat jelas dalam teks-teks yang ditampilkan.

Sebagai pendukung ide sentral pertama yaitu digunakan *consequences* sebagaimana tertera dalam teks berikut,

“Sekiranya pengamatan itu benar, maka itulah yang harus juga menyertai upaya pendekatan dan pencarian titik temu; mengembalikan kepercayaan, kewibawaan dan akhirnya juga kompetensi.....”. (Lampiran 3-Hal.3).

Sebagai pendukung ide sentral kedua, digunakan *appeals to principle* atau klaim moral berikut,

“Titik temu ini modal yang positif. Marilah kita kembangkan lebih jauh dengan pemikiran kritis konstruktif yang disertai sikap sejujur dan setulus mungkin. Karena itu kita akan menerima sebagai hal yang wajar, jika tidak semua pendapat kita ini bisa disepakati”. (Lampiran 3-Hal.2).

*Appeals to Principle* atau klaim moral di atas sekaligus juga merupakan pembenar atas gagasan ke-empat yaitu, gagasan dan pesan moral redaksi Kompas kepada semua elemen bangsa terutama para pemimpin pemerintah untuk mengupayakan titik temu bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan negara.

Sedangkan sebagian pendukung ide sentral ketiga, hal itu ditampilkan melalui *roots* berikut;

“Yakni bahwa terlanjur sempat muncul dan meluas hampir-hampir menjadi gejala dan yang kita maksudkan adalah gejala kurang percaya atau tidak percaya, gejala prasangka atau purbasangka. Ada gejala krisis kepercayaan dan karena itu juga krisis kepercayaan”. (Lampiran 3, hal.3).

### **3. Judul “Pernyataan Presiden Soeharto Patut Dipertimbangan Sungguh-Sungguh” (20 Mei 1998).**

Satu hari sebelum Soeharto mengakhiri kekuasaannya, Kompas menurunkan tajuk rencana berjudul “Pernyataan Presiden Soeharto Patut Dipertimbangan Sungguh-Sungguh” Saat itu situasi negara telah menjadi sangat tidak menentu. Gelombang demonstrasi secara besar-besaran terjadi di berbagai daerah. Gedung DPR/MPR sudah diduduki para demonstran – yang umumnya adalah para mahasiswa – yang didukung oleh mayoritas penduduk negeri ini. Suara mayoritas rakyat waktu itu adalah menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang dengan target utama jangka pendek (baca; secepatnya) adalah turun dan digantinya Presiden Soeharto.

Dalam keadaan seperti itu, Soeharto mencoba memberikan penawaran/alternatif solusi yang diharapkan dapat menjawab “sebagian” dari tuntutan para demonstran, sehingga ia berharap ada titik temu bagi tercapainya kesepakatan nasional. Tawaran yang diajukan Soeharto kala itu secara garis besar adalah :

1. Membentuk komite reformasi yang akan dipimpin sendiri oleh Presiden. Tugas komite reformasi adalah secepatnya menyelesaikan UU Pemilihan Umum, UU Kepartaian, UU Anti Korupsi, UU Anti Monopoli, Struktur Susunan Keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan perangkat politik yang lain sesuai dengan bentuk reformasi yang diinginkan rakyat. Undang-undang dan perangkat-perangkat politik tersebut dibutuhkan guna dilakukannya percepatan pemilihan umum (tidak harus menunggu sampai dengan tahun 2003).
2. Menyelenggarakan pemilihan umum yang dipercepat berdasarkan Undang-Undang dan perangkat-perangkat politik yang baru, sehingga MPR yang baru dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, di mana Soeharto secara pribadi tidak bersedia dicalonkan lagi.

Tawaran politik Soeharto di ataslah yang dimaknai dan diwacanakan (tentu juga diwarnai oleh sudut pandang redaksi Kompas) dalam tajuk rencana Kompas, Rabu, thl 20 Mei 1998.

Elemen inti Berita (*Idea Element*). Sangat jelas bahwa isi yang disajikan dalam tajuk rencana tersebut hanya memuat satu gagasan sentral, yaitu mengajak seluruh komponen bangsa untuk menerima tawaran Presiden Soeharto. Karenanya semua pertanyaan dan pemikiran yang bertentangan dengan gagasan sentral di atas yang sengaja dimunculkan, selalu dijawab sendiri oleh redaksi dengan jawaban yang mengarah kepada pembenaran terhadap gagasan sentral yang ditawarkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam teks-teks berikut,

“Persoalan yang menjadi isi pikiran dan kepedulian kalangan kaum reformis bukanlah mundurnya Presiden Soeharto semata, tetapi sekaligus juga *what next?* ... Dalam saran yang kemarin diumumkan sendiri oleh Presiden, *what next* itu sekaligus ditawarkan, yakni dipilihnya Presiden dan wakil Presiden baru oleh MPR, hasil peilihan umum baru..”.

“Memang timbul masalah waktu....Sedangkan kompensasi lainnya berupa terbuka kesempatan untuk memilih secara bebas –



bertanggungjawab tim pimpinan nasional baru, Presiden dan Wakil Presiden. (Lampiran 5, hal 1)

“Catatan yang muncul : bagaimana menjamin otoritas dan kredibilitas reformasi yang dipimpin oleh Presiden yang justru menjadi sasaran gerakan reformasi Masuk akal jika .... (Lampiran 5, hal 2)

“Termasuk jiwa dan semangat reformasi yang demokrasi adalah kompromi. Itulah sebabnya, patut dan pada ..... (Lampiran 5, hal 3).

Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*). Kecuali *visual image*, Kompas menggunakan perangkat-perangkat pembingkai lainnya. Kesemuanya itu dipahami bukan sebagai perangkat tulisan berita, melainkan sebagai suatu strategi wacana untuk menekankan makna atau mengedepankan pandangan tertentu agar lebih dapat diterima oleh pembaca.

Dalam tajuk rencana ini untuk mengedepankan gagasan sentralnya, Kompas menggunakan pengandaian. Seandainya Presiden Suharto mundur atau dilengserkan, apakah menjamin bahwa setelah itu terselenggara pemerintahan yang baik rakyat? Pengandaian atau *metaphor* tersebut dinyatakan dalam teks berikut :

“... Bagaimana bersama-sama mengusahakan dan menjamin bahwa setelah itu, menjadi lebih terjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?” (Lampiran 5, hal 1).

Gagasan sentral juga dikuatkan oleh slogan dalam bentuk pernyataan singkat, tapi jelas maknanya, yaitu *catchphrases* berikut,

“Setelah itu apa ? (Lampiran 5, hal 1)

Terhadap tuntutan sebagian besar rakyat yang disuarakan mahasiswa agar Presiden Suharto meletakkan jabatan saat itu juga, maka Kompas mengaitkan gagasannya yaitu untuk sebaiknya menerima tawaran Presiden Suharto, meskipun waktu menjadi kendala karena berarti Soehartoo masih menjabat Presiden dan juga akan memimpin komite reformasi, namun kerugian waktu tersebut terkompensasi dengan hasil kerja komite reformasi. Hal tersebut diungkapkan melalui uraian perbandingan (*exemplaar*) sebagai berikut :

“...ialah bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan berdasarkan undang-undang pemilihan baru berdasarkan undang-undang kepartaian baru,

berdasarkan substansi reformasi politik yakni terjaminnya secara optimal kedaulatan rakyat (Lampiran 5, hal 1).

Untuk menopang gagasan sentralnya, Kompas memberi label positif terhadap tawaran sekaligus jawaban politik yang berasal dari Soeharto terhadap tuntutan reformasi. Hal itu dinyatakan dalam *depiction* berikut,

“ada faktor lain yang sebaiknya juga dipertimbangkan bahwa langkah presiden merupakan responsnya yang positif tetapi terhormat terhadap tuntutan reformasi”. (Lampiran 5, hal 2)

Perangkat penalaran (*reasoning devices*). Agar dapat diterima oleh para pembacanya, gagasan yang dikemukakan perlu didukung oleh perangkat-perangkat penalaran yang dalam teori *framing* Gamson dan Modigliani terdiri dari *roots*, *appeals to principle* dan *consequences*. Tujuannya adalah agar khalayak dapat menerima bahwa gagasan atau “versi berita” yang disajikan adalah benar.

Untuk menyematani tuntutan para reformis agar Soeharto lengser dengan pernyataan Soeharto untuk membentuk komite reformasi terlebih dahulu guna menyelenggarakan pemilihan umum yang dipercepat (yang dijadikan gagasan sentral tajuk rencana Kompas), maka redaksi Kompas mendukung gagasan sentralnya tersebut dengan analisis klausal sebagai berikut bahwa reformasi nasional akan dilakukan Presiden bersama dengan Komite Reformasi yang beranggotakan individu-individu yang kredibel. Akibatnya meskipun Presiden belum akan diganti saat itu juga, namun juga tidak harus menunggu terlalu lama. Hal tersebut dinyatakan melalui *roots* berikut :

“Untuk mempercepat dan melancarkan proses, Presiden masih akan memimpin reformasi nasional itu. Untuk melaksanakan tugas itu, akan dibentuk komite reformasi.... (Lampiran 5, hal 1).

Sementara premis dasar atau klaim moral yang digunakan untuk mendukung gagasan sentral adalah; ajakan kepada khalayak untuk mau mengupayakan perbaikan secara tulus dan bersama-sama, bukan dengan sikap yang dapat mengakibatkan perpecahan. Klaim moral tersebut dinyatakan melalui teks berikut :

“... tuntutan reformasi serta krisis nasional ini hanya dapat diatasi oleh siapapun dan pihak manapun, jika ditanggapi serta diusahakan bersama dengan kejujuran, ketulusan, kenegarawan yang Mengajak



dan mempersatukan, bukan yang memecah belah”. (Lampiran 5, hal 2).

Sedangkan *consequences* yang digunakan Kompas guna mendukung gagasan sentralnya adalah; berupaya memberi pemahaman kepada pembaca bahwa salah satu tujuan reformasi adalah menegakkan demokrasi dan jiwa serta semangat demokrasi adalah kompromi. Hal tersebut disampaikan dalam *consequences* berikut :

“Termasuk jiwa dan semangat reformasi yang demokratis adalah kompromi...”. (Lampiran 5, Hal 3)

## **B. Republika**

### **1. Judul “Sumbangan Menkeh dalam Reformasi Hukum” (25 April 1998)**

Tajuk rencana yang dimuat oleh harian Republika pada tanggal 25 April 1998 mengupas masalah kontribusi pemikiran dalam hal supremasi hukum. Tajuk rencana berjudul ‘Sumbangan Menkeh dalam Reformasi Hukum’ ini, memberikan harapan baru pada masyarakat dalam hal kepastian hukum. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa hal yang terkait dengan masalah hukum tersebut. Harian Republika menilai, bahwa kementerian yudikatif yang baru berusia dua bulan ini memberikan harapan baru dalam penanganan ketertinggalan program pembangunan di bidang hukum. Bagi Republika, pengakuan tersebut menjadi sebuah elemen inti (*idea element*) sebuah ekspresi pemberitaan.

Peneliti meneguhkan temuan elemen inti itu dengan menunjukkan bukti bahwa Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi, berkeyakinan bahwa langkah penegakan supremasi hukum di Indonesia akan memberikan harapan dan dukungan masyarakat akan penanganan ketertinggalan di bidang hukum. Ada empat isu sentral yang dibahas dalam tajuk rencana ini, yaitu pertama, upaya penegakan hukum dianggap oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, sebagai hal yang sia-sia. Satjipto berpendapat bahwa langkah Muladi merupakan langkah menggebu yang tidak diimbangi oleh keadaan sebenarnya. Menurut Satjipto, upaya Muladi hanya bisa diwujudkan oleh orang yang memiliki semangat tinggi sehingga menurutnya, perlu ada nurani kejujuran yang belum lapuk niscaya yang akan melayani obsesi penguasa hukum untuk

memberantas kebatilan yang sudah lama mengusik pengetahuan dan kesadaran etisnya. Sebagai ilustrasi peneliti sajikan kutipan tajuk rencana berikut.

“Sebagai orang yang selama ini tak pernah langsung berkecimpug di profesi yang menggeluti peradilan, Muladi dinilai gegabah memilih prioritas kegiatan. “Belum tahu dia!” reaksi sinis itu terdengar dari bisik-bisik di kalangan profesi hakim, pengacara, jaksa, dan polisi. Bahkan koleganya, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, dengan empati menyebut semangat menggebu-gebu yang sedang diperlihatkan Menkeh ini sebagai sindrom Muladi”.

Sementara itu, isu sentral kedua adalah pemberantasan praktik kolusi dan korupsi dalam proses peradilan, yang oleh Muladi disebut dengan ‘mafia peradilan’. Hal itu tampak pada ilustrasi berikut.

“Tatkala Muladi menggunakan eufemisme, melembutkan ungkapan ‘mafia peradilan’ dengan praktek kolusi dan korupsi dalam proses peradilan, orang pun risau, jangan-jangan Menkeh sudah diingatkan oleh lingkungan kerjanya yang baru. Tetapi, ternyata langkah lanjut Muladi mencerminkan konsistensinya”.

Isu sentral ketiga adalah mengenai masalah ekonomi. Muladi akan menyiapkan upaya-upaya hukum untuk menunjang kelancaran reformasi ekonomi. Seperti paparan tajuk rencana berikut.

“Begitu juga ketika muncul peluang untuk mendukung langkah-langkah reformasi ekonomi, Muladi dengan sigap menyiapkan Perpu tentang kepailitan”.

Dan isu sentral keempat adalah peninjauan kembali UU Subversi yang secara efektif sudah banyak dipakai untuk membungkam suara oposisi, baik pada zaman Orde Baru maupun Orde Lama.

“... UU ini secara efektif banyak dipakai untuk membungkam suara oposisi, baik di zaman Orde Baru maupun Orde Lama. Bahkan, eksekusinya telah menyentuh sendi paling elementer dalam upaya bangsa Indonesia menegakkan hak-hak asasi manusia”.

Perangkat pembingkai dalam tajuk rencana ini difokuskan pada tujuan penulisan tajuk rencana yang diharapkan dapat menyempurnakan ide-ide sentral tadi. Dalam hal ini, peneliti memperoleh perangkat pembingkai tersebut dalam elemen *metaphor*, *exemplar*, *catchphrases*, *consequens*, dan *appeals to principle*. Elemen *metaphor* dalam tajuk ini ditunjukkan oleh ungkapan ‘mafia peradilan’ yang menjadi gambaran sebagai bentuk praktik kolusi dan korupsi dalam proses

peradilan. Sementara itu, *catchphrases* yang ditunjukkan oleh tajuk rencana tersebut adalah penggunaan ungkapan, “Belum tahu dia!” untuk menggambarkan bahwa Muladi belum memahami secara pasti bentuk praktik terselubung yang dilakukan oleh jajaran peradilan, seperti tampak pada ilustrasi berikut.

“Belum tahu dia!” reaksi sinis itu terdengar dari bisik-bisik di kalangan profesi hakim, pengacara, jaksa, dan polisi”.

Adapun elemen *exemplar* tajuk rencana ini, diwujudkan dalam bentuk ilustrasi berikut.

“... siapa pun yang memiliki nurani kejuangan yang belum lapuk niscaya akan melayani obsesinya untuk memberantas kebatilan yang sudah lama mengusik pengetahuan dan kesadaran etisnya, baik sebagai guru besar ilmu hukum, apalagi kini sebagai menteri kehakiman”.

Redaksi Republika pun menekankan analisis kausal atau *roots* tajuk rencana tersebut dengan menyebutkan rencana departemen kehakiman yang akan merevisi UU Subversi, seperti tampak pada ilustrasi berikut.

“Bukan hanya karena isi dan substansi UU Subversi yang sekarang ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan KUHP, tetapi karena semangat dan ruhnya telah mengundang berbagai ekses dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang beradab”.

Dalam hal ini pula, efek atau konsekuensi yang diperoleh dari tajuk rencana tersebut yaitu berupa pernyataan:

“... yaitu subordinasi hukum demi kepentingan kekuasaan. Akibatnya, penafsirannya dalam bentuk produk-produk hukum di bawahnya, menjadi banyak yang menonjolkan otot ‘penegak hukum’ daripada sebagai pengayom”.

Berikutnya adalah elemen *appeals to principle*. Elemen ini menggambarkan sikap redaksi Republika yang berharap agar dalam kepemimpinan Muladi dan timnya tetap tegar ketika harus menghadapi kekuatan yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, redaksi Republika menyatakan sikapnya sebagai berikut.

“Mudah-mudahan Muladi dan timnya tetap tegar tatkala harus berhadapan dengan kekuatan yang terlanjur melembagakan semangat untuk mensubordinasikan hukum demi sebuah kepentingan”.

## 2. Judul “Reformasi Dimulai” (4 Mei 1998)

Melalui tajuk rencana yang dimuat oleh harian *Republika*, peneliti mengetahui bahwa redaksi *Republika* memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas politik yang pada saat itu menjadi perhatian publik. Tajuk rencana yang dimuat pada tanggal 4 Mei 1998 tersebut, memberikan penekanan bahwa pernyataan Presiden Soeharto yang mengisyaratkan dilegalkannya reformasi, menjadi hal yang sangat melegakan rakyat Indonesia. Dalam sajiannya, *Republika* menjadikan pernyataan Presiden Soeharto tersebut sebagai sinyal bagi mahasiswa untuk memuluskan rencana mereka. *Republika* pun bersikap arif dalam menanggapi pernyataan itu dengan mengedepankan aspek praduganya. *Republika* mengajak masyarakat untuk tidak menyangsikan niat dan kehendak pemerintah untuk melakukan reformasi, apapun bentuknya, untuk menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Bagi *Republika*, tuntutan reformasi sudah merupakan program dan jiwa pemerintah orde baru, yang diimplementasikan melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Secara jelas, tajuk rencana yang dimuat beberapa hari menjelang berhentinya Presiden Soeharto ini, mengusung elemen inti atau *idea element* yang secara deskriptif mengilustrasikan reformasi sebagai aktivitas yang saat itu kurang populer, yang sengaja didekatkan dengan istilah pembaruan atau modernisasi. Dalam konsep pembaruan dan modernisasi itu, reformasi diidentikkan dengan penyelewengan kemurnian Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ilustrasi tajuk rencana yang mendukung gagasan isu sentral tersebut tampak pada bagian tajuk rencana berikut ini.

“Ketika itu, kata ‘reformasi’ memang tak populer digunakan. Istilah yang lebih banyak dipakai adalah ‘pembaruan’ atau ‘modernisasi’. Namun, jika kita perhatikan esensi di balik tuntutan ‘pembaruan’ atau ‘modernisasi’ itu, maknanya hampir sama dengan tuntutan reformasi yang ada sekarang ini. Inti reformasi yang dilakukan kerika itu adalah mengoreksi segala bentuk tatanan pemerintahan yang telah menyeleweng dari kemurnian Undang-Undang Dasar 1945”.

Isu sentral *kedua*, yaitu keinginan untuk melupakan paham Nasakom yang pernah digunakan oleh Bung Karno sebagai politik perimbangan kekuatan yang

memicu tumbuh subur nya paham komunis di Indonesia. Ilustrasi yang relevan dengan isu sentral ini adalah sebagai berikut.

“Dalam bidang politik, misalnya, adalah menghilangkan paham Nasakom yang telah digunakan Bung Karno sebagai politik perimbangan dalam pemerintahannya. Nasakom telah memberikan kesempatan tumbuh subur nya komunisme melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tidak senafas dengan jiwa bangsa Indonesia yang religius”.

Isu sentral *ketiga*, yaitu mengenai struktur kepartaian yang telah menciptakan pertarungan ideologi yang tidak sehat, seperti tampak pada ilustrasi berikut.

“Struktur kepartaian yang memungkinkan banyaknya jumlah partai ketika itu, ternyata telah menciptakan pertarungan ideologis yang tidak sehat. Struktur itulah yang membuat timbulnya banyak friksi di antara golongan masyarakat serta jatuh-bangunnya kabinet sepanjang sejarah Kemerdekaan Indonesia. Kehidupan politik multipartai yang tiada batas tampaknya telah membuat bangsa Indonesia hidup dalam perseteruan golongan yang tak kunjung selesai. Hasil pembangunan yang diharapkan oleh rakyat setelah lama hidup melarat, tidak kunjung datang”.

Perangkat pembingkai atau *framing devices* merupakan perangkat analisis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami ide-ide sentral tadi. Untuk mengetahuinya, peneliti menggunakan elemen-elemen berita seperti *exemplars*, *catchphrases*, dan *depictions*, yang semuanya diarahkan pada frame yang dibentuk oleh redaksi Republika.

Dalam tajuk rencana tersebut, semua elemen berita digunakan oleh Republika untuk memperkuat imajinasi pembaca, kecuali *visual images*. Elemen *visual images* tidak disertakan mengingat kelaziman sebuah tajuk rencana yang hampir tidak pernah didukung oleh elemen itu. Keinginan masyarakat untuk mereformasi struktur pemerintahan dengan mengacu pada pengalaman yang telah lampau, diungkapkan oleh Republika dalam *catchphrases* berikut.

“Selain reformasi politik, budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti praktek-praktek irasional juga dikoreksi. Kata ‘irasional’ yang kita kenal secara populer ketika itu adalah tumbuhnya praktek kultus individu kepada Bung Karno. Begitu praktek *vested interest* dalam kehidupan ekonomi yang menyebabkan kebobrokan fondasi ekonomi kita”.

Sementara itu, penekanan bahwa tajuk rencana yang disampaikan oleh Republika sangat beralasan, oleh redaksi Republika dikemas dengan menggunakan bingkai tajuk rencana melalui contoh paparan ilustratif seperti tampak pada *exemplars* berikut.

“*Rule of law* harus ditegakkan’ adalah jargon yang juga populer. Tujuannya untuk menghapuskan semua pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh pemerintahan Soekarno”.

Untuk menggambarkan atau melukiskan substansi tajuk rencana secara konotatif, redaksi Republika dalam paparan tajuk rencananya menggambarkan situasi hukum pada saat Presiden Soekarno sebagai bentuk penindasan atau pemaksaan terhadap kepentingan masyarakat Indonesia. Ilustrasi tersebut merupakan bentuk aplikatif dari elemen berita berupa *depiction* yang tersaji dalam tajuk rencana.

“Ketika itu, pelaksanaan hukum memang banyak diperkosa hanya dengan sebuah ‘surat wasiat’ dari seorang penguasa”.

Sementara itu, perangkat penalaran atau *reasoning devices* yang dipakai dalam tajuk rencana, menjadi bahan bagi media massa sebagai alasan pembenar untuk mengilustrasikan paparannya. Dalam tataran realistis, kita dapat memahami bahwa sebuah berita tidak semata-mata merupakan bungkusan gagasan, namun juga merupakan sekelompok fakta yang dipilih dan disusun sedemikian rupa untuk membingkai informasi dengan perspektif atau pandangan tertentu yang membutuhkan pembenaran. Elemen *reasoning devices* yang tergambar melalui elemen *roots* atau analisis kausal dari tajuk rencana ini, tampak pada sajian berikut.

“...karena bangsa Indonesia telah menyadari terjadinya kesalahan dalam sejarah praktek kehidupan politik dan ekonomi yang ....”

Adapun perangkat pendukung lain, yaitu berupa keengganan kita melakukan introspeksi terhadap diri sendiri, seperti pernyataan Republika berikut.

“Kalau kita berani mengoreksi kesalahan kita di masa lalu, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang?”

Sebagai penyeimbang, redaksi Republika juga menampilkan elemen *consequences* berikut.



“Dalam konteks inilah, kita menyambut dengan lega pernyataan pemerintah yang disampaikan Presiden Soeharto bahwa reformasi bisa dilakukan”.

### 3. Judul “Naiknya Harga BBM dan Tarif Listrik” (5 Mei 1998)

Tajuk rencana redaksi Republika tanggal 5 Mei 1998 menjelaskan masalah kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Redaksi Republika berpendapat bahwa kenaikan BBM dan listrik yang dilakukan secara bertahap tersebut merupakan beban berat yang harus ditanggung oleh rakyat, yang saat itu dalam kondisi ekonomi terpuruk. Sebagai surat kabar nasional, Republika mengangkat masalah tersebut sebagai ide element tajuk rencana, yang pada awalnya tidak menduga bahwa pemerintah akan memutuskan kenaikan urut nadi perekonomian masyarakat secara cepat. Ada tiga isu sentral yang diangkat dalam tajuk rencana ini, yaitu mengenai melesetnya target laba bersih minyak Pertamina sebesar Rp 289 miliar pada tahun 1997/1998 yang memaksa pemerintah menaikkan harga BBM. Republika mengungkapkannya melalui paparan berikut.

“...beban subsidi itu bisa mencapai Rp 16 triliun untuk BBM dan Rp 11 triliun untuk listrik. Sementara itu, target laba bersih minyak (LBM) Pertamina untuk tahun anggaran 1997/98 yang diharapkan mencapai Rp 289 miliar ternyata meleset akibat perkembangan situasi yang tak mendukung”.

Isu sentral kedua, yaitu mengenai kenaikan harga barang kebutuhan pokok, jauh sebelum diberlakukannya kenaikan harga BBM dan listrik. Republika menyorotinya melalui ilustrasi berikut ini.

“Namun, harga barang yang sudah lebih dulu naik bisa dipastikan akan naik lagi, akibat kenaikan tarif angkutan yang langsung pula diumumkan”.

Sebagai isu sentral ketiga, harian Republika mengangkat masalah harapan masyarakat agar pemerintah lebih cermat mempertimbangkan kenaikan harga BBM dan listrik, seperti tampak pada ilustrasi berikut.

“..., masyarakat tidak dibiarkan menerima beban kenaikan harga BBM dan listrik tanpa tahu apa yang harus dilakukan”.

Adapun perangkat pembingkai tajuk rencana ini difokuskan pada tujuan penyempurnaan ide-ide sentral tadi melalui beberapa elemen, seperti elemen *metaphor*, *exemplar*, *catchphrases*, *consequens*, dan *appeals to principle*. Elemen



*metaphor* dalam tajuk ini ditunjukkan oleh ungkapan ‘belalai krisis’ yang menggambarkan panjangnya deret kebutuhan dasar masyarakat, yang saat itu sedang mengalami kenaikan harga. Untuk lebih lengkapnya, peneliti akan mengungkapkan paparan tajuk rencana seperti berikut.

“Dengan keputusan pemerintah – yang semula diduga tidak akan dilakukan secepat ini – lengkap sudah belalai krisis yang membelit tubuh rakyat kebanyakan”.

Selanjutnya adalah elemen *catchphrases* yang ditunjukkan oleh Republika dengan menjelaskan kenaikan harga premium dari Rp 700 menjadi Rp 1.200 per liter, hanya akan diberlakukan pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Paparan singkat elemen tersebut tampak pada sajian berikut ini.

“Kenaikan harga premium dari Rp 700 menjadi Rp 1.200 per liter disebut-sebut hanya akan menimpa kelas menengah ke atas. Kelas di bawahnya tak begitu terkena dampaknya”

Republika juga mengekspresikan *roots* atau analisis kausalnya melalui pernyataan bahwa rakyat sebenarnya sudah merasakan beratnya menjalani kehidupan selama ini. Akan tetapi, pemerintah memilih jalan lain. Bagi Republika, langkah pemerintah tersebut sangat disayangkan, seperti tampak pada paparan tajuk rencana berikut.

“Meski berat, rakyat rasanya sudah tak punya pilihan lain kecuali menerima kenaikan itu. Namun, ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan pemerintah agar rakyat tak sekadar menerima dengan terpaksa.

Berikutnya adalah elemen *exemplar* yang oleh Republika digambarkan dengan kenaikan harga BBM yang perlu diiringi dengan kebijakan tentang efisiensi produksi BBM. Dalam paparannya, Republika mengungkapkan elemen *exemplar* sebagai berikut.

“Keharusan kenaikan inipun, seperti disarankan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, harus disertai pengumuman tentang efisiensi di bidang produksi BBM, angkutan minyak dari luar negeri, dan pemangkasan anggaran yang berasal dari luar sistem produksi minyak. Kesemua itu merupakan masalah mendasar penyebab tingginya biaya produksi minyak”.

Elemen *consequens* dalam tajuk rencana ini melukiskan dampak kejujuran yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya. Artinya, rakyat akan berusaha memahami argumentasi yang disampaikan oleh

pemerintah terkait dengan masalah kebijakan negara. Petikan tajuk rencananya adalah sebagai berikut.

“Sebuah keterusterangan tentu akan mengurangi kadar desas-desus yang sering mudah berkembang dan cepat diterima khalayak daripada kejelasan pemerintah”.

*Appeals to principle* atau premis dasar berupa klaim moral, dikemukakan oleh Republika sebagai berikut.

“... Di samping itu, pemerintah sendiri perlu membarengi kenaikan ini dengan langkah-langkah yang bisa menjadi katup pengaman di masyarakat. Jadi, masyarakat tidak dibiarkan menerima beban kenaikan harga BBM dan tarif listrik tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Tentunya tak seorang pun berharap kenaikan-kenaikan ini akan berdampak negatif terhadap stabilitas nasional”.

#### 4. 2. Analisis *Framing* 3 Tajuk Rencana Sesudah Reformasi Tahun 1998.

##### A. Kompas

##### 1. Judul “Menyambut Secara Kritis Maraknya Hasrat Mendirikan Partai-Partai Baru” (3 Juni 1998)

Tajuk rencana pertama yang dianalisa dalam periode sebulan sesudah reformasi berjudul “Menyambut Secara Kritis Maraknya Hasrat Mendirikan Partai-Partai Baru”. Kompas mewacanaikan maraknya berdirinya partai-partai baru merupakan salah satu buah reformasi. Sesuai dengan undang-undang kepartaian yang selama ini berlaku, untuk organisasi sosial politik hanya Partai Persatuan pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Sejak dini tampak hadirnya hasrat masyarakat untuk mendirikan partai baru. Hasrat ini sudah lama terpendam dan tidak tersalurkan.

Elemen inti tulisan (*Idea Element*). Dalam menyajikan dan membahas tentang Maraknya mendirikan partai baru saat itu, Kompas mengemukakan 4 (empat) isu sentral, yaitu *pertama*, bahwa munculnya partai baru merupakan buah reformasi Hal tersebut dikemukakan melalui teks berikut :

“.... Sejak dini tampak hadirnya hasrat masyarakat untuk mendirikan partai baru. Hasrat ini sudah lama terpendam dan tidak tersalurkan”. (Lampiran 1, hal 1)

*Kedua*, bahwa maraknya hasrat mendirikan partai adalah tafsir dari reformasi terhadap pasal 28 bahwa undang-undang yang menetapkan

kemerdekaan, berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pikiran, berfungsi justru untuk menjamin kemerdekaan dan kebebasan itu. Hal ini dikemukakan melalui teks berikut,

“Silakan mendirikan partai! Pada waktunya tentu saja, semua itu akan diatur dengan undang-undang kepartaian yang baru. Karena itu janganlah dialpakan pemikiran serta sumbangan pemikiran tentang bagaimanakah sebaiknya undang-undang kepartain baru itu. . (Lampiran 1, hal 1)

*Ketiga*, tentang mempertimbangkan dan memikirkan eksistensi partai, mau tidak mau akan membuat perbandingan dan menarik pelajaran dari pengalaman negara lain dan pengalaman kita sendiri. Hal ini disampaikan melalui teks berikut,

“Perbandingan dan penagalam negara lain bisa mempercepat proses proses penyusunan undang-undang. Perbandingan dan pengalaman itu juga memberikan masukan perihal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem dan perundangan yang berlaku di negara-negara lain. (Lampiran 1, hal. 2)

*Keempat*, bahwa dapat terbentuknya masyarakat madani, civil society, masyarakat berbudaya demokrasi, di mana para pemimpin anggota dan pengikut partai-partai yang berbeda-beda bahkan berbenturan dalam arena politik , tetap bisa hidup dan bekerja sama secara bersahabat. Hal ini disampaikan melalui teks,

“ Kini semakin banyak kaum berpendidikan dan mengetahui paham demikrasi, sementara itu adalah kenyataan juga bahwa terlalu lama sejak demokrasi dipimpin kita tidak lagi terbiasa hidup dan berpolitik dalam suasana, semangat serta budaya demokrasi. Kita lebih terbiasa hidup dan dibesarkan dalam suasana rekayasa. (Lampiran 1, hal. 2)

Perangkat pembingkai (*Framing Devices*). Perangkat pembingkai difokuskan pada tujuan untuk dapat “menangkap” ide-ide sentral di atas, melalui elemen-elemen *metaphor*, *exemplars*, *catchphrases* dan *depictions*, yang semuanya diarahkan pada *frame* yang dibentuk oleh redaksi Kompas. Semua elemen dalam perangkat pembingkai digunakan, kecuali *visual images*. Perlunya komitmen dalam menyambut secara kritis maraknya hasrat mendirikan partai-partai baru, diungkapkan dalam *catchphrases* berikut:

“Munculnya partai baru merupakan buah reformasi, sesuai dengan undang-undang kepartaian yang selama ini berlaku.” (Lampiran 1, hal 2)

Untuk menguatkan bingkai melalui contoh dalam mengilustrasikan bahwa maraknya hasrat mendirikan partai-partai baru, dinyatakan dalam *exemplaars* berikut :

“Hasrat yang lama terpendam itu kini memperoleh kesempatan. Reformasi memberikan tafsir otentik kepada pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” (Lampiran 1, hal 2).

Redaksi Kompas menghimbau agar pemerintah bersikap konsisten terhadap reformasi.. Hal ini dikemukakan dengan *depiction* berikut :

“.. agar kita menyadari pekerjaan rumah yang harus kita laksanakan agar tujuan reformasi menyeluruh terlaksana. Tujuan reformasi menyeluruh itu dalam bidang politik adalah berlakunya demokrasi yang dapat menghasilkan pemerintahan yang dapat melaksanakan tugasnya.” (Lampiran 1, hal 3).

Perjuangan untuk mendirikan partai-partai baru sebagai hasil dari reformasi harus didukung secara konsisten oleh segenap elemen masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut diungkapkan melalui *metaphor* berikut :

“Munculnya partai-partai baru merupakan salah satu buah reformasi. Sesuai dengan undang-undang kepartaian yang selama ini berlaku. ....(Lampiran 1, hal 2)

Perangkat penalaran (*Reasoning Devices*) yang dipakai sebagai alasan pembenar. Sebuah berita tidak semata-mata sebuah gagasan, tetapi juga merupakan sekelompok fakta yang dipilih dan disusun sedemikian rupa untuk meringkai informasi dengan perspektif/pandangan tertentu yang membutuhkan pembenaran. *Roots* atau analisis kausal dari problem besar bangsa pada saat itu, ditampilkan dalam teks berikut,

“... Silakan mendirikan partai! Pada waktunya tentu saja, semua itu akan diatur dengan undang-undang kepartaian yang baru..... (Lampiran 1, hal 2).

Perangkat pendukung lain berupa klaim moral, disajikan dengan cukup hati-hati sehingga tersirat “proses pendewasaan dalam berdemokrasi”. Hal ini terlihat dalam *appeals to principle* pada teks berikut :

“ ... memang dalam tahun lima puluhan itu ibaratnya kita barulah lulusan SD dalam berdemokrasi. Kini kita sudah lulusan universitas.... Mestinya akan lebih mampu..”(Lampiran 1, hal. 2)

Konsekuensi logis dari komitmen bangsa untuk memiliki kesadaran dalam berpolitik adalah untuk melaksanakan demokrasi Pancasila secara murni, sesuai dengan substansi dan semangatnya. *Consequences* tersebut ditampilkan Kompas dalam teks berikut :

“..... Kita sambut dengan gegap gempita antusiasme mendirikan partai-partai baru. Antusiasme itu agar juga disertai pemikiran, pertimbangan serta perhitungan yang sedalam-dalamnya tentang tujuan partai politik, latar belakang serta implikasi implikasi yang menyertainya. Mendirikan partai akhirnya membuat komitmen untuk bekerja bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Diperlukan visi, komitmen, energi dan barangkali juga biaya.” (Lampiran 1, hal. 3).

## 2. Judul “Jalan Reformasi itu Jalan Kemanusiaan, Keadilan, Hukum dan Konstitusi”. (5 Juni 1998).

Momentum reformasi adalah suatu langkah maju dalam iklim demokrasi di Indonesia, untuk itu reformasi tidak boleh berhenti di tengah jalan, reformasi harus dipelihara, dan memelihara reformasi tidaklah sama dengan membiarkan kekuatan, proses dan arah reformasi berjalan tanpa kendali Hal ini disebabkan karena jalan yang ditempuh reformasi adalah jalan kemanusiaan, jalan keadilan, jalan hukum dan jalan konstitusional.

Dalam tajuk rencana ini Kompas membingkai jalan reformasi sebagai melepaskan semua kekuatan sosial yang selama ini tertekan dan terbelenggu. Hal mana dapat mengarus kemana-mana jika tidak disertai kesadaran tentang jalan yang disepakati untuk ditempuh.

Elemen Inti Tulisan (*Idea Elements*). Dalam membingkai Jalan Reformasi, Kompas mengemukakan 3 (tiga) ide sentral, yaitu : *Pertama*, bahwa segala sesuatu yang menyangkut misalnya KKN, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus dikikis sampai tuntas. Hal tersebut dinyatakan dalam teks berikut,

“ ... Segala ihwal yang menyangkut misalnya KKN, Korupsi, Kolusi, Nepotisme harus dikikis habis dan di sana-sini, manakala perlu, diminta pertanggungjawabannya. Tetapi lagi-lagi jalan yang ditempuh adalah jalan kemanusiaan, keadilan dan hukum. (Lampiran 2, hal 1)

*Kedua*, bahwa dalam demokrasi yang dibawa oleh reformasi, ikut tampil kesadaran, penajaman dan persaingan berbagai kepentingan. Hal itu dapat dibaca dalam teks berikut :

“Yang perlu kita sikapi, agar persaingan beragam kepentingan itu tidak mengalahkan kepentingan kita bersama. Agar perbedaan-perbedaan itu justru melatih dan memperkuat komitmen kita untuk tetap dapat bekerja sama serta tetap meletakkan loyalitas kita kepada kepentingan bersama itu di atas loyalitas kita kepada kepentingan masing-masing. (lampiran 2, hal 2).

*Ketiga*, Kompas tetap berharap bahwa reformasi itu tetap mempunyai tujuan, bukanlah sekadar pergantian pimpinan saja. Harapan tersebut disampaikan melalui teks berikut :

“Tujuan reformasi bukan sekadar pergantian pimpinan dan personalia elite pada pemerintahan maupun pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tujuan reformasi adalah membangun paham, budaya serta infrastruktur demokrasi.”. (Lampiran 2, hal. 3)

Perangkat pembingkai (*Framing Devices*). Dalam pandangan Gamson, *framing* dipahami sebagai seperangkat gagasan ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. Ide sentral itu perlu dibingkai oleh perangkat wacana agar antara satu bagian dengan bagian lain saling kohesif (Eriyanto, 2002,)

Untuk menguatkan bingkai ide sentral pertama, redaksi Kompas menggunakan *metaphor* yang mengandaikan jalan reformasi seolah-olah “ibarat air bah”. Hal tersebut disampaikan dalam teks berikut :

“Ibarat air bah, dapat mengalir ke mana-mana jika tidak disertai kesadaran tentang jalan yang disepakati untuk ditempuh. ? (Lampiran 2, hal. 1)

Masih untuk menguatkan bingkai di atas, Kompas memberi label atau menganggap melalui reformasi dapat diusut berbagai korupsi. Hal itu dinyatakan melalui *depiction* dalam teks berikut :

“Segala hal ihwal yang menyangkut misalnya KKN, Korupsi Kolusi, nepotisme harus dikikis dan di sana-sini, manakala perlu diminta pertanggungjawabannya.”. (Lampiran 2, hal. 1)

Ide sentral kedua didukung oleh Kompas melalui pendapatnya tersebut dengan *catchphrases* berikut :

“Masuk akal dan sah-sah saja, manakala justru dengan merebaknya keterbukaan dan demokrasi yang dibawa oleh reformasi, ikut tampil kesadaran, penajaman dan persaingan berbagai kepentingan.”. (Lampiran 2, hal 2)



Sedangkan ide sentral ketiga diberi perangkat pembingkai berwacana teori (*exemplaar*) berikut :

“Tanpa paham, budaya dan infrastruktur demokratis, tidaklah mungkin membangun institusi-institusi, proses, serta mekanisme yang secara substansial dan secara operasional, demokratis. Tujuan reformasi bukan sekedar pergantian pimpinan dan personalia elit pada pemerintahan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan.” (Lampiran 2, hal 3).

Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*). Ketika reformasi telah berjalan tidaklah terbatas pada pergantian pemeran dan peranan,. Pandangan ini oleh Kompas dikuatkan dengan *roots* berikut :

“...Reformasi bertujuan membangun pemerintahan yang bersih dari KKN, sekaligus pemerintahan yang mampu menyelenggarakan perbaikan ekonomi.”(Lampiran 2, hal 1)

Sedangkan ide sentral kedua dikuatkan dengan mengemukakan *consequences* berikut :

“... inilah ujian yang dihadapi oleh gerakan reformaasi, apakah reformasi menyeluruh secara kualitatif itu akan terwujud. Manakala komitmen dan kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan masing-masing.” (lampiran 2, hal 2)

Premis dasar yang merupakan *appeals to principles* atau klaim moral untuk mendukung bingkai dari ide sentral ketiga diungkapkan Kompas melalui teks berikut :

“ Adalah adil dan mendidik, manakala kita minta pertanggungjawaban dari masa lalu. Namun juga pertanggungjawaban itu agar dilakukan lewat jalan kemanusiaan, keadilan dan hukum”. (Lampiran 2, hal 3).

### **3. Judul “Alangkah Berjubelnya Pekerjaan Rumah Yang Mendesak Diselesaikan “. (12 Juni 1998).**

Sejak terjadinya reformasi, setiap kali menyaksikan dan merasakan desak-mendesaknya persoalan yang harus diselesaikan, Kompas menurunkan Tajuk Rencana berjudul “Alangkah Berjubelnya Pekerjaan Rumah Yang Mendesak Diselesaikan”, yang pada dasarnya membingkai 4 (empat) gagasan pokok yang saling berkaitan, yaitu;



*Pertama*, munculnya kembali perihal kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998,. Hal tersebut dituangkan dalam teks berikut,

“Bagaimana bisa dijelaskan, mengapa setelah hampir sebulan, sosok kerusuhan itu muncul dan minta perhatian secara lebih tenang, tetapi juga secara lebih jujur dan menggugat. (Lampiran 3, hal.1).

*Kedua*, ada yang menjadi latar belakang terjadinya kerusuhan tersebut, dimana ada beberapa penyebab kenapa terjadi kerusuhan Mei, diantaranya adalah ada gap sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Hal tersebut tertera dalam teks berikut

” Kita sependapat dengan analisis komnas HAM, yang menyatakan kerusuhan itu memang ada latar belakangnya, Latar belakang itu diantaranya, praktek pembangunan ekonomi yang karena pertimbangan korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan peluang, preferensi serta fasilitas lebih kepada orang-orang dan kelompok tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan serta menyuburkan.” (Lampiran 3, hal.1).

*Ketiga*, untuk melakukan reformasi pembangunan ekonomi, diperlukan pemerintahan bersih dan berwibawa adil dan efektif. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu lebih terjamin terselenggarakannya sistem demokrasi yang membuta kontrol dan koreksi efektif. Gagasan ini dinyatakan melalui teks berikut,

“... Ke sanalah gerakan reformasi menuju. Ada agenda ekonomi, ada agenda politik, ada agenda ekonomi, agenda sosial budaya, agenda hukum. Agenda hukum yang memberikan jaminan dan kepastian tentang rasa keadilan dan perlindungan warga negara amatlah prinsipil.” (Lampiran 3, hal.2).

*Keempat*, untuk melakukan pengusutan akan tindakan hukum yang kredibel juga berpengaruh positif terhadap reformasi politik yang sedang diusahakan bersama. Agenda reformasi politik itu termasuk menegakkan dan melaksanakan prinsip dan moralitas politik yang mengharamkan tujuan menghalalkan cara. Gagasan ini dinyatakan melalui teks berikut,

“... Prinsip dan moralitas politik itulah yang selama ini dipraktekkan, mula-mula dalam kadar, skala dan kualitas yang masih bisa ditenggang dan dianggap patut. Lambat laun dan akhirnya dalam skala, kadar serta kualitas yang sama sekali tanpa kendali dan kontrol rakyat”. (Lampiran 3, hal.2).

Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*). Empat ide sentral di atas di *framing* oleh redaksi Kompas dengan *metaphors*, *catchphrases*, *exemplar* dan

*depiction*. Untuk menguatkan bingkai ide sentral yang pertama digunakan *catchphrases* berikut,

“Setiap kali menyaksikan dan merasakan desak-mendesaknya persoalan yang harus diselesaikan.” (Lampiran 3, hal.1).

Bingkai ide sentral kedua ditonjolkan dengan menggunakan pengandaian (*metaphor*), berikut:

“Pola dan anatomi kerusakan seperti yang kita dengar dan kita baca memang memberikan kerusakan seperti yang kita dengar dan kita baca memang memberikan kesan kuat perihal adanya pemicu yang terorganisir”. (Lampiran 3, hal.2).

Ide sentral ketiga, ditunjukkan oleh Kompas dengan memberi label (*depiction*) tentang pembangunan ekonomi yang dinyatakan dalam teks tersebut,

“... Reformasi pembangunan ekonomi diperlukan pemerintahan bersih, berwibawa, adil dan efektif. ....”. (Lampiran 3, hal.2).

Sedangkan ide sentral tentang perlu banyaknya permasalahan yang mendesak yang segera harus diselesaikan, Kompas memberi contoh perlu adanya reformasi pembangunan ekonomi yang mencakup beberapa agenda, melalui *exemplaar* berikut,

“Pengusutan, penjelasan serta tindakan hukum yang dapat dipercaya terhadap kasus itu, pengaruhnya jauh dan mencakup....”. (Lampiran 3, hal.2).

Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*). Perangkat penalaran sebagai pembenar gagasan yang ditampilkan, digunakan oleh redaksi Kompas melalui analisis kausal atau sebab akibat (*roots*), premis dasar atau klaim moral (*appeals to principle*) dan konsekuensi yang didapat dari bingkai (*consequences*) yang terlihat jelas dalam teks-teks yang ditampilkan.

Sebagai pendukung ide sentral pertama yaitu digunakan *consequences* sebagaimana tertera dalam teks berikut,

“Memang betitulah logika kejadian besar yang emosional, dramatis dan tragis. apalagi jika peristiwa itu berlangsung di tengah-tengah gegap gempitanya kejadian-kejadian lian...”. (Lampiran 3-Hal.1).

Sebagai pendukung ide sentral kedua, digunakan *appeals to principle* atau klaim moral berikut,

“Inilah pekerjaan rumah yang minta ditangani: mengungkap bagaimana duduk perkara meledak dan meluasnya kerusuhan 13 dan 14 Mei itu....”(Lampiran 3-hal.1).

*Appeals to Principle* atau klaim moral di atas sekaligus juga merupakan pembenar atas gagasan ke-empat yaitu, gagasan dan pesan moral redaksi Kompas kepada semua elemen bangsa terutama para pemimpin pemerintah untuk mengupayakan titik temu bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan negara.

Sedangkan sebagian pendukung ide sentral ketiga, hal itu ditampilkan melalui *roots* berikut;

“Termasuk pengaruh untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang akan ikut memulihkan kepercayaan kepada pemerintah, baik dari dalam maupun dari luar negeri”. (Lampiran 3, hal.2).

Sedangkan sebagian pendukung ide sentral keempat, hal itu ditampilkan melalui *roots* berikut;

“.... dalam pemerintahahn yang sangat kuat dan sangat meluas dan mendalam semangat, suasan serta praktek KKN-nya, ekonomi pasar menjadi tidak adil dan kejam. Kini kita sedang tertimpa buahnya.”. (Lampiran 3, hal.3).

## **B. Republika**

### **1. Judul ”Menuju Indonesia Baru” (22 Mei 1998)**

Tajuk rencana redaksi Republika tanggal 22 Mei 1998 ini terasa istimewa karena redaksi Republika mengekspresikan peristiwa mundurnya Presiden Soeharto sebagai momen bersejarah yang dramatis dan takterduga. Dalam idea statementnya, Republika menggambarkan suasana politik yang terjadi sehari sebelum tajuk rencana ini dibuat merupakan peristiwa yang mengagetkan. Berikut petikannya.

“Dramatis dan tak terduga. Itulah suasana perkembangan politik yang terjadi kemarin. Melalui sebuah upacara yang sangat sederhana, Haji

Muhammad Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden “.

Selain itu, tajuk rencana ini juga mengupas tiga isu sentral, yaitu pertama, semakin kuatnya tuntutan agar Presiden Soeharto berhenti tanpa mengabaikan aspek ketatanegaraan. Secara singkat, peneliti menggarisbawahi paparan tajuk rencana seperti berikut.

“Krisis yang makin rumit dan berat, ketegangan politik yang makin pekat, dan kiat kentalnya tuntutan agar Pak Harto turun tampaknya membuat keputusan penting itu harus diambil dengan cepat tanpa mengabaikan aspek ketatanegaraan”.

Isu sentral kedua, yaitu tetap perlunya menghargai jasa Presiden Soeharto meskipun sudah tidak menjabat sebagai presiden. Petikannya seperti ini.

“...dan dengan segenap keberhasilannya. Sekaligus pula sebuah era dengan ketidaksempurnaannya, bangsa Indonesia tak akan bisa melupakan jasa besar Pak Harto”.

Isu sentral ketiga, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti, akan ada perjuangan yang lebih berat menghadang masyarakat Indonesia. Sebagai ilustrasi, peneliti akan menyajikan petikan berikut ini.

“...telah menghadang perjuangan baru yang jauh lebih berat dan panjang. Belitan krisis yang begitu berat, bahkan telah mencapai tahapan krisis moral yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat...”.

Adapun perangkat pembingkai tajuk rencana ini difokuskan pada tujuan penyempurnaan ide-ide sentral tadi melalui beberapa elemen, seperti elemen *metaphor*, *exemplar*, *catchphrases*, *consequens*, dan *appeals to principle*. Elemen *metaphor* dalam tajuk ini ditunjukkan oleh ungkapan ‘meledak’ untuk menggambarkan situasi yang tidak dikehendaki. Untuk lebih lengkapnya, peneliti akan mengungkapkan paparan tajuk rencana seperti berikut.

“... Sekaligus pula sebuah era dengan ketidaksempurnaannya yang kemudian meledak menjadi krisis dalam setahun terakhir”.

Selanjutnya adalah elemen *catchphrases* yang ditunjukkan oleh Republika dengan menjelaskan komitmen Presiden Habibie yang akan setia pada aspirasi rakyat Indonesia. Paparan singkat elemen tersebut tampak pada sajian berikut ini.

“Presiden BJ Habibie telah menegaskan komitmennya dalam pidato di TV tadi malam untuk setia pada aspirasi rakyat dan mau menerima kritik”.

Republika juga mengekspresikan *roots* atau analisis kausalnya melalui pernyataan bahwa lembar sejarah baru saja dilewati masyarakat Indonesia, seperti tampak pada paparan tajuk rencana berikut.

“Lembar sejarah yang baru saja kita lewati telah memberi sebuah hikmah yang sangat penting: Betapa mahalny harga yang harus ditanggung bila aspirasi rakyat terabaikan”.

Berikutnya adalah elemen *appeals to principle* yang oleh Republika digambarkan dengan mengingatkan komponen negara bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam paparannya, Republika mengungkapkan elemen *appeals to principle* sebagai berikut.

“Karena itu, janganlah sekali-kali kita mengulang kesalahan yang sama. *Vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan)”.

## 2. Judul “Kita Perlu Persatuan” (25 Mei 1998)

Tajuk rencana redaksi Republika kali ini mengangkat tema yang bertujuan memberikan semangat persatuan pada seluruh komponen bangsa. Idea element yang terkandung dalam tajuk rencana ini adalah pembentukan kabinet reformasi pembangunan, di bawah kendali Presiden BJ Habibie.

Isu sentral yang dibahas dalam tajuk rencana ini adalah mengenai sah tidaknya penyerahan kekuasaan dari presiden lama kepada presiden baru. Pernyataan sikap Republika tampak pada paparan berikut.

“... masyarakat yang memperdebatkan sah tidaknya penyerahan kekuasaan dari presiden lama ke presiden baru, baik dalam tata cara, maupun yang menyangkut permasalahan esensial hukum ketatanegaraan”.

Isu sentral kedua, yaitu mengenai perdebatan pemerintahan transisional. Dalam pandangannya, Republika menyatakan sebagai berikut.

“...pemerintah transisional atau sementara, karena itu pemerintah harus segera melaksanakan pemilihan umum”.

Adapun isu sentral ketiga adalah mengenai perlunya melakukan Sidang Istimewa MPR, untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Perangkat pembedah tajuk rencana ini difokuskan pada tujuan penyempurnaan ide-ide sentral tadi melalui beberapa elemen, seperti elemen *exemplar*, *catchphrases*, *consequens*, dan *appeals to principle*. Elemen *exemplar* dalam tajuk ini

ditunjukkan oleh pernyataan Republika yang mengingatkan masyarakat untuk tidak terkecoh dengan gerakan mahasiswa yang murni memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk lebih lengkapnya, peneliti akan mengungkapkan paparan tajuk rencana seperti berikut.

“Karena gerakan mahasiswa, seperti yang dikatakan oleh Ichlasul Amal, Rektor Universitas Gadjah Mada, tidak mempunyai kepentingan dengan *person*”.

Republika juga mengekspresikan *roots* atau analisis kausalnya melalui pernyataan bahwa segala bentuk pertentangan primordial dan keraguan harus dihilangkan, seperti tampak pada paparan tajuk rencana berikut.

“...pertentangan primordial dan keraguan harus dihilangkan. Kini saatnya diperlukan kerja sama menciptakan ketentraman sebagai kondisi utama untuk bekerja dengan tenang mengatasi krisis ini”.

Berikutnya adalah elemen *appeals to principle* yang oleh Republika digambarkan dengan mengingatkan pentingnya persatuan bagi kepentingan rakyat Indonesia. Dalam paparannya, Republika mengungkapkan elemen *appeals to principle* sebagai berikut.

“Dan hal itu bisa terwujud, jika kita semua masih mengutamakan semangat nasionalisme dan patriotisme mengatasi semangat dan kepentingan kelompok”.

### 3. Judul “Persoalan Rakyat Saat Ini” (28 Mei 1998)

Salah satu ilustrasi yang disajikan dalam analisis penelitian ini, yaitu tajuk rencana yang dimuat oleh harian umum Republika setelah peristiwa berhentinya jabatan Presiden Soeharto pada tanggal 28 Mei 1998. Subtansi tajuk rencana yang disampaikan dalam harian tersebut, yaitu mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh pengampu jabatan presiden yang baru, yaitu BJ Habibie. Dalam pembahasannya, Republika menyoroti motivasi yang mendasari langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak yang ingin menyelamatkan diri dari tuntutan reformasi. Pihak-pihak tersebut adalah kelompok masyarakat yang mengambil posisi sesuai dengan kepentingannya sendiri. Namun, proses penyelamatan diri tersebut ditengarai telah meninggalkan kepentingan nyata rakyat Indonesia, yang saat itu sedang membutuhkan dukungan moril dan materiil.



Elemen inti atau *idea element* tajuk rencana ini adalah paparan deskriptif mengenai kebutuhan mendesak yang diinginkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ada 3 isu sentral yang disampaikan oleh Republika terkait dengan tajuk rencana tersebut. Isu sentral *pertama* tersebut adalah tingginya harga kebutuhan pokok atau sembako, yang dirasakan sangat memberatkan masyarakat. Ilustrasi tajuk rencana yang mendukung gagasan isu sentral tersebut tampak pada bagian tajuk rencana berikut ini.

“Persoalan nyata itu adalah bahwa mereka yang sudah miskin menjadi tambah miskin, karena harga kebutuhan pokok sehari-hari yang melonjak. Ketersediaan dan usaha mereka untuk mengekang konsumsi masih sering harus dihadang oleh kelangkaan pasokan barang kebutuhan, seperti susu, minyak goreng, sayur-sayuran, telur, daging, dan buah-buahan”. (lampiran 2, hlm. 6).

Isu sentral *kedua*, yaitu adanya tuntutan sebagian besar masyarakat yang ingin memulihkan roda perekonomian sebagai target utama setelah reformasi. Artinya, dengan pulihnya masalah ekonomi yang dirasa memberatkan masyarakat, seperti isu sentral pertama, akan lebih mudah bagi bangsa Indonesia dalam memulihkan semua kondisi yang ada akibat kerusakan sebelum berhentinya Presiden Soeharto. Adapun ilustrasi yang relevan dengan isu sentral ini adalah sebagai berikut.

“Karena itu, kita menyambut gembira bahwa pemerintah maupun sebagian terbesar masyarakat yang gencar menuntut reformasi sama-sama berpendapat bahwa pada saat ini hendaknya prioritas utama tindakan darurat adalah memulihkan roda perekonomian rakyat kecil. Lebih utama lagi, yang berkaitan dengan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok sehari-hari rakyat dengan harga yang terjangkau”.

Isu sentral *ketiga*, yaitu adanya bantuan dana dari IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sebagai bukti, berikut disajikan paparan yang disajikan oleh harian Republika melalui tajuk rencananya.

“Karena itu, untuk memulihkan roda ekonomi, di samping langkah-langkah tegas mengatasi produksi, distribusi, dan impor bahan baku, tidak kurang pentingnya pemerintah mengambil langkah politik guna memulihkan kepercayaan masyarakat, pasar, dan dunia internasional – khususnya badan donor seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Segala tindakan daruratnya harus transparan, untuk menyingkirkan macam-macam dugaan adanya sisa-sisa budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme –



termasuk melindungi kepentingan anak-anak dan keluarga bekas Presiden Soeharto”.

Perangkat pembingkai atau *framing devices* ditekankan untuk memudahkan pembaca dapat memahami ide-ide sentral tadi. Adapun alat untuk mengetahuinya, yaitu dengan menggunakan elemen-elemen berita seperti *exemplars*, *catchphrases*, dan *depictions*, yang semuanya diarahkan pada frame yang dibentuk oleh redaksi Republika. Dalam tajuk rencana tersebut, semua elemen berita digunakan oleh Republika untuk memperkuat imajinasi pembaca, kecuali *visual images*. Elemen *visual images* tidak disertakan mengingat kelaziman sebuah tajuk rencana yang hampir tidak pernah didukung oleh elemen itu. Perlunya komitmen dan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program-program reformasi ekonomi, diungkapkan dalam *catchphrases* berikut.

“Langkah-langkah darurat yang dijanjikan diambil pemerintah, sebagaimana diumumkan oleh beberapa menteri sesuai sidang kabinet, membesarkan hati. Tampak telah ada *sense of crisis* secara merata di antara semua anggota kabinet”.

Untuk memberikan penekanan bahwa tajuk rencana yang disampaikan oleh Republika beralasan, redaksi mengemas bingkai tajuk rencananya melalui contoh paparan ilustratif yang diinginkan oleh masyarakat seperti tampak pada *exemplars* berikut.

“Permohonan yang diajukan oleh masyarakat bukan hanya bantuan modal dan rehabilitasi tempat usaha yang telah musnah terbakar, tetapi juga kelancaran pasokan barang dagangan dan stabilitas harganya, agar lebih memudahkan mereka melakukan kalkulasi harga bagi konsumennya”.

Di samping itu, untuk menggambarkan atau melukiskan substansi tajuk rencana secara konotatif, redaksi Republika dalam paparan tajuk rencananya menggambarkan situasi perekonomian dan keuangan di Indonesia yang sangat mencekam, seolah-olah menakutkan dan tidak mungkin bisa dihindari. Penggambaran tersebut merupakan bentuk aplikatif dari elemen berita berupa *depiction* yang tersaji dalam tajuk rencana. Hal itu tampak pada pernyataan berikut.

“Sebaliknya, dalam situasi perekonomian rakyat dan keuangan pemerintah yang demikian mencekam, sungguh sangat tak bermoral kalau masih ada pihak-pihak yang mengeksploitasi kegawatan keadaan untuk tujuan politik jangka pendek”.

Sementara itu, perangkat penalaran atau *reasoning devices* yang dipakai dalam tajuk rencana, menjadi senjata bagi media massa sebagai alasan pembenar untuk mengilustrasikan paparannya. Secara nyata kita dapat memahami bahwa sebuah berita tidak semata-mata merupakan bungkusan gagasan, namun juga merupakan sekelompok fakta yang dipilih dan disusun sedemikian rupa untuk membingkai informasi dengan perspektif atau pandangan tertentu yang membutuhkan pembenaran. Elemen *reasoning devices* yang tergambar melalui elemen *roots* atau analisis kausal dari tajuk rencana ini, tampak pada sajian berikut.

“... karena kebutuhan pokok sehari-hari yang melonjak. Ketersediaan dan usaha mereka untuk mengekang konsumsi masih sering harus dihadang oleh kelangkaan...”

Adapun perangkat pendukung lain, yaitu berupa pernyataan redaksi Republika yang secara tersirat ‘memperbolehkan’ Hubert Neiss, selaku direktur IMF, untuk menganalisis ada tidaknya kepentingan keluarga Presiden Soeharto pascareformasi. Pernyataan redaksi Republika tersebut mengiringi elemen *appeals to principle* pada teks berikut.

“Mudah-mudahan Neiss mempunyai pandangan yang sama dengan rakyat Indonesia. Dengan berakhirnya era pemerintahan Soeharto, hambatan utama langkah reformasi sudah berhasil disingkirkan. Sudah barang tentu sah buat Neiss untuk mencari tahu apa benar era pemerintahan Soeharto dan kepentingan keluarganya sudah benar-benar berakhir”.

Sebagai penyeimbang, redaksi Republika juga mengingatkan pernyataan Presiden Soeharto sebelum mengakhiri masa jabatannya, yang dalam penelitian ini, pernyataan tersebut merupakan elemen *consequences* seperti tampak pada pernyataan berikut.

“Bukankah Soeharto sendiri sebelumnya pernah mengisyaratkan, setelah tidak menjadi presiden, ia ingin menjadi penasihat pada pemerintahan sesudahnya?”.

Dari hasil analisis terhadap 12 artikel tajuk rencana pada surat kabar Kompas dan Republika maka peneliti membuat 4 buah *frame* yang masing-masing menggambarkan kecenderungan isi tajuk rencana untuk masing-masing surat kabar, baik pada waktu sebelum dan sesudah reformasi untuk masing.

**"Komitmen Reformasi Ekonomi Dilaksanakan Konsisten dan Kontekstual"  
(Kompas, sebelum Reformasi)**

<p><b>Frame (Media Package)</b></p> <p>Pemerintah haruslah memiliki komitmen dan konsistensi yang kuat dalam melaksanakan program-program reformasi ekonomi dan harus dilaksanakan secara kontekstual, karena masalah perekonomian tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan hal-hal lain terutama penegakan hukum.</p>	
<p><b>Framing Devices (Perangkat Framing)</b></p> <p>Berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat ini antara lain, pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar dan metafora tertentu.</p>	<p><b>Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)</b></p> <p>Berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Artinya ada dasar pembenar dan penalaran alasan tertentu sehingga membuat gagasan yang disampaikan media atau seseorang tampak benar, alamiah, dan wajar.</p>
<p><b>Metaphor</b></p> <p>Memang berat dan pahit, dan tetap makan waktu, tetapi itulah jalan yang telah menjadi kesepakatan.</p>	<p><b>Roots</b></p> <p>"... sebab serta latar belakang itu tidak terbatas hanya pada bidang moneter dan ekonomi, tetapi yang juga bertalian dengan efektifitasnya isyarat-isyarat dini, kontrol, koreksi dan pertanggungjawaban.</p>
<p><b>Catchphrases</b></p> <p>Itulah syarat pokok, melaksanakan program reformasi ekonomi secara konsisten sesuai dengan kesepakatan dan komitmen</p>	<p><b>Appeals to principle</b></p> <p>Konteks itu sangat melibatkan kehendak untuk mengakhiri atau membatasi pada ukuran kepatutan segala sesuatu yang terumus dalam formula kolusi, korupsi, nepotisme, monopoli</p>
<p><b>Exemplaar</b></p> <p>Sangatlah kuat bahkan <i>demanding</i>, mendesak atau menuntut, konteks reformasi ekonomi itu dengan koreksi, perbaikan, transparansi, keadilan dan rasa keadilan. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan .....kini ada desakan agar yang menyalahgunakan sehingga bank bermasalah harus diminta pertanggungjawaban secara hukum.</p>	<p><b>Consequences</b></p> <p>Dituntut agar tidak lagi memperlakukan pelaksanaan demokrasi Pancasila lebih dari segi dan format sekadar basa basi, sekedar memenuhi persyaratan peraturan dan hukum menurut aksaranya, bukan menurut substansi serta semangatnya</p>

**"Menyambut Secara Kritis Maraknya Hasrat Mendirikan Partai-Partai Baru"**  
(Kompas, sesudah Reformasi)

<b>Frame (Media Package)</b> Munculnya partai partai baru merupakan salah satu buah reformasi, sesuai dengan undang-undang kepartaian yang selama ini berlaku, organisasi sosialisasi politik selama ini hanyalah Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Sejak dinia tampak hadirnya hasrat masyarakat untuk mendirikan partai baru. Hasrat itu lama terpendam dan tidak tersalurkan..	
<b>Framing Devices (Perangkat Framing)</b> Berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat ini antara lain, pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar dan metafora tertentu	<b>Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)</b> Berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Artinya ada dasar pembenar dan penalaran alasan tertentu sehingga membuat gagasan yang disampaikan media atau seseorang tampak benar, alamiah, dan wajar.
<b>Methapor</b> Janganlah dialpakan pemikiran serta sumbangan pemikiran tentang bagaimanakah senbaiknya undang-undang kepartaian baru..	<b>Roots</b> "... Mereka yang begitu mengagumkan semangat dan komitmennya pagi-pagi sudah mendirikan partai baru, agar sekaligus juga memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan undang-undang kepartaian secara berbagai kaitan dan pengangkutan.
<b>Catchphrases</b> Mempertimbangkan dan memikirkan eksistensi partai, mau tidak mau kita akan membuat perbandingan dan menarik pelajaran dari pengalaman negara lain dan pengalaman diri kita sendiri.	<b>Appeals to principle</b> Perbandingan dan pengalamam negara lain bisa mempercepat proses penyusunan undang-undang. Pertandingan dan pengalaman itu juga memberi masukan perihal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem perundangang yang berlaku di negara lain.
<b>Exemplaar</b> Apa yang kini diistilahkan dengan masyarakat madani, cecil siciety, masyarakat yang berbudaya, demokrasi, diman para pemimpin anggota dan pengikut partai-partai yang berbeda-beda bahkan berbentiran dalam arena politik, tetap bisa hidup dan bekerja sama secara bersahabat.	<b>Consequences</b> ...dituntut agar kita menyadari pekerjaan rumah yang harus kita laksanakan agar tujuan reformasi menyeluruh terlaksana. Tujuan reformasi menyeluruh itu dalam bidang politik adalah berlakunya demokrasi yang dapat menghasilkan pemerintahan yang dapat melaksanakan tugasnya.

**“PERSOALAN RAKYAT SAAT INI”**  
(Republika, Sebelum Reformasi)

<b>Frame (Media Package)</b> Langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh pengampu jabatan presiden yang baru, yaitu BJ Habibie.	
<b>Framing Devices (Perangkat Framing)</b> Kebutuhan mendesak yang diinginkan oleh sebagian masyarakat Indonesia	<b>Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)</b> Sebaliknya, dalam situasi perekonomian rakyat dan keuangan pemerintah yang demikian mencekam, sungguh sangat tak bermoral kalau masih ada pihak-pihak yang mengeksploitasi kegawatan keadaan untuk tujuan politik jangka pendek.
<b>Methapor</b> -	<b>Roots</b> “.... karena kebutuhan pokok sehari-hari yang melonjak. Ketersediaan dan usaha mereka untuk mengekang konsumsi masih sering harus dihadang oleh kelangkaan...”
<b>Catchphrases</b> Langkah-langkah darurat yang dijanjikan diambil pemerintah, sebagaimana diumumkan oleh beberapa menteri sesuai sidang kabinet, membesarkan hati. Tampak telah ada <i>sense of crisis</i> secara merata di antara semua anggota kabinet.	<b>Appeals to principle</b> Mudah-mudahan Neiss mempunyai pandangan yang sama dengan rakyat Indonesia. Dengan berakhirnya era pemerintahan Soeharto, hambatan utama langkah reformasi sudah berhasil disingkirkan. Sudah barang tentu sah buat Neiss untuk mencari tahu apa benar era pemerintahan Soeharto dan kepentingan keluarganya sudah benar-benar berakhir.
<b>Exemplaar</b> Permohonan yang diajukan oleh masyarakat bukan hanya bantuan modal dan rehabilitasi tempat usaha yang telah musnah terbakar, tetapi juga kelancaran pasokan barang dagangan dan stabilitas harganya, agar lebih memudahkan mereka melakukan kalkulasi harga bagi konsumennya.	<b>Consequences</b> Bukankah Soeharto sendiri sebelumnya pernah mengisyaratkan, setelah tidak menjadi presiden, ia ingin menjadi penasihat pada pemerintahan sesudahnya?

**“REFORMASI DIMULAI”**  
(Republika Sesudah Reformasi)

<b>Frame (Media Package)</b> pernyataan Presiden Soeharto yang mengisyaratkan dilegalkannya reformasi, menjadi hal yang sangat melegakan rakyat Indonesia	
<b>Framing Devices (Perangkat Framing)</b> reformasi sebagai aktivitas yang saat itu kurang populer, yang sengaja didekatkan dengan istilah pembaruan atau modernisasi. Dalam konsep pembaruan dan modernisasi itu, reformasi diidentikkan dengan penyelewengan kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.	<b>Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)</b>
<b>Methapor</b> -	<b>Roots</b> “... karena kebutuhan pokok sehari-hari yang melonjak. Kesiediaan dan usaha mereka untuk mengekang konsumsi masih sering harus dihadang oleh kelangkaan...”
<b>Catchphrases</b> Langkah-langkah darurat yang dijanjikan diambil pemerintah, sebagaimana diumumkan oleh beberapa menteri se usai sidang kabinet, membesarkan hati. Tampak telah ada <i>sense of crisis</i> secara merata di antara semua anggota kabinet.	<b>Appeals to principle</b> Mudah-mudahan Neiss mempunyai pandangan yang sama dengan rakyat Indonesia. Dengan berakhirnya era pemerintahan Soeharto, hambatan utama langkah reformasi sudah berhasil disingkirkan. Sudah barang tentu sah buat Neiss untuk mencari tahu apa benar era pemerintahan Soeharto dan kepentingan keluarganya sudah benar-benar berakhir.
<b>Exemplaar</b> Permohonan yang diajukan oleh masyarakat bukan hanya bantuan modal dan rehabilitasi tempat usaha yang telah musnah terbakar, tetapi juga kelancaran pasokan barang dagangan dan stabilitas harganya, agar lebih memudahkan mereka melakukan kalkulasi harga bagi konsumennya.	<b>Consequences</b> Bukankah Soeharto sendiri sebelumnya pernah mengisyaratkan, setelah tidak menjadi presiden, ia ingin menjadi penasihat pada pemerintahan sesudahnya?

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Kategori isu berita pada tajuk rencana surat kabar "Kompas" sebelum dan sesudah reformasi dapat dikategorikan dalam isu berikut: Politik dan Ekonomi, Hukum dan HAM, Kebebasan Pers, Reformasi dan Demokrasi serta Korupsi. Kategori isu berita pada tajuk rencana surat kabar "Republika" sebelum dan sesudah reformasi dapat dikategorikan dalam isu berikut: Nuansa Keagamaan, Politik dan Ekonomi, Hukum dan HAM, Kebebasan Pers, Reformasi dan Demokrasi serta Korupsi.
2. Kecenderungan isi berita tajuk rencana surat kabar "Kompas" dan "Republika" sebelum dan sesudah reformasi secara rinci adalah sebagai berikut :
  - a. Redaksi Kompas cukup hati-hati dalam menyajikan berita di tajuk rencananya mengingat resiko bisa dicabutnya SIUPP
  - b. Redaksi Kompas mempunyai ciri hati-hati, normatif, cenderung konservatif dan menghindari pendekatan kritik yang bersifat terbuka, pertimbangan aspek politis lebih dominan dibanding aspek sosiologis.
  - c. Republika sebagai harian berskala nasional terkemuka di Indonesia terlihat lebih terbuka dan lebih variatif mencari sumber berita serta nuansa keagamaan lebih kental.
  - d. Redaksi Republika lebih berani, atraktif dan progresif dan tidak canggung untuk memilih pendekatan kritik yang bersifat terbuka. Baik Kompas maupun Republika setelah reformasi mengalami kemajuan dalam isi tajuknya karena diangkatnya isu korupsi secara terbuka.

#### 5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian dengan analisis *framing* terhadap surat kabar lain di Indonesia.



### 5.3. Rekomendasi Hasil Penelitian

1. Judul Penelitian: Potret Pers Sebelum dan Sesudah Reformasi.  
(Analisis *Framing* pada Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas dan Republika)
2. Rekomendasi Pemanfaatan Hasil Penelitian untuk Pengayaan Bahan Ajar diberikan untuk:  
Mata Kuliah : Filsafat dan Etika Komunikasi  
Judul Modul : Jaminan Kebebasan Pers  
SKS : 3 sks  
Kode Modul : SKOM4439

**Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut.**

1. Terdapat perbedaan dalam cara penulisan tajuk rencana pada surat kabar "Kompas" dan "Republika" di masa sebelum reformasi (Reformasi 21 Mei 1998) dan sesudah reformasi, pada masa sebelum reformasi tulisan pada tajuk rencana bersifat sangat hati-hati, implisit. Sedangkan pada masa sesudah reformasi tulisan pada tajuk rencana bersifat lebih terbuka, eksplisit serta sumber berita lebih variatif bukan hanya kalangan elit pemerintahan saja..
2. Hasil analisis framing pada penulisan tajuk rencana surat kabar "Kompas dan Republika" di masa sebelum dan sesudah reformasi dapat ditambahkan pada topik tentang **Jaminan Kebebasan Pers**

### Daftar Pustaka

- Berger, Peter L. Pembentukan Realitas secara Sosial : Sintesa Strukturalisme dan Interaksionisme dalam Margaret M. Poloma.1979, Sosiologi Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. 1990, *The Social Construction of Reality* diterjemahkan oleh Hasan Basari, Tafsir Sosial atas kenyataan, LP3ES, Jakarta.
- De Fleur M. & E. Dennis. 1985, *Understanding Mass Communications*, Hongaton Company, Boston.
- DeFleur, Melvin L. De dan Rookeach, Sandra Ball. 1982 *Theories of Mass Communication*, New York.
- Denzin, Norman K and Linclon, Yvonna, Lincoln, S (ed), 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California. London. New Delhi, Sage Publication Inc.
- Devito, Joseph A. 2000, *Human Communication*, The Basic Course edition 8 th, Hunter College, Longman.
- Eriyanto. 2002, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, Lkis, Yogyakarta.
- Flournoy, Michael D. 1990. *Content Analysis of Indonesia Newspapers*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Littlejohn, Stephen W. 1996, *Theories of Human Communications*, edisi ke 5 Wadworth Publishing Company, Belmont.
- Mc Quail, Denis. 1989, *Mass Communication Theory*, edisi ke 2. Diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Teori Komunikasi Massa, Erlangga, Jakarta.
- Murani A, Kuhardjo, N 1999. Hukum dan Etika Komunikasi Massa, Jakarta: Penerbit: Karunika Universitas Terbuka
- Ngroho, Bimo, dkk. 1999, Politik Media Mengemas Berita, ISAI, Jakarta.
- Oetama, Jacob. 2001. *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam masyarakat Tidak Tulus*, Jakarta: Penerbit: Kompas
- Siebert. F, Peterson T, Schramm W, 1990. *Empat Teori Pers*, Jakarta, Penerbit: PT. Intermedia.
- Sobur, Alex, 1999. *Analisis Wacana*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sumadiria, Haris, 2004. Menulis Artikel dan Tajuk Rencana: Bandung, Penerbit: Simbiosis Rekataman Media.

Sendjaja, D.Sasa, dkk.1999, Teori Komunikasi, Universitas Terbuka, Jakarta

Shoemaker, Pamela J and Reese, Stephen D, 1999. *Mediating The Message : Theories of Influence on Mass Media Content*, USA, Longman Publisher.

Suparno, Paul Dr. 1997, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, Pustaka Filsafat, Kanisius, Jogjakarta.

Kumpulan Tulisan: *Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi: Perkembangan Permasalahan dan Perspektifnya*: 1990: Penerbit: Sinar Harapan.

**Lampiran:**

Contoh Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas dan Republika

Universitas Terbuka

# LAMPIRAN

Universitas Terbuka

User Swalayan 1		
1/3	101140	38341

P U S A T     I N F O R M A S I     K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743  
=====

KOMPAS Jumat, 24-04-1998. Halaman: 4

Tajuk Rencana  
KOMITMEN REFORMASI EKONOMI  
DILAKSANAKAN KONSISTEN DAN KONTEKSTUAL

KETIKA Kabinet Pembangunan VII dilantik pada tanggal 17 Maret '98, nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp 10.200 per satu dollar AS. Pada tanggal 22 April '98, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menguat menjadi Rp 7.750 per satu dollar.

Fakta itu oleh Menko Ekuin/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita diangkat sebagai indikator yang sangat bicara untuk menunjukkan: "berbagai upaya yang ditempuh untuk memulihkan kondisi perekonomian itu telah membuahkan hasil".

Pendapat itu dikemukakan oleh Menko Ekuin dalam jumpa pers yang diselenggarakan setelah sidang Dewan Pemantapan Ekonomi dan Keuangan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan itu.

Pada pertemuan pers itu, dijelaskan serangkaian langkah reformasi ekonomi yang merupakan kesepakatan terakhir dengan IMF serta yang telah dirinci menjadi program aksi yang konkret.

Program aksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal ialah reformasi di bidang moneter dan perbankan yang menyangkut di antaranya penyediaan modal minimum - Rp 250 milyar - bagi bank, laporan mingguan Bank Indonesia, penyiapan RUU Bank Sentral, usaha penertiban serta penyehatan bank-bank tanpa merugikan nasabah.

Dijelaskan pula oleh Menteri Keuangan dan menteri serta pejabat yang bersangkutan tentang realisasi upaya pemulihan ekonomi di bidang masing-masing, seperti perbankan, privatisasi BUMN, serta upaya penyelesaian utang swasta.

KITA ingin mengutip lebih lanjut, penegasan Menko Ekuin pada kesempatan itu: "Makin kuat komitmen dan konsistensi kita dalam menjalankan upaya-upaya penyehatan kembali perekonomian kita, meskipun harus dipikul dengan berat dan dirasakan sangat pahit konsekuensinya, makin cepat proses tersebut dapat berlangsung".

Kita berpendapat sama. Kunci keberhasilan mengatasi krisis ekonomi dan memulihkan ekonomi ialah komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi. Reformasi ekonomi itu telah dirumuskan menjadi kesepakatan antara pemerintah dan IMF serta untuk periode awal yang

menentukan, telah dijabarkan menjadi program aksi secara rinci dan konkret.

Memang berat dan pahit dan tetap makan waktu, tetapi itulah jalan yang telah menjadi kesepakatan dan keputusan setelah dikaji secara serius dan secara saksama. Jangan lagi ragu-ragu, kita agar melaksanakannya dengan konsisten, *metaphor*

Itulah syarat pokok, melaksanakan program reformasi ekonomi secara konsisten sesuai dengan kesepakatan dan komitmen. Memang permasalahan yang kita hadapi berat, bahkan juga rumit dan kompleks, karena bagaimanapun kita akan menempatkan diri serta membuat analisis yang berbeda-beda, menurut kenyataannya secara faktual, krisis serta persoalan ekonomi yang kita hadapi bertali-temali dengan persoalan-persoalan di luar ekonomi. *contohnya*

APAKAH implikasi dari kenyataan itu, yakni bertali-temalnya krisis dan persoalan ekonomi dengan bidang-bidang lain seperti sosial, budaya, hukum dan politik? Pertama, bahwa tali-temali itu justru menyebabkan semakin harusnya kita melaksanakan reformasi ekonomi secara konsisten.

Kedua, bahwa tali-temali itu membuat, mau tidak mau, kita harus melakukan reformasi ekonomi itu secara kontekstual atau pada konteks keseluruhan permasalahan yang kita hadapi. Kita akan mencoba merincinya lebih jelas, apa arti kontekstual atau pada konteks keseluruhan permasalahan itu!

Sangatlah kuat bahkan demanding, mendesak atau menuntut, konteks reformasi ekonomi itu dengan koreksi, perbaikan, transparansi, keadilan, dan rasa keadilan. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan, di masa lalu, bank yang terkena tindakan, cukup ditertibkan dengan menghentikan kegiatannya. Kini ada desakan agar yang menyalahgunakan sehingga bank itu bermasalah, harus diminta pertanggungjawaban secara hukum. *E*

Konsentrasi perhatian dan langkah tindakan memang pada upaya keluar dari krisis serta memulihkan sosok pembangunan ekonomi. Namun sekaligus dengan itu ada konteks yang mendesak agar dipermasalahkan sebab dan latar belakang yang melahirkan krisis moneter dan ekonomi. *A*

Sebab musabab serta latar belakang itu tidak terbatas hanya pada bidang moneter dan ekonomi, tetapi yang juga bertalian dengan efektivitasnya isyarat-isyarat dini, kontrol, koreksi, pertanggungjawaban.

Misalnya menjadi bahan refleksi serta penguatan diri bersama, mengapa kontrol dan koreksi tidak efektif. Mengapa isyarat dini, kontrol dan koreksi yang disuarakan lewat media massa, lembaga perwakilan, gerakan kemasyarakatan tidak terdengar, tidak didengar dan karena itu tidak mempunyai daya serta dampak kontrol dan koreksi yang efektif dan konstruktif?

Itulah sebabnya, mau tidak mau, secara obyektif dan secara logis, krisis dan permasalahan ekonomi, memperlakukan, mempertanyakan dan menggugat permasalahan-permasalahan di luar ekonomi, termasuk politik serta maraknya budaya feodal yang membelenggu daya kerakyatan dan memperkuat formalitas.

DALAM konteks itu, usaha dan langkah reformasi ekonomi, sekurang-kurangnya harus disertai orientasi dan semangat yang dipancarkan bahkan dikemukakan sebagai persyaratan keberhasilan reformasi itu.

Kita ingin mengulangi lagi, unsur-unsur orientasi dan semangat seperti yang kita saksikan tetapi terutama juga kita rasakan sendiri meliputi hal-hal seperti transparansi atau keterbukaan, keadilan dan rasa keadilan yang dirumuskan dalam pembagian proporsi pengorbanan serta pertanggungjawaban.

Konteks itu sangat melibatkan kehendak untuk mengakhiri atau membatasi pada ukuran kepatutan segala sesuatu yang terumus dalam formula kolusi, korupsi, nepotisme, monopoli.

Konteks itu juga bertalian dengan bagaimana menjadikan dari krisis ini tumbuh etos perikehidupan dan penyelenggaraan kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih sesuai dengan daya mampu serta tingkat hidup rakyat banyak.

Konteks itu menyangkut kenegarawanan kita bersama karena kita terutama pemerintah serta kepemimpinan dituntut agar tidak lagi memperlakukan pelaksanaan Demokrasi Pancasila lebih dari segi dan format sekadar basa-basi, sekadar memenuhi persyaratan peraturan dan hukum menurut aksaranya, bukan menurut substansi serta semangatnya.

KITA sambut positif, langkah-langkah reformasi ekonomi yang mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Agar hasil itu berlangsung terus serta meningkat tali-temalnya dengan hal-hal nonekonomi harus juga ditangkap serta dihayati oleh pemerintah, para menteri, semua jajarannya serta masyarakat bisnis.



P U S A T    I N F O R M A S I    K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743

=====

KOMPAS Senin, 04-05-1998. Halaman: 4

Tajuk Rencana  
 YANG HARUS KITA USAHAKAN ADALAH MENEMUKAN TITIK-TITIK TEMU

PELUANG untuk reformasi tetap terbuka. Begitulah yang kita simpulkan dari penjelasan Mendagri Hartono dan Menpen Alwi Dahlan, yakni penjelasan susulan untuk menerangkan lebih gamblang pendapat dan sikap Presiden Soeharto yang diutarakan dalam pertemuan silaturahmi dan konsultasi dengan pimpinan DPR, pimpinan Fraksi-fraksi dalam DPR serta pimpinan Orsospol.

Susulan penjelasan itu justru menekankan peluang untuk reformasi. Usaha reformasi tidak menunggu sampai tahun 2003. Upaya reformasi dimulai sejak sekarang, karena memerlukan persiapan seperti pemikiran, pengumpulan bahan serta pembicaraan bersama.

Misalnya, reformasi paket lima undang-undang politik, seperti undang-undang pemilihan umum. Persiapan dan pengumpulan bahan dan pendapat bisa dimulai dengan mempersoalkan isu-isu seperti akan tetap sistem proporsional atau sistem distrik. Perwakilan ABRI di lembaga legislatif, diangkat atau dipilih, sekiranya dipilih seperti apa mekanismenya.

Undang-undang pemilihan umum kita tangkap sebagai contoh. Artinya reformasi bisa juga menyangkut isi paket yang lain termasuk undang-undang Orsospol itu sendiri.

Kita tangkap pula pendapat Presiden, agar usaha-usaha reformasi itu dilakukan lewat prosedur konstitusional. Karena itu ditegaskan peranan DPR, bahkan sebagai contoh disebutkan peranannya untuk menggunakan hak inisiatif dan dengan sendirinya juga hak-hak lainnya seperti hak angket.

Apakah artinya lewat prosedur dan mekanisme konstitusional? Bahwa jika akan bermuara menjadi undang-undang yang mengikat, upaya reformasi haruslah lewat DPR. Hal itu tidak menutup kemungkinan-bahkan juga bukanlah inkonstitusional, jika pembicaraan dan pembahasannya, jika gagasannya, dilemparkan serta bertempat dari atau di luar DPR.

ASAL muasal gagasan, prakarsa serta pembicaraan reformasi bisa dari mana saja, seperti yang kini terjadi, dari kampus-kampus, dari universitas-universitas.

Di sinilah justru terdapat titik temu awal antara pendapat dan sikap pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Presiden dengan maraknya pemikiran, harapan bahwa tuntutan perihal reformasi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya yang disuarakan oleh para mahasiswa dengan disertai unjuk rasa di kampus-kampus.

Titik temu ini modal yang positif. Marilah kita coba kembangkan lebih jauh dengan pemikiran kritis konstruktif yang disertai sikap sejujur dan setulus mungkin. Karena itu kita akan menerima sebagai hal yang wajar, jika tidak semua pendapat kita ini bisa disepakati.

KEDENGARANNYA seperti suatu paradoks -pertentangan semu- jika kita segera mengemukakan, bahwa titik temu berikutnya justru bahwa ada perbedaan atau kemungkinan perbedaan antara pemerintah dan -sebut saja- mahasiswa tentang isi, makna, serta skala reformasi itu. Karena itu baiklah bisa disepakati dan diterima, bahwa mungkin saja memang ada perbedaan.

Kita mulai dengan peranan DPR. Kita sependapat bahkan tetap menunjang, agar usaha-usaha reformasi yang substansial akhirnya lewat mekanisme dan prosedur lembaga perwakilan. Itulah jalan yang kecuali mengurangi ongkos dan kerugian, sekaligus juga berbobot edukasi politik.

Tetapi agar DPR dapat menjalankan peranan tersebut, lembaga itu dan kita semua, termasuk pemerintah agar mau bersikap korektif: bahwa jika kini unjuk rasa dan desakan reformasi marak oleh para mahasiswa, hal itu disebabkan di antaranya karena DPR/MPR lebih bekerja menurut pola basa-basi serta formalitas formal tanpa disertai kejujuran yang optimal tentang substansi permasalahannya. Timbullah kesenjangan sosial politik seperti yang tampak dan terasa sekarang.

Dapatkah lembaga legislatif yang sama dapat menjadi forum reformasi seperti yang tersurat dan tersirat oleh gerakan reformasi mahasiswa? Kemungkinan itu ada, asalkan DPR, para anggotanya, fraksinya, pimpinannya, mau melakukan refleksi dan koreksi sikap serta orientasi, sehingga lebih berkorespondensi dengan apa yang hidup dalam masyarakat.

SEKALIPUN sama-sama menggunakan istilah reformasi, reformasi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, terasa ada perbedaan antara apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dengan apa yang dimaksudkan oleh para mahasiswa, yang menurut pengalaman sejarah kita sendiri, ada korespondensinya dengan rasa perasaan masyarakat luas. Bahkan untuk kita dan pemerintah kita, sulitlah secara psikologis-politis mengabaikan gerakan mahasiswa, karena Orde Baru lahir ikut dirintis dan digerakkan oleh mahasiswa.

Perlu dikaji secara kritis tetapi juga secara jujur dan tulus, di mana perbedaan itu ada. Misalnya dalam skala, dalam cakupan isi

User Swalayan 1		
3/3	101152	38341

reformasi, dalam kualitas reformasi, dalam semangat dan jiwa reformasi? Sebab jika perbedaan itu secara nyata dan kita tidak mengusahakan pendekatan, tidaklah akan berhasil secara memadai upaya membangun titik temu.

Terlepas dari isi, cakupan, kualitas, dan skala pemahaman tentang reformasi seperti yang dimaksudkan oleh mahasiswa dan yang dimaksudkan atau ditangkap oleh pemerintah, ada prinsip, semangat, suasana serta orientasi yang tampak jelas.

Yakni bahwa telanjur sempat muncul dan meluas hampir-hampir menjadi gejala dan yang kita maksudkan adalah gejala kurang percaya atau tidak percaya, gejala prasangka atau purbasangka. Ada gejala krisis kepercayaan dan karena itu juga krisis kepercayaan. R

SEKIRANYA pengamatan itu benar, maka itulah yang harus juga menyertai upaya pendekatan dan pencarian titik temu: mengembalikan kepercayaan, kewibawaan dan akhirnya juga kompetensi, sebab dalam segala urusan, lingkungan dan tingkatan persoalan hidup bersama, krisis kepercayaan dan krisis kewibawaan bermuara kepada krisis kompetensi. C

Persoalan yang kita hadapi rumit dan serius. Tidak ada pilihan lain bagi kita semua, terutama para pemimpin pemerintahan dan masyarakat untuk mengusahakan titik temu sebaik mungkin dengan pertimbangan utama, kepentingan dan keselamatan rakyat, bangsa, negara. A

P U S A T    I N F O R M A S I    K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743  
=====

KOMPAS Rabu, 20-05-1998. Halaman: 4

Tajuk Rencana  
PERNYATAAN PRESIDEN SOEHARTO PATUT  
DIPERTIMBANGKAN SUNGGUH-SUNGGUH

PERSOALAN yang menjadi isi pikiran dan kepedulian kalangan kaum reformis bukanlah mundurnya Presiden Soeharto semata, tetapi sekaligus juga what next? Setelah itu apa? Bagaimana bersama-sama mengusahakan dan menjamin bahwa setelah itu, menjadi lebih terjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih kukuh kebersamaan yang menopang persatuan dan kesatuan.

Dalam saran yang kemarin diumumkan sendiri oleh Presiden, what next itu sekaligus ditawarkan. Yakni dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru oleh MPR, hasil pemilihan umum baru. Secara resmi dan terbuka Presiden Soeharto menegaskan, ia tidak bersedia dicalonkan lagi.

Memang timbul masalah waktu, apalagi jika dikaitkan dengan tuntutan mundur sekarang juga seperti yang secara gamblang dikemukakan oleh Dr Nurcholish Madjid dalam pertemuan dengan Kepala Negara itu. Jika dikaitkan dengan tuntutan mundur sekarang juga, waktu bisa menjadi kendala.

Sebaliknya, kendala waktu ada kompensasinya. Kompensasi itu sangat substansial ditinjau dari tuntutan reformasi secara menyeluruh. Ialah bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan berdasarkan undang-undang pemilihan umum baru, berdasarkan undang-undang kepartaian baru, berdasarkan substansi reformasi politik yakni terjaminnya secara optimal Kedaulatan Rakyat.

Sedangkan kompensasi lainnya berupa terbukanya kesempatan untuk memilih secara bebas-bertanggung jawab tim pimpinan nasional baru, Presiden dan Wakil Presiden.

UNTUK mempercepat dan melancarkan proses, Presiden masih akan memimpin reformasi nasional itu. Untuk melaksanakan tugas itu, akan dibentuk Komite Reformasi yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, para pakar dari perguruan tinggi.

Komite Reformasi yang dipimpin Presiden akan secepatnya menyelesaikan Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Kepartaian,

Susunan MPR, DPR, DPRD, Undang-Undang Anti-Korupsi, Undang-Undang Anti-Monopoli dan lain-lain sesuai dengan keinginan masyarakat.

Catatan yang muncul: bagaimana menjamin otoritas dan kredibilitas reformasi yang dipimpin oleh Presiden yang justru menjadi sasaran gerakan reformasi.

Masuk akal, jika pemikiran dan kecemasan atau syakwasangka semacam itu timbul. Persoalan itu dapatkah kiranya dinetralisir oleh hal-hal berikut ini: Presiden tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh Komite Reformasi, yang para anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pakar. Kualitas dan integritas anggota Komite harus dipertimbangkan benar, karena mereka akan sangat menentukan wibawa dan kredibilitas langkah dan paket reformasi menyeluruh itu.

Ada faktor lain yang sebaiknya juga dipertimbangkan. Bahwa langkah Presiden merupakan responsnya yang positif tetapi terhormat terhadap tuntutan reformasi.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin lagi siapa pun dan pihak mana pun menjawab tuntutan reformasi serta krisis nasional ini hanya sekadar dengan perpolitikan, akal-akalan, dan taktik-taktik.

Keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga tuntutan reformasi serta krisis nasional ini hanya dapat diatasi oleh siapa pun dan pihak mana pun, jika ditanggapi serta diusahakan bersama dengan kejujuran, ketulusan, kenegarawanan yang mengajak dan mempersatukan, bukan yang memecah-belah atau memisah-misahkan.

Perubahan keadaan serta semangat baru yang dibawanya akan ikut menjadi penjaga bahwa segala sesuatu harus berjalan secara jujur dan tulus, benar-benar disertai oleh kearifan kenegarawanan.

REALITAS keadaan yang kita kemukakan di atas, barulah satu sisi. Sisi lain dari realitas itu adalah permasalahan sosial ekonomi yang kita hadapi. Kita bisa menganalisisnya sendiri. Kita masing-masing merasakannya. Kita sesungguhnya dipermalukan bersama.

Betapa pilu hati kita dan bukan menyalahkan orang lain, tetapi menggugat diri kita sendiri: kenapa kerusuhan dan perusakan itu timbul dan akhirnya seperti dipaparkan di depan mata dan hati kita secara mengesankan oleh mayat-mayat yang hangus terbakar itu, bolak-balik rakyat juga yang akhirnya menjadi korban.

Realitas kesulitan dan permasalahan sosial ekonomi ini tidak mungkin dibiarkan berlarut terlalu lama. Dilema besar kita hadapi. Untuk menangani permasalahan sosial ekonomi yang kini bertambah porak-poranda diperlukan kepemimpinan dan pemerintahan yang mampu, berkonsentrasi, berwibawa, dipercaya.

Pembaruan Kabinet memang diperlukan. Persoalannya ialah reshuffle yang seperti apakah kualitasnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara kredibel dapat berjalan.

User Swalayan 1		
3/3	101184	38341

KEMBALI, waktu menjadi persoalan mendesak. Sebab perubahan keadaan yang kita kemukakan serta kenyataan permasalahan sosial ekonomi juga menuntut penanganan yang tidak berlarut-larut. Kita dihadapkan dengan akumulasi beragam urgensi. Urgensi kepercayaan, urgensi reformasi, urgensi kondisi sosial ekonomi, urgensi waktu.

Termasuk jiwa dan semangat reformasi yang demokratis adalah kompromi. Itulah sebabnya, patut dan pada tempatnya saran kompromi Presiden itu dipertimbangkan secara serius dan konstruktif.

Universitas Terbuka







Wang Bunchi No. Rekening 700.120.02689.2012, Lippo Bara-Mampang No. Rekening 727.30.01158-0.  
Perwakilan PT Sumber Bangsa.  
Pusat: PT Adit Bangsa, Nomor SUKSES 283/SK/Menpan/SBPP/A/7/1992, Kabupaten Bekasi, Jl. Raya, Hanyoto, Durenkore, Setono P. Bontol, Hasan M. Soediono, Menteri Utama: Mar'ie Soeati, Menteri P. Satrio, Direktur Keunggulan Antar Bangsa, Pemuda Muhammadiyah, Hasan M. Soediono, Tariq Abang, Oridi P. Satrio, MS. Rala Satrio, Rudi Satrio, Zulkarnaini Hoz, Feni Hoz, Ade Husain, Corporate Secretary: Muhammad Rasyid, Sekretaris Pengawasan: Rasyid Adhikari.  
■ Semua surat yang dikirim ke Redaksi menjadi milik HJ Republics. Hanya surat yang disertai perangko balasan akan dikirim kembali jika tidak diminta.

### TAJUK

## Reformasi Dimulai

Pernyataan resmi Presiden Soeharto bahwa reformasi bisa saja dilakukan, dan bahkan sudah bisa dimulai sekarang, sangat melegakan. Pernyataan ini sekaligus telah menjawab berbagai tuntutan masyarakat dan mahasiswa yang akhir-akhir ini semakin ramai. Kita memang tidak pernah menyangsikan niat dan kehendak pemerintah untuk melakukan reformasi — apa pun bentuknya — sejauh itu bermaksud untuk mencari jalan menuju kehidupan yang lebih baik dalam berbangsa dan bernegara.

Tuntutan reformasi — atau apa pun namanya — sebenarnya juga adalah suatu program, bahkan bisa dikatakan sebagai jiwa, dari pemerintahan Orde Baru sejak awal kebangkitannya. Program yang telah disepakati bersama itu telah dipercayakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya untuk diimplementasikan oleh pemerintah dengan berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketika itu, kata "reformasi" memang tak populer digunakan. Istilah yang lebih banyak dipakai adalah "pembaruan" atau "modernisasi". Namun, jika kita perhatikan esensi di balik tuntutan "pembaruan" atau "modernisasi" itu, maknanya hampir sama dengan tuntutan reformasi yang ada sekarang ini. Inti reformasi yang dilakukan ketika itu adalah mengoreksi segala bentuk tatanan pemerintahan yang telah menyeleweng dari kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam bidang politik, misalnya, adalah menghilangkan paham Nasakom yang telah digunakan Bung Karno sebagai politik perimbangan kekuatan dalam pemerintahannya. Nasakom telah memberikan kesempatan tumbuh suburnya komunisme melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tidak senapas dengan jiwa bangsa Indonesia yang religius.

Struktur kepartaian yang memungkinkan banyaknya jumlah partai ketika itu, ternyata telah menciptakan pertarungan ideologis yang tidak sehat. Struktur itulah yang membuat timbulnya banyak friksi di antara golongan masyarakat serta jatuh-bangunnya kabinet sepanjang sejarah Kemerdekaan Indonesia. Kehidupan politik multipartai yang tiada batas tampaknya telah membuat bangsa Indonesia hidup dalam perseteruan golongan yang tak kunjung selesai. Hasil pembangunan yang diharapkan oleh rakyat setelah lama hidup melarat, tidak kunjung datang.

Ketika itulah Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto berinisiatif untuk merombak struktur politik, khususnya sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang berorientasi ideologis yang cenderung mengubah dasar negara Pancasila dengan diakuinya Marxisme kemudian diubah agar berorientasi program. Diadakanlah penyederhanaan partai dan diakui adanya wakil golongan-golongan yang kemudian melahirkan Golongan Karya.

Selain reformasi politik, budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti praktek-praktek irasional juga dikoreksi. Kata "irasional" yang kita kenal secara populer ketika itu adalah tumbuhnya praktek kultus individu kepada Bung Karno. Begitu pula praktek *vested interest* dalam kehidupan ekonomi yang menyebabkan kebrokekan fondasi ekonomi kita. "Rule of law harus ditegakkan" adalah jargon yang juga populer. Tujuannya untuk menghapuskan semua pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh pemerintahan Soekarno. Ketika itu, pelaksanaan hukum memang banyak diperkosa hanya dengan sebuah "surat wasiat" dari seorang penguasa.

Pembaruan dari modernisasi atau reformasi — jika kita meninjau istilah sekarang — telah berani kita lakukan tanpa melalui proses yang begitu lama. Hal ini terjadi, karena bangsa Indonesia telah menyadari terjadinya kesalahan dalam sejarah praktek kehidupan politik dan ekonomi yang selama itu kita lakukan.

Demikian pula hendaknya reformasi yang akan kita lakukan sekarang ini, kita nilai sebagai suatu kehehidak sejarah. Bukan hanya karena desakan satu atau dua kelompok masyarakat, melainkan reformasi yang kita kehendaki bersama. Kehendak dari semua golongan masyarakat, tak mengenal batasan rakyat atau pemerintah.

Reformasi yang hendak kita lakukan telah menjadi keharusan sejarah. Sangat naif bila untuk melaksanakan reformasi ini kita telah membuang banyak energi mempersoalkan terminologi. Reformasi bukan benda sakral dan tabu. Kita semua pernah melaksanakannya dengan selamat, sesuai hasrat dan keinginan kita bersama.

Kalau kita berani mengoreksi kesalahan kita di masa lalu, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Dalam konteks inilah, kita menyambut dengan lega pernyataan pemerintah yang disampaikan Presiden Soeharto bahwa reformasi bisa dilakukan. ■

...menerima dunia pendidikan itu sendiri. Namun, untuk itu tidaklah mudah, karena dunia pendidikan memiliki kompleksitas tersendiri. Ini karena dunia pendidikan tentu tidak semata pendidikan formal, tetapi juga nonformal — yang kedua-duanya sangat penting dalam *character building*. Begitu pula dunia pendidikan, tidak semata pendidikan tinggi, tetapi juga pendidikan dasar dan menengah, dengan berbagai bentuk variasinya. Tidaklah cukup untuk mengkaji seluruh kompleksitas pendidikan itu, sehingga gagasan reformasi pendidikan dalam tulisan ini hanya dibatasi pada pendidikan formal.

Dalam reformasi pendidikan formal, sentuhan reformasi tidak mungkin hanya pada pendidikan tinggi, tetapi juga pendidikan dasar dan menengah. Ini terjadi karena antarmengajar pendidikan formal tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Jelas, bahwa *output* pendidikan dasar merupakan *input* bagi pendidikan menengah. Juga selanjutnya, *output* pendidikan menengah merupakan *input* bagi pendidikan tinggi. Mengingat keterkaitan inilah kita sampai pada kesimpulan bah-

...penting dalam pengembangan dan aspek-aspek kemasyarakatan. Oleh karena itu, pola lama yang baga kuat tersebut harus "dibor" tikan dengan pola baru yang le. Artinya, otomoni berpikir peserta gai; dan potensinya digali, sehirkan berkembangnya kreativitas pengembangan potensi tersebut bangun sikap mandiri yang te tinggi nilai kooperatif. Sikap kr itu tetap harus dilandasi dengan b an dan kebiasaan yang konstrukt kahnya gemar membaca dan m asakannya peserta didik membe hadap hasil yang diperoleh orang tif dan jujur.

Sikap menghargai secara *fair* I kan etos yang harus dibangun sej lengkapi dengan kebiasaan berb cara wajar tanpa luapan emosi. Ha dalam kerangka reformasi pendid

## Entropi Politik d

T Rusdi Alyub

Dosen Institut Ilmu Pemerintahan

U njuk rasa mahasiswa yang digelar di beberapa perguruan tinggi Bandung (20 April 1998) menarik disimak karena substansi tuntutan mereka mengarah pada masalah kekuasaan. Mereka menuntut Mendikbud Wiranto Arismunandar meletakkan jabatannya sebagai pembantu presiden, karena telah mengeluarkan pernyataan bahwa mahasiswa tak dibenarkan berpolitik praktis. Tuntutan lainnya adalah agar badan legislatif difungsikan dengan baik, karena *performance* lembaga itu selama ini dirasakan kurang memuaskan.

Pernyataan Mendikbud walaupun bermuansa kebabakan, dalam arti untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri, namun menyangkut aspek yang lebih luas menyerempet hak-hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi. Pernyataan Wiranto menyangkut masalah demokrasi dalam praktik yang sedang berlangsung di Indonesia.

Bila cermat, fenomena di atas mengisik kesadaran kita untuk mempertanyakan kembali beberapa persoalan mendasar: Apa yang sesungguhnya terjadi dalam sistem politik di Indonesia? Apakah telah terjadi refungsionalisasi pada setiap lembaga tinggi negara? Bagaimana pula format hubungan baru antara lembaga tinggi negara di Indonesia? Tentu masih banyak pertanyaan lainnya. Suatu analisis tentang konsep demokrasi, hubungan antarlembaga, dan perlunya reformasi politik, karenanya diperlukan untuk menjawab permasalahan itu.

### Demokrasi sebagai konsep

Mengacu pada makna asalnya — *demos* dan *cratos* (Bahasa Yunani) — maka demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln mempopulerkan istilah ini sebagai pemerintahan dari-oleh-untuk rakyat. Tapi Gustaf (1993) menyatakan pemerintahan demokrasi adalah dari dan untuk rakyat. Jadi walaupun suatu pemerintahan dijalankan bukan oleh rakyat, kalau hasilnya untuk kepentingan rakyat, masih disebut pemerintahan demokrasi. Sebaliknya walaupun pemerintahan dijalankan oleh rakyat, kalau hasilnya bukan untuk rakyat, tak dapat disebut pemerintahan demokrasi.

Dengan kata lain, tujuan demokrasi adalah membuat mekanisme yang mampu mengekang penguasa mencapai kepentingan pribadi atau kelompoknya — dengan merugikan rakyat banyak. Arti penting demokrasi adalah adanya keinginan meletakkan penguasa dalam kontrol rakyat. Sehingga dalam sistem pemerintahan demokrasi, kedaulatan adalah menjadi kunci yang sangat penting; menghasilkan pemerintahan yang tunduk pada kehendak rakyat. Ini semua dicirikan oleh kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebas-

an berserikat, dan kebebasan per-

mengawasi kegiatan pemerintah. Hampir semua konstitusi di neg mokrasi menyatakan bahwa fun perwakilan rakyat (parlemen, DPR pembentuk undang-undang (legislatif) yogiannya pula rancangan undang- lahirlah dari lembaga ini, dan bukan n kewenangan pemerintah (eksekutif i tik demokrasi tradisional, legislatif i sentral. Asumsinya adalah hanya I mewakili rakyat dan berkompeten kan kehendak rakyat dalam bentuk dang, sementara eksekutif hanya n mengimplementasikan hukum dan f yang ditetapkan DPR (Ichlasul An

Supremasi parlemen membuat da 19 yang dikenal dengan abad parle Walter Bagehot pada paruh kedua a tunjuk bahwa parlemen menjalanl fungsi penting, antara lain, menon orang yang akan ditempatkan pada k kutif, menetapkan undang-undang, dan menetapkan anggaran, mengav menyampaikan keluhan masyarakat masyarakatkan isu yang dihadapi ne

Tapi di Indonesia, para pendiri neg telah memiliki suatu *image* bahwa pe lam praktik demokrasi modern aka (*the decline of legislature*). Lembaga rakyat ini lebih tepat dilihat sebagai memainkan peran legislatifnya bersi lembaga lain dalam tingkat yang berbe nya, tidak mengherankan jika DPR h pakan badan yang meratifikasi keputus an yang ditetapkan badan-badan lain d men.

Ini terbukti dari fakta bahwa selan Orde Baru, DPR RI tak pernah memba rancangan undang-undang berdasarkan atif. RUU usul inisiatif yang pernah i banyak 25 RUU dan disetujui menjai undang, hanya terjadi pada masa sist liberal pada kurun 1950-1959. Artinya, masa lalu lebih produktif dibandingk masa sekarang ini.

Demikian pula dalam menjalankan yang kedua, yaitu pengawasan terhad sanaan pemerintahan melalui sejumlah dimiliki DPR — hak bertanya, hak me pendapat, hak amandemen, hak menga nyelidikan, hak mengajukan usul, dan st yang terangkum dalam peraturan tata te. Sesuai dengan konstelasi politik pada sa semua hak itu lebih banyak digunakan I kurun 1950-1959. Penggunaan hak me yang menonjol pada masa DPR Orde Ba yang digunakan Ahmad Baramuli dal Eddy Tanzil menyangku bobolnya Ba ngan kerugian Rp 1,5 triliun.

Fungsi ketiga DPR adalah sebagai sara dikan politik (Binsar Saragih, 1988). Fur

HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE HOTLINE

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

Kapan Hasil Lomba Karya Tulis Dimunculkan

dan PVI Pusat kepada masyarakat haruslah tetap dinikmati

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

... adalah naskah yang dibuat oleh Redaksi majalah ini. Hal ini Republik. Hanya naskah yang disertai perangnya belasan akan diteliti kembali dan tidak akan...

**TAJUK**

# Naiknya Harga BBM dan Tarif Listrik

Tanpa banyak basa-basi, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik. Kenaikan harga BBM berlaku mulai hari ini, sedangkan kenaikan tarif listrik secara berturut-turut pada bulan Mei, Agustus, dan November 1998. Dengan keputusan pemerintah — yang semula diduga tidak akan dilakukan secepat ini — lengkap sudah belalai krisis yang membelit tubuh rakyat kebanyakan. Bila bagi pemerintah sendiri kenaikan ini merupakan dilema, apalagi bagi rakyat yang selama ini sudah demikian sesak dihipit segala macam beban hidup.

86/5/98

Kita tak mengingkari beratnya beban subsidi bagi pemerintah akibat merosotnya nilai rupiah dan naiknya biaya produksi, apabila BBM dan listrik tetap dipertahankan pada tingkat harga dan tarif sekarang. Menurut perhitungan Departemen Pertambangan dan Energi, beban subsidi itu bisa mencapai Rp 16 triliun untuk BBM dan Rp 11 triliun untuk listrik. Sementara itu, target laba bersih minyak (LBM) Pertamina untuk tahun anggaran 1997/98 yang diharapkan mencapai Rp 289 miliar ternyata meleset akibat perkembangan situasi yang tak mendukung. Dengan demikian, subsidi tak terelakkan. Subsidi di sini ialah jumlah biaya pokok BBM dikurangi hasil penjualan bersih BBM. Jika hasilnya plus berarti laba, sedangkan kalau minus berarti subsidi.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM ini juga merupakan salah satu realisasi hasil kesepakatan RI-IMF pada 8 April 1998. Dalam lampiran 3 Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, disebutkan pemerintah akan secara bertahap menaikkan harga BBM dalam negeri di tahun anggaran 1998/99.

Daftar harga baru BBM dan tarif listrik, seperti biasa, ditetapkan secara progresif. Kenaikan harga premium dari Rp 700 menjadi Rp 1.200 per liter disebut-sebut hanya akan menimpa kelas menengah ke atas. Kelas di bawahnya tak begitu terkena dampaknya. Prinsip serupa juga diterapkan untuk kenaikan tarif listrik. Namun, harga barang yang sudah lebih dulu naik bisa dipastikan akan naik lagi, akibat kenaikan tarif angkutan yang langsung pula diumumkan. Rakyat pun tetap tertindih paling bawah.

Kebijakan ini, bagaimanapun juga semakin mendorong perekonomian kita — yang telah mengalami krisis selama ini — ke dekat dasar jurang. Dampak krisis berupa membengkaknya angka pengangguran hingga 13 juta jiwa, terseratnya 50 persen rakyat ke garis kemiskinan, melonjaknya harga sembako yang tak kunjung turun sejak Idul Adha lalu, masih ditambah dengan kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Apa lagi yang tinggal? Pemerintah tentu tak mungkin menahan kenaikan tarif angkutan umum dengan seluruh dampak ikutannya.

Saat mengumumkan keputusan ini, Presiden melalui Mentamben Kuntoro Mangkusubroto mengharapkan pengertian masyarakat akan beratnya beban dan kesulitan yang dihadapi pemerintah sampai mengambil langkah dilematis demikian. Meski berat, rakyat rasanya sudah tak punya pilihan lain kecuali menerima kenaikan itu. Namun, ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan pemerintah agar rakyat tak sekadar menerima dengan terpaksa. Penjelasan yang serba transparan tentang ihwal di balik keharusan kenaikan ini sangatlah diperlukan.

Keharusan kenaikan inipun, seperti disarankan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, harus disertai pengumuman tentang efisiensi di bidang produksi BBM, angkutan minyak dari luar negeri, dan pemangkasan anggaran yang berasal dari luar sistem produksi minyak. Kesemuanya itu merupakan masalah mendasar penyebab tingginya biaya produksi minyak.

Sebuah keterusterangan tentu akan mengurangi kadar desas-desus yang sering mudah berkembang dan cepat diterima khalayak daripada penjelasan pemerintah. Di samping itu, pemerintah sendiri perlu membarengi kenaikan ini dengan langkah-langkah yang bisa menjadi katup pengaman di masyarakat. Jadi, masyarakat tidak dibiarkan menerima beban kenaikan harga BBM dan tarif listrik tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Tentunya tak seorang pun berharap kenaikan-kenaikan ini akan berdampak negatif terhadap stabilitas nasional. ■

kukan segera untuk mengetahui dengan baik dinamika politik dalam tahun terakhir. Dengan pemahaman itu, apa pun bentuk transformasi yang terjadi, transformasi demokratis tetap lebih terhormat bagi suatu bangsa yang berkepribadian.

**Problem legitimasi**  
Selama pemerintahan Orde Baru, proses pembangunan nasional disepakati bersama sebagai suatu usaha yang gradual dan inkremental. Dengan pendekatan

Mengedepannya problem legitimasi pembangunan tersebut, seringkali dikaitkan dengan masalah pemerataan, keadilan, dan profesionalisme elite. Dalam t hasa teoretis, masalah-masalah tersebut tercakup di dalam konsep krisis per bangunan politik. Sementara itu, krisis ekonomi yang terjadi saat ini lebih dilihat sebagai faktor peledak (*ignition facto*) mengedepannya problem legitimasi per bangunan. Oleh sebab itu, jika dilihat dari kont

# Mengungkap Penyiksaan T

**Abdul Mun'im Idries**

Dokter Forensik

**M**emang patut disesalkan bahwasanya dalam kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan penyiksaan para tahanan, sudah merupakan kejadian yang bersifat global. Baik di negara-negara yang sudah maju maupun di negara dunia ketiga, semuanya tidak terbebas dari keadaan yang menurunkan harkat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi tingkatnya di muka bumi ini.

Kenyataan tersebut menyebabkan buku-buku tentang kedokteran forensik, mau tidak mau menambah bab — yang secara khusus memuat referensi mengenai pola perlakuan pada korban-korban penyiksaan. Pencantuman bab yang hanya ada dalam buku-buku kedokteran forensik mutakhir, merupakan bukti kepedulian para ahli forensik yang mengacu pada pernyataan dari *Amnesty International* — yang mengemukakan fakta bahwa seperti dari negara-negara yang terhimpun dalam PBB ternyata masih mempraktikkan pelbagai bentuk penyiksaan terhadap para penghuni rumah tahanan. Penyiksaan tersebut selain menyebabkan para tahanan menjadi cacat, baik secara fisik maupun mental, bahkan juga sampai mengakibatkan kematian.

Dengan demikian, setiap ahli kedokteran forensik pada saat ini harus mampu memberikan keterangan ahli, apabila mereka diminta untuk melakukan pemeriksaan atas korban yang diduga telah mengalami penyiksaan sewaktu berada dalam tahanan. Keterangan ahli tersebut dapat dipakai untuk klarifikasi, agar kasusnya menjadi terang dan jelas; sehingga dapat memuaskan semua pihak, khususnya bagi korban atau keluarganya dan juga tentunya tidak merugikan buat pihak si penahan.

Oleh karena pada umumnya pemeriksaan forensik, baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan bedah mayat (*otopsi*), itu tidak ada bedanya dengan temuan yang didapat dalam kasus-kasus kriminal yang lain; maka konfirmasi bahwa pada tahanan tersebut telah mengalami penyiksaan, tergantung dari sirkumstansi dan adanya petunjuk atau bukti-bukti lain, yang dapat menunjang ke arah adanya penyiksaan. Petunjuk, bukti-bukti lain serta keadaan sirkumstansi tersebut, berada di luar ruang lingkup ilmu kedokteran forensik. Dengan demikian koordinasi serta kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait, merupakan faktor penting di dalam upaya pembuktian.

Tahanan yang tewas setelah tubuhnya babak belur disiksa atau terjadinya perdarahan intra-kranial akibat kepalanya dibenturkan ke dinding atau akibat pukulan atau tendangan yang bertubi-tubi, tidak berbeda dengan seorang korban yang tewas setelah mengalami kejadian yang sama, pada kasus kriminal. Meskipun demikian, pemeriksaan kedokteran forensik yang dilakukan secara baik, seringkali dapat memberi petunjuk bahwa pada korban yang diperiksa itu, merupakan korban penyiksaan.

Petunjuk tersebut di atas didasarkan pada temuan adanya kelainan (perlukaan), tertentu yang khas. Akan tetapi perlu diingat sekali lagi, bahwa untuk konfirmasi tetap dibutuhkan petunjuk, bukti-bukti lain serta keadaan lingkungan seperti telah diutarakan. Dokter forensik adalah saksi ahli, bukan saksi mata. Ia memberikan penilaian, pendapat, atau pengharapan, tentang suatu peristiwa (pidana) yang telah terjadi, dan bukan prosesnya.

Dengan demikian seorang dokter forensik yang

melakukan pemeriksaan, ditu da, hati-hati, cermat, dan teliti bahwa kesimpulan yang dibuat pemeriksaan, dapat membe besar dan serius, keimbang b kriminal biasa. Singkatnya di harus memberikan perhatian lebih khusus. Mungkin saja t terdapat di sekujur tubuh kor dak fatal, dan korban ternyata dengan sebutir peluru.

Untuk memperoleh hasil p timal, tidak jarang dokter ha melakukan koordinasi dengi lainnya. Jadi tidak berlebihan a hadapi kasus kematian seoran; dilakukan oleh satu tim, tidak t da seorang dokter saja; apalagi mempunyai keahlian dalam b.

Perlu disadari oleh mereka y bahwa di dalam upaya untuk kematian atau perlukaan pada s dala terpenting yang menentu (ada atau tidak), adalah sikap tic nunda-nunda saat pemeriksaan baru dilakukan setelah sekian dimakamkan; demikian pula pe ban penyiksaan non-fatal yang penundaan dapat menyebabkan l jadi misteri, yang dapat merugi

Tubuh korban akan hancur ak sukan, sehingga luka-lukanya ada) tidak terdeteksi; kecuali ap; alarui retak atau patah tulang. De; perlukaan pada tubuh korban (ap akan tidak dapat ditemukan oleh proses penyembuhan, kecuali k retak atau patah tulang, yang ba melalui pemeriksaan ronsen.

Istilah teknis seperti: *tran-line* dan adanya luka bakar (bekas), ak yang bermuatan listrik (*electric-n* beberapa kelainan yang dapat dite tahanan yang mengalami penyiks wanita, kelainan pada daerah ge bat berulang kali diperkosa, juga melalui pemeriksaan forensik ya

Oleh karena kelainan yang c sangat bervariasi dan menyerupai ; kelainan pada korban-korban itu; maka untuk mendapatkan hasil ya tor waktu atau saat pemeriksaan, bukti, teknik pemeriksaan serta fi harus tidak boleh dilupakan. Tanpa keempat faktor tersebut, apalagi n pemeriksaan tidak dapat membei timal; dan dapat menimbulkan ras curiga bagi semua pihak.

Secara umum, tahanan kepolisi pasyarakat bukanlah tempat te saan-penyiksaan yang berat; tentu ada kekecualian.

Ada tendensi bahwa angkatan l *ndestine*, dan kamp-kamp tahanan; pakan pihak yang sering melakukan penyiksaan terhadap para tahanan uraian singkat di atas jelas bahwa p rensik yang dilakukan oleh seorang forensik, sudah menjadi suatu kebu membuat terang dan jelas dalam k atau perlukaan setiap tahanan dal dengan masalah pelanggaran HAM



P U S A T    I N F O R M A S I    K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743

=====

KOMPAS Rabu, 03-06-1998. Halaman: 4

Tajuk Rencana  
MENYAMPUT SECARA KRITIS MARAKNYA  
HASRAT MENDIRIKAN PARTAI-PARTAI BARU

MUNCULNYA partai-partai baru merupakan salah satu buah reformasi. Sesuai dengan undang-undang kepartaian yang selama ini berlaku, organisasi sosial politik hanya Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Sejak dini, tampak hadirnya hasrat masyarakat untuk mendirikan partai baru. Hasrat itu lama terpendam dan tidak tersalurkan.

Hasrat yang lama terpendam itu kini memperoleh kesempatan. Reformasi memberikan tafsir otentik kepada Pasal 28 UUD 1945: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Tafsir reformasi terhadap Pasal 28 bahwa undang-undang yang menetapkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pikiran, berfungsi justru untuk menjamin kemerdekaan dan kebebasan itu!

SILAKAN mendirikan partai! Pada waktunya tentu saja, semua itu akan diatur dengan undang-undang kepartaian yang baru. Karena itu janganlah dialpakan pemikiran serta sumbangan pemikiran tentang bagaimanakah sebaiknya undang-undang kepartaian baru itu.

Mereka yang begitu mengagumkan semangat dan komitmennya, pagi-pagi sudah beramai-ramai mendirikan partai baru, agar sekaligus juga memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusunan undang-undang kepartaian serta berbagai kaitan dan perangkatnya.

Pertama, apakah keputusan mendirikan partai akan terealisasi, tergantung kepada undang-undang baru. Kedua, agar jika mendirikan partai sedikit banyak disertai kepentingan kelompok, pertimbangan itu sekaligus juga dikomitmenkan dengan kepentingan bersama.

Undang-undang kepartaian kecuali mempertimbangkan kepentingan kelompok, mau tidak mau, harus mempertimbangkan kepentingan bersama. Mau tidak mau akan kita refleksikan bersama, apa sesungguhnya pertimbangan dan tujuan mendirikan partai. Apa sesungguhnya fungsi partai sebagai wahana yang mengekspresikan hak demokrasi warga negara, sekaligus juga sebagai wahana yang membuat pemerintahan

terselenggara secara baik.

MEMPERTIMBANGKAN dan memikirkan eksistensi partai, mau tidak mau kita akan membuat perbandingan dan menarik pelajaran dari pengalaman negara lain dan pengalaman kita sendiri.

Perbandingan dan pengalaman negara lain bisa mempercepat proses penyusunan undang-undang. Perbandingan dan pengalaman itu juga memberi masukan perihal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem dan perundangan yang berlaku di negara-negara lain. Dengan sendirinya segala sesuatu dipertimbangkan secara selektif dan kritis, perbedaan-perbedaan antara sosok kita dengan sosok negara-negara lain itu.

Jika misalnya kita mengambil pengalaman dari periode kehidupan demokrasi di Indonesia dalam tahun lima puluhan, yang segera tampil adalah banyaknya jumlah partai, benar-benar sistem multipartai. Dalam pemilihan umum 1955, ikut serta 15 partai dan perorangan.

Jumlah partai yang banyak tidak menghasilkan mayoritas 50 persen lebih. Akibatnya pemerintahan - kabinet - disusun atas dasar koalisi partai-partai. Demokrasi berfungsi, tetapi tidak berfungsi secara lengkap. Karena tidak berhasil membentuk pemerintahan yang dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam persoalan lamanya kabinet. Silih berganti hampir setiap tahun. Padahal untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan diperlukan periode minimal.

Harus segera ditambahkan, tidak berhasilnya pemerintahan waktu itu bukan hanya karena sistem multipartai. Namun, faktor itu ikut merupakan faktor utama.

UNTUK meminjam ungkapan Dr Amien Rais: memang dalam tahun lima puluhan itu ibaratnya kita barulah lulusan SD dalam berdemokrasi. Kini kita sudah lulusan universitas! Ergo - karena itu - mestinya akan lebih mampu.

Jika tidak salah, yang terutama dipuji oleh tokoh demokrasi itu, ialah berlakunya pada masa itu apa yang kini diistilahkan sebagai masyarakat madani, civil society, masyarakat yang berbudaya demokrasi, di mana para pemimpin anggota dan pengikut partai-partai yang berbeda-beda bahkan berbenturan dalam arena politik, tetap bisa hidup dan bekerja sama secara bersahabat.

Kini semakin banyak kaum berpendidikan dan mengetahui paham demokrasi. Sementara itu adalah kenyataan juga, bahwa terlalu lama, sejak demokrasi terpimpin, kita tidak lagi terbiasa hidup dan berpolitik dalam suasana, semangat serta budaya demokrasi. Kita lebih terbiasa hidup dan dibesarkan dalam suasana rekayasa.

Dalam teori, barangkali kita lulusan universitas perihal demokrasi. Dalam praksis, kita masih harus belajar dan berlatih.

Jangan salah paham. Catatan itu tidak dimaksudkan untuk kita mundur atau gamang ragu-ragu dalam mewujudkan reformasi politik, yakni berlakunya paham, budaya dan sistem demokrasi konstitusional.

Catatan kita kemukakan, agar kita menyadari pekerjaan rumah yang harus kita laksanakan agar tujuan reformasi menyeluruh terlaksana. Tujuan reformasi menyeluruh itu dalam bidang politik adalah berlakunya demokrasi yang dapat menghasilkan pemerintahan yang dapat melaksanakan tugasnya.

KITA sambut dengan gegap-gempita antusiasme mendirikan partai-partai baru. Antusiasme itu agar juga disertai pemikiran, pertimbangan serta perhitungan yang sedalam-dalamnya tentang tujuan partai politik, latar belakang serta implikasi-implikasi yang menyertainya. Mendirikan partai akhirnya membuat komitmen untuk bekerja bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Diperlukan visi, komitmen, energi, dan barangkali juga biaya.

Universitas Terbuka

P U S A T     I N F O R M A S I     K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743

=====

KOMPAS Jumat, 05-06-1998. Halaman: 4

Tajuk Rencana  
JALAN REFORMASI ITU JALAN KEMANUSIAAN,  
KEADILAN, HUKUM, DAN KONSTITUSI

KITA tidak ingin reformasi berhenti di tengah jalan. Untuk itu perlulah dipelihara berlangsungnya momentum reformasi. Memelihara momentum reformasi tidak identik dengan membiarkan kekuatan, proses dan arah reformasi berjalan tanpa kendali.

Kendali itu sejak semula melekat pada pilihan jalan reformasi itu - bukan misalnya jalan revolusi - Kendali itu ialah ditegaskannya oleh gerakan reformasi bahwa jalan yang ditempuh oleh reformasi ialah jalan kemanusiaan, jalan keadilan, jalan hukum, dan jalan konstitusional.

Penegasan kembali alur-alur jalan itu penting, karena bagaimanapun juga reformasi ibarat melepaskan semua kekuatan sosial yang selama ini tertekan dan terbelenggu. Ibarat air bah, dapat mengalir ke mana-mana jika tidak disertai kesadaran tentang jalan yang disepakati untuk ditempuh.

SEGALA hal ihwal yang menyangkut misalnya KKN, Korupsi, Kolusi, Nepotisme harus dikikis dan di sana-sini, manakala perlu, diminta pertanggungjawabannya. Tetapi lagi-lagi jalan yang ditempuh adalah jalan kemanusiaan, keadilan, dan hukum.

Tidakkah jalur-jalur itu akan mengendurkan dan akhirnya meredakan momentum reformasi, sehingga jangan-jangan berhenti di tengah jalan atau pilih-pilih? Justru risiko surut atau berhenti di tengah jalan, kecil, karena jalur-jalur itu lebih menjamin hadirnya konsistensi serta saling kontrol dan koreksi yang terus-menerus.

Lagi pula reformasi tidak ingin sekadar menghancurkan, sekaligus membangun. Reformasi juga tidak akan terbatas pada pergantian pemeran dan peranan. Reformasi bertujuan membangun pemerintahan yang bersih dari KKN, sekaligus pemerintahan yang mampu menyelenggarakan perbaikan ekonomi.

Kita meletakkan kembali prinsip, proses, budaya dan aturan main. Semua itu bersendikan prinsip hukum yang menjamin keadilan, kepastian serta pengayoman. Kita menempuh jalan hukum dan jalan konstitusional yang tidak lagi sekadar bentuk dan prosedurnya, tetapi sekaligus

jiwa, semangat, prinsip serta substansinya.

MASUK akal, apabila berbagai kekuatan dan kecenderungan ekstrem dan radikal menyertai gerak reformasi. Sejarah Indonesia serta sosoknya yang besar, majemuk, berkedaerahan serta berkepulauan membawa serta dan menyimpan potensi-potensi ekstrem dan radikal.

Ketika potensi itu bertemu dalam arus perubahan besar, usaha-usaha menemukan ekuilibrium baru serta terutama dengan krisis ekonomi berkepanjangan yang semakin memberatkan kehidupan rakyat banyak, besarlah risiko bahwa potensi-potensi ekstrem dan radikal itu menjadi eksplosif. Itulah sebabnya, segera juga para pemimpin reformasi mengingatkan hadirnya bahaya bukan saja kekacauan, bahkan desintegrasi.

Bukan rahasia lagi, bahwa sisa-sisa potensi desintegrasi itu masih ada mengingat pertumbuhan bangsa dan negara kita di masa lampau serta dampak pemerintahan otoriter serta Jakarta-sentris bagi daerah-daerah periferi.

DALAM kaitan ini, kita tunjang dan kita hargai langkah-langkah Presiden BJ Habibie yang secara sadar mendekati semua spektrum masyarakat bangsa kita. Dengan demikian basis berpijaknya menjadi lebih luas. Visi, sikap dan orientasinya menjadi inklusif, terbuka, merangkul serta memberi tempat bagi seluruh bangsa.

Inilah warisan dan mandat yang dibawa oleh masyarakat bangsa dan negara Indonesia dan telah menjadi kesepakatan dan komitmen kita, bahwa kita mengelola dan membangun Indonesia Merdeka bersendikan dan berorientasikan kebersamaan.

Ketika mau tidak mau, reformasi membawa serta berbagai ikutannya yang berpotensi polarisasi dan desintegratif dan ketika kita bersama menghadapi permasalahan ekonomi yang sangat berkepanjangan, lagi-lagi sikap bersama itulah yang kita perlukan.

MASUK akal dan sah-sah saja, manakala justru dengan merebaknya keterbukaan dan demokrasi yang dibawa oleh reformasi, ikut tampil kesadaran, penajaman dan persaingan berbagai kepentingan.

Yang perlu kita sikapi, agar persaingan beragam kepentingan itu tidak mengalahkan kepentingan kita bersama. Agar perbedaan-perbedaan itu justru melatih dan memperkuat komitmen kita untuk tetap dapat bekerja sama serta tetap meletakkan loyalitas kita kepada kepentingan bersama itu di atas loyalitas kita kepada kepentingan masing-masing.

Inilah ujian yang dihadapi oleh gerakan reformasi, apakah reformasi menyeluruh secara kualitatif itu akan terwujud. Manakala komitmen dan kepentingan bersama dikalahkan oleh kepentingan masing-masing, sulitlah reformasi menyeluruh berhasil.

Inilah batu ujian yang kita hadapi yakni kemauan dan kemampuan



kita untuk membangun serta menanamkan akar-akar kuat, budaya kukuh serta infrastruktur yang memadai bagi hadirnya masyarakat demokratis, masyarakat madani.

Tanpa paham, budaya dan infrastruktur demokratis, tidaklah mungkin membangun institusi-institusi, proses, serta mekanisme yang secara substansial dan secara operasional, demokratis. Tujuan reformasi bukan sekadar pergantian pimpinan dan personalia elite pada pemerintahan maupun pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tujuan reformasi adalah membangun paham, budaya, serta infrastruktur demokrasi.

ADALAH adil dan mendidik, manakala kita minta pertanggungjawaban dari masa lalu. Namun juga pertanggungjawaban itu agar dilakukan lewat jalan kemanusiaan, keadilan, dan hukum. (\*)

Universitas Terbuka

P U S A T     I N F O R M A S I     K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743

=====

KOMPAS Jumat, 12-06-1998. Halaman: 4

Tajuk Rencana  
ALANGKAH BERJUBELNYA PEKERJAAN RUMAH  
YANG MENDESAK DISELESAIKAN

TERUS terang itulah reaksi kita, setiap kali menyaksikan dan merasakan desak-mendesaknya persoalan yang harus diselesaikan. Alangkah banyaknya, padahal satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Yang muncul kembali perihal kerusakan 13 dan 14 Mei yang lalu, khususnya di Jakarta dan di Solo. Bagaimana bisa dijelaskan, mengapa setelah hampir sebulan, sosok kerusakan itu muncul dan minta perhatian secara lebih tenang, tetapi juga secara lebih jujur dan menggugat.

Memang begitulah logika kejadian besar yang emosional, dramatis dan tragis. Apalagi jika peristiwa itu berlangsung di tengah-tengah gegap gempitanya kejadian-kejadian lain, yakni kejadian-kejadian sekitar gerakan reformasi.

Ketika keadaan lebih tenang dan jarak waktu dari kejadian pun memadai, muncullah kejadian sekitar kerusakan, kerusakan, pembakaran, penjarahan dan berbagai tindak kekerasan itu dalam sosok serta dimensi-dimensinya yang lebih lengkap dan menggugat.

PADA hari-hari kerusakan itu juga, segera terdengar dan tersebar kabar-kabur, bahwa sepertinya kerusakan itu tidaklah meledak secara spontan melainkan ada pemicunya.

Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia dalam pernyataan persnya tanggal 2 Juni '98, menyebut pemicu itu sebagai "kelompok terorganisir". Pihak lain, seperti tokoh reformasi Dr Amien Rais menggunakan ungkapan dalang. Kerusakan di Jakarta dan di Solo itu ada dalangnya.

Inilah pekerjaan rumah yang minta ditangani: mengungkap bagaimana duduk perkara meledak dan meluasnya kerusakan 13 dan 14 Mei itu dan seberapa jauh memang ada "kelompok terorganisir" atau dalang serta siapakah mereka atau pihak itu.

Kita sependapat dengan analisis Komnas HAM, yang menyatakan: kerusakan itu memang ada latar belakangnya. Latar belakang itu di antaranya, praktek pembangunan ekonomi yang karena pertimbangan

korupsi, kolusi, dan nepotisme, memberikan peluang, preferensi serta fasilitas lebih kepada orang-orang dan kelompok tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan serta menyuburkan kecemburuan sosial yang sensitif dan eksplosif.

Sekalipun latar belakang dan kondisi sensitif dan eksplosif itu ada, hal itu tidak dapat membenarkan hadirnya "kelompok terorganisir" atau dalang yang memicu kerusuhan. Pola dan anatomi kerusuhan seperti yang kita dengar dan kita baca memang memberikan kesan kuat perihal adanya pemicu yang terorganisir.

Agenda reformasi jelas, yang termasuk sentral dan strategis adalah memperbarui strategi, kebijakan dan terutama praksis pembangunan ekonomi, sehingga peluang, proses dan hasilnya merata, adil serta berpedoman kepada mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk melakukan reformasi pembangunan ekonomi, diperlukan pemerintahan bersih, berwibawa, adil dan efektif. Pemerintahan demikian lebih terjamin terselenggaranya jika berlaku sistem demokrasi yang membuat kontrol dan koreksi efektif.

Ke sanalah gerakan reformasi menuju. Ada agenda ekonomi, ada agenda politik, ada agenda sosial budaya, ada agenda hukum. Agenda hukum yang memberikan jaminan dan kepastian tentang rasa keadilan dan perlindungan warga negara amatlah prinsipil.

Itulah sebabnya, memang harus diselidiki secara cermat, obyektif dan benar, bagaimana duduk perkara kerusuhan 13 dan 14 Mei itu. Adakah pemicu, dalang atau bahkan "kelompok terorganisir" itu? Pengusutan dan tindakan hukum yang setimpal sangat diperlukan demi tegaknya keadilan, kepastian, serta perlindungan hukum.

Pengusutan, penjelasan serta tindakan hukum yang dapat dipercaya terhadap kasus itu, pengaruhnya jauh dan mencakup. Termasuk pengaruh untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang akan ikut memulihkan kepercayaan kepada pemerintah, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

PENGUSUTAN dan tindakan hukum yang kredibel juga berpengaruh positif terhadap reformasi politik yang sedang kita usahakan bersama. Adalah jelas, agenda reformasi politik itu termasuk menegakkan dan melaksanakan prinsip dan moralitas politik yang mengharamkan tujuan menghalalkan cara.

Prinsip dan moralitas politik itulah yang selama ini dipraktekkan, mula-mula dalam kadar, skala dan kualitas yang masih bisa ditenggang dan dianggap patut. Lambat laun dan akhirnya dalam skala, kadar serta kualitas yang sama sekali tanpa kendali dan kontrol rakyat.

Sebelum berlangsungnya gerakan reformasi oleh mahasiswa dan masyarakat kampus, di antara kita, sering saling bertanya:

kemajuan-kemajuan ekonomi yang berhasil dicapai oleh pemerintahan Orde Baru apakah setakar, apakah sepadan dengan ongkos sosial yang menyertainya dan harus kita bayar?

Ongkos sosial itu di antaranya, kesenjangan, tersebarnya benih desintegrasi, merosotnya moralitas pemerintahan, kehidupan politik dan bisnis serta rapuhnya keadilan dan kepastian hukum. Dalam pemerintahan yang sangat kuat dan sangat meluas dan mendalam semangat, suasana serta praktek KKN-nya, ekonomi pasar menjadi tidak adil dan kejam. Kini kita sedang tertimpa buahnya.

Universitas Terbuka

Warung Buncit No. Rekening 100.120.02669.2012, Lippo Bank-Mampang No. Rekening 727.30-01158-9  
Pencetakan: PT Sumber Bahari  
Penyunting: PT Andi Bangsa, Nomor SU/PP/ 283/98/Mampang/SU/PP/17/1992, Koordinator: Beddu Arang, Hayato  
Dharmadito, Setyanto P., Santoso, Husein M. Soedjono, Direktur: Usman Mar'is Sholah, Direktur Produksi: Fatri  
Syarif, Direktur Manajemen: Amir Fatah Adnan, Pembina Manajemen: Husein M. Soedjono, Tari Andri, Ordi P.  
Bumoro, MS Rake Syarif, Iwan Senebeter, Zainulihar Husein, Fatri Andri, Asa Nuzah.  
Corporate Secretary: Muhammad Rizki, Suban Pangasari Indri, Rusdi Adibury.  
■ Semua naskah yang dikirim ke Redaksi menjadi milik NU Republik. Hanya naskah yang disertai perangko besaran  
akan dikembalikan (jika tidak diminta).

## TAJUK

# Menuju Indonesia Baru

Dramatis dan tak terduga. Itulah suasana perkembangan politik yang terjadi kemarin. Melalui sebuah upacara yang sangat sederhana, Haji Muhammad Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Dan sesuai konstitusi, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dilantik sebagai penggantinya.

Semua itu terjadi begitu cepat. Bahkan sehari sebelum Pak Harto membacakan keputusannya, tanda-tanda suksesi belum terjadi. Krisis yang makin rumit dan berat, ketegangan politik yang makin pekat, dan kian kentalnya tuntutan agar Pak Harto turun tampaknya membuat keputusan penting itu harus diambil dengan cepat tanpa mengabaikan aspek ketatanegaraan.

Begitu cepatnya, sehingga rasanya sulit untuk percaya bahwa sejak detik keputusan berhenti itu dibacakan, kita telah meninggalkan era kepemimpinan Pak Harto. Sebuah era yang telah mewarnai Indonesia sejak lebih dari 30 tahun. Sebuah era Orde Baru, Orde Pembangunan, dengan segenap keberhasilannya. Sekaligus pula sebuah era dengan ketidaksempurnaannya yang kemudian meledak menjadi krisis dalam setahun terakhir.

Memang sayang, kepemimpinan Pak Harto harus berakhir di tengah krisis yang belum terselesaikan. Namun kesediaan beliau untuk berhenti pada saat yang tepat adalah keputusan seorang negarawan yang arif. Dan dengan segenap keberhasilan sekaligus ketidaksempurnaan pengabdianannya, bangsa Indonesia tak akan bisa melupakan jasa besar Pak Harto, sebagaimana kita tak bisa melupakan jasa Bung Karno sebagai proklamator dan presiden pertama RI.

Kini, kita telah memasuki era pasca-Soeharto, sebuah era Indonesia Baru. Sebuah era yang didorong oleh semangat perbaikan di segala bidang. Sebuah era reformasi yang dengan gencar diperjuangkan mahasiswa, cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat, dan segenap komponen bangsa yang sadar akan arti penting perubahan.

Bangsa Indonesia berhutang budi, bahkan nyawa, pada para pejuang reformasi tersebut. Namun buah tuntutan reformasi yang berhasil dipetik baru langkah awal. Di depan, telah menghadang perjuangan baru yang jauh lebih berat dan panjang. Belitan krisis yang begitu berat, bahkan telah mencapai tahapan krisis moral yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat, harus segera diurai dan diselesaikan.

Kondisi itulah yang kini harus dihadapi pemerintah baru. Maka, tanpa agenda reformasi yang tepat dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, kabinet di bawah Presiden BJ Habibie akan sulit melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, bila masyarakat tak mau memberi kepercayaan bahwa kabinet baru akan serius menjalankan reformasi, dan membantunya, presiden dan para menteri yang akan diangkatnya — bagaimana pun profesionalitasnya — tak akan bisa maksimal menjalankan tugas.

Presiden BJ Habibie telah menegaskan komitmennya dalam pidato di TV tadi malam untuk setia pada aspirasi rakyat dan mau menerima kritik. Komitmen inilah yang harus segera diwujudkan. Pada akhirnya, rakyat pula yang akan menilai, apakah tekad itu benar-benar terwujud atau tidak.

Lembar sejarah yang baru saja kita lewati telah memberi sebuah hikmah yang sangat penting: Betapa mahalnyanya harga yang harus ditanggung bila aspirasi rakyat terabaikan. Kita juga telah memperoleh pelajaran sangat berharga betapa pentingnya mendengar suara rakyat, bahkan yang pedas sekali pun. Karena itu, janganlah sekali-sekali kita mengulang kesalahan yang sama: *Vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Selamat bertugas Presiden Habibie. ■

ditempuh Presiden/Mandataris hasil Sidang Umum MPR ini mendapat pijakan kuat dalam wacana Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945?

## Tentang hukum tata negara dan konstitusi

Karena itu tulisan ini bermaksud mengkaji dari dimensi Hukum Tata Negara. Maka ada baiknya penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu istilah ini. Dalam khasanah teori hukum konstitusi, terdapat pandangan KC Wheare dalam *Modern Constitutions* (1975), yang membedakan istilah konstitusi dalam dua pengertian.

Yakni pertama, istilah konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh peraturan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Keseluruhan peraturan ini digolongkan atas peraturan yang legal dan yang nonlegal (ekstra-legal). Contoh yang paling dapat mewakili (mendekati) pengertian konstitusi yang pertama ini adalah *The British Constitution*. Jika kita menyebut *The British Constitution*, maka yang dimaksudkan adalah

... yang ber-  
baik yang ter-  
(UUD), unda  
perundang-ur  
atau konvens  
Kedua, ko  
sejarahnya, i  
kepada dokum  
nai susunan o  
organisasi itu  
Sedangkan  
istilah konstit  
tiga pengert  
luas, yang dal  
di Indonesia li  
kum Tata Neg  
sempit yang la  
sar (UUD)'. I  
gung dalam P  
1945, yaitu: "  
Jadi yang di  
nesia) dalam t

# Takut

## Adrianus Mefala

Kriminolog

Takut, dalam wacana eksistensi diperlihatkan melalui timbulnya keluhawatiran akan sesuatu yang dirasakan mengancam keberadaan atau keberlangsungan diri. Jadi, titik tolak terpenting dalam mengidentifikasi perasaan takut adalah pemahaman (*understanding*) akan sesuatu hal sebagai menakutkan.

Menurut ahli-ahli psikologi perkembangan, takut adalah perasaan yang lebih dari setengahnya terbentuk melalui proses pembelajaran. Pada kanak-kanak, rasa takut terungkap melalui berbagai perilaku refleks berkaitan dengan keterkejutan, keanehan dan kecanggungan yang dihadapinya saat mengeksplorasi lingkungan. Selanjutnya, proses belajar-sosial adalah cara paling dominan dilakukan kanak-kanak guna membentuk tentang profil tentang hal-hal yang menakutkannya. Referensi tentang ketakutan pun bertambah seiring perkembangan usia, seperti guru yang marah, pertengkaran orangtua, perkelahian pelajar, atau tulisan di dinding bertuliskan "milik pribumi".

Sebagai pemahaman, maka kondisi ketakutan itu universal. Artinya, di mana pun juga, dalam suatu kondisi takut selalu terdapat tiga hal: penyebab ketakutan, akibat yang di khawatirkan bakal muncul, serta perasaan takut itu sendiri, sekaligus terdapatnya kesejajaran antara ketiganya.

Berbeda halnya bila ketakutan telah berubah menjadi sekadar persepsi. Persepsi itu, sebagai gejala psikologis, tak banyak bedanya dengan posisi kita saat memandang suatu benda. Pemandangan tampak sampingnya akan berbeda dengan pandangan bila dilihat dari depan. Suatu hal yang umumnya dianggap sebagai pengelola semangat, kata-kannya teriakkan Asma Allah dalam suatu aksiunjuk rasa boleh jadi didengar sebagai menakutkan bagi para pemilik toko bermata sipit.

Maka benar bahwa antara bab dan akibat di seputar amat mungkin tidak prop lagi. Seseorang yang sudah dap trauma akan suatu hal ata mengembangkan prasangk (*udice*) serta sikap negatif (a umumnya akan lebih cepat takut bila hal-hal tadi (ental penggunaan indikator apa) persepsi sebagai ancaman. D pula bila individu tersebut de sensitifnya terhadap impuls diterimanya, sehingga impu netral sekalipun malah dim sebagai ancaman bagi diri, atau kekuasaannya.

Itu tadi gambaran tidak pro nalnya latar belakang dari suai kutan. Bagaimana dengan k an yang muncul akibat pera (atau imajinasi) bahwa akan suatu hal yang mengerikan? kira-kira perasaan banyak or hari-hari ini di Jabotabek. A setelah terjadi kerusuhan me Insiden Trisaksi terjadi inside.

Perasaan takut muncul bila ka memikirkan akibat yang t bila kerusuhan besar terjad Akan semakin banyak rumal musnah dalam sekejap. Den pula kendaraan, perkantora tokoan, dan sebagainya. Ber pernyataan dan janji-janji apar manan hanya sedikit kontribi dalam rangka meredakan situ kut tadi. Situasi yang kontra duktif tentu akan timbul bila saan takut menjadi berkepanja menahun, atau terakumulasi.

Sungguh amat disayangkan, paknya hal itu yang justru terjadi. Masyarakat yang terus nerus tercekam *culture of fear* jadinya menempatkan upaya-u penghindaran ketakutan tidak: gai sekadar variabel, tetapi sel "tujuan" itu sendiri.

Maka, menjadi cukup wajar lau memang tetap sulit diterima mereka lalu bertindak sesuai de pola pikir tadi. Mengganti kewi negaraan, bertempat tinggal d gara lain, menyimpan banyak nyak mata uang asing, serta sem merapatkan diri dengan sesam

## ABRI-RAKYAT Agar tetap Bersatu

Sejogyanya ada pihak pengagag/pemrakarsa untuk menyatakan "kekuatan pemikiran" mahasiswa dengan "kekuatan ketegaran" ABRI. Tidak mustahil akan melahir.

sakit, semua sakit hati, tidak ada yang patut dibangga-kan, bahkan boleh dikatakan "sangat mematukan".

Dalam doktrinnya, ABRI selalu mengabdikan kepada pemerintah yang (konsekuensi dan konsisten) berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Hal yang diharapkan oleh rakyat (sebagai "ibu ABRI") adalah penerapan...

lemah tersebut masih mempunyai Patut diingat bahwa orang yang apabila dianiaya/didholimi kemuc Allah SWT, maka tiada hisab/pengh bulkan". Nah dengan melihat



Perantara: PT Sumber Bahari  
 Penerbit: PT Abdi Bangsa, Nomor BHPK: 283/SK/Menpan/SUPP/A.7/1992. Komposisi: Bedu Amang, Heryono Dharwanto, Setyono P. Santoso, Hasan M. Soedjono, Direktur Utami: Mar'ia Sholeh, Direktur Produksi: Fery Singar, Direktur Keuangan: Anis Fariq Akbar, Pembantu Managemen: Hasan M. Soedjono, Tariq Abang, Orlis P. Sumarno, MS Ratu Singar, Rudi Senevler, Zulkarnaini Nizar, Fahmi Akas, Aziz Husah, Corporate Secretary: Muhammad Ronyk, Satuan Pengawasan Intern: Anusj Agilbani.

■ Semua masalah yang ditulis ke Sukidi menarik minat HU Rep. Kita. Hanya masalah yang disertai premis bisa akan diklat kembali jika tidak dimuat.

**TAJUK**

**Kita Perlu Persatuan**

Minggu lalu bangsa Indonesia memasuki suatu babakan sejarah baru. Presiden Soeharto meletakkan jabatan setelah 32 tahun berkuasa. B.J. Habibie sebagai Presiden baru telah dilantik, kemudian menyusun pembentukan Kabinet baru yang disebut Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada hari ini menurut rencana, sidang pertama kabinet akan digelar.

Memang kemudian masih berkembang berbagai pendapat dalam masyarakat yang memperdebatkan sah tidaknya penyerahan kekuasaan dari Presiden lama ke Presiden baru, baik dalam tata cara, maupun yang menyangkut permasalahan esensial hukum ketatanegaraan. Bahwa pelantikan yang dilakukan di Istana adalah inkonstitusional karena pelantikan seorang Presiden haruslah di depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di gedung DPR/MPR. Sebagai pembandingan terhadap pendapat ini, pakar hukum tanegara Yusrif Ihza Mahendra menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pelantikan tersebut tidak sah. Pakar Hukum Harun Alrasyid dari Universitas Indonesia juga berada dalam kubu pendapat ini. Harun Alrasyid berpendapat bahwa pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden sah berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Jika ada yang mengatakan bahwa Presiden harus mengembalikan mandat terlebih dahulu kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena Presiden adalah Mandataris MPR, justru pendapat tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, juga berkembang perdebatan bahwa pemerintahan yang ada sekarang ini adalah pemerintahan transisional atau sementara, karena itu pemerintah harus segera melaksanakan pemilihan umum. Pemerintahan yang dibentuk setelah pemilihan umum itu kelak, barulah dianggap sebagai pemerintahan yang absah karena telah mendapatkan legitimasi dari rakyat. Masalahnya, jika kita hendak melaksanakan reformasi yang tidak setengah-setengah, sebelum pemilu itu terlaksana, maka perlu dibuat sebuah undang-undang tentang pemilu dan undang-undang kepartaian yang baru.

Gagasan lain yang muncul, terutama di suarakan pada orasi kelompok masyarakat dan mahasiswa yang bertahan sampai hari terakhir di gedung DPR/MPR, adalah tuntutan agar segera diadakan Sidang Istimewa MPR, kemudian sidang itu akan memilih Presiden dan Wakil Presiden baru.

Tokoh-tokoh kritis seperti Gus Dur dan Amien Rais, cenderung ingin memberikan kesempatan kepada pemerintahan baru untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya mengatasi krisis. Tetapi jika kemudian dalam batas waktu yang tidak terlalu lama, usaha pemerintahan baru ini tidak menunjukkan hasil, maka ia bersama kekuatan rakyat lainnya akan mengambil sikap.

Apapun materi perdebatan yang muncul, dan tentu juga tidak terlepas dari ragam kepentingan kelompok yang mewamainya. Yang penting dan jangan dilupakan bahwa keinginan utama rakyat adalah bagaimana secepatnya mengatasi krisis ekonomi ini. Jangan kita terjebak dan menghabiskan banyak waktu, misalnya hanya mempertentangkan apa dan siapa. Karena gerakan mahasiswa, seperti yang di katakan oleh Ichaful Amal, Rektor Universitas Gajah Mada, tidaklah mempunyai kepentingan dengan person. Sebagai gerakan moral, yang diinginkan mahasiswa adalah bagaimana agar proses politik ini cepat berubah lebih demokratis. Tentang formatnya siapapun tidak masalah, selama bisa menjamin terbentuknya perubahan-perubahan menuju demokratisasi.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya pula adalah penggalan kerjasama dan saling mendukung antara aparat pemerintahan begitu pula ABRI sebagai dinamisor dan pilar yang menjaga stabilitas dan keamanan. Segala bentuk pertentangan primordial dan keraguan harus dihilangkan. Kini saatnya diperlukan kerjasama menciptakan sebuah ketentraman sebagai kondisi utama untuk bekerja dengan tenang mengatasi krisis ini. Kepercayaan rakyat dan kepercayaan internasional terhadap pemerintahan harus segera dipulihkan. Dan hal itu hanya bisa terwujud, jika kita semua masih mengutamakan semangat nasionalisme dan patriotisme mengatasi semangat dan kepentingan kelompok. Dalam suasana krisis dan ancaman keruntuhan sebagai sebuah bangsa seperti saat ini, kita mutlak memerlukan kembali adanya persatuan, sekali lagi persatuan. ■

Sidang Istimewa MPR.  
 Sekarang proses reformasi kembali menjadi setengah mentah. Sesudah BJ Habibie menjadi presiden, menurut Anda apa beda situasi dan anatomi keadaan nilai nasionalnya dibanding sebelum reformasi?

Peta gerakan mahasiswa dan massa di DPR pada 22 Mei 1998 menunjukkan perubahan peta: sebelum Soeharto *lengser* petanya adalah rakyat melawan penguasa, sesudah Soeharto *lengser* ada peta baru yang memedihkan: Polarisasi antara kekuatan non-Islam melawan Islam.

Terpikirkan oleh Anda: scandainya Pak Harto, sesudah lengsernya, sudah tidak memiliki wibawa dan pengaruh apa pun kepada ABRI — bisakah Anda bayangkan betapa dahsyatnya "perang massa" yang bisa terjadi pada 22 Mei itu? Anda pikir siapakah yang bisa menekan ABRI

4. Anda bersedia memahami bahwa masih tetap punya *power* dan kewil ma terhadap siskap (ABRI) dan kar memberlakukan *state of emergency* Darurat, kemudian membungkam kita semua dia — namun ia menakl dan mengikhlaskan diri untuk ma

Maka, Insya Allah keadaan tidak menuju ke 'mentah' an seperti sel yang dulu dihindarkan oleh Nurcdkk, ketika bertemu Soeharto: k hari itu juga, maka Habibie naik, d jadi beretele-tele kembali. Untung i an darah bisa dihindarkan — hal i tak bisa dijamin oleh siapa pun.

Anda menolak Komite Reform dak mewakili semua golongan — cholish Madjid dkk hanya berposis

**Bukan Sekadar Kr tapi Krisis Spi**

**Sukidi**

Mahasiswa IAIN Jakarta

Telaah mengenai masalah ahklak menjadi semakin perlu dilakukan di saat krisis yang dialami bangsa kita belum juga kunjung surut. Bertautan dengan hal itu, menarik sekali kolom *Resonansi* yang ditulis Soetjipto Wirosardjono perihal "Reformasi Ahklak" (*Republika*, 6 Mei 1998) dan artikel Profesor Simuh tentang "Moral Kekuasaan dalam Islam" (*Republika*, 02 Mei 1998). Menarik, karena Soetjipto Wirosardjono maupun Simuh mampu memberikan perspektif baru dalam membedah krisis nasional saat ini, yaitu perspektif yang lebih didasarkan pada *moral principles*.

Jelasnya, persoalan bangsa saat ini bukan lagi sebatas krisis moneter, ekonomi, politik, kepercayaan, maupun krisis wibawa yang diderita pemerintah. Tapi, "semua itu justru berpangkal dari (krisis) moral para pemegang kekuasaan," tegas profesor Simuh. Sehingga, sekadar agenda reformasi ekonomi, politik, maupun reformasi hukum, belumlah cukup. Bahkan, dalam pandangan Soetjipto Wirosardjono, agenda reformasi itu justru akan menjadi busuk dalam pelaksanaannya bila ahklak dan moral pelaksanaannya masih bejat dan munker. Maka ahklak dan moral penyelenggara negara mesti direformasi terlebih dahulu.

Dalam pandangan penulis, agenda itu penting sebagai jawaban atas menuunnya moral pejabat kita. Dan justru, akibat dekadensi moral inilah, kita tidak lekas keluar dari krisis. Riset Profesor MT Zen (1998:4) menunjukkan bahwa krisis moral ini seringkali memiliki beberapa watak. Antara lain: (1) menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, (2) ambisius terhadap kekuasaan, sehingga (3) kekuasaan terpusat pada pihak eksekutif *an sich*. "... yang ada hanya sekadar membantu presiden, sedangkan presiden sendiri... *can do no wrong*," kritik Profesor MT Zen. Maka, akhirnya (4) segala bentuk sistem, mekanisme, dan kontrol terhadap pihak eksekutif, menjadi tuli dan mati.

Pada titik inilah nilai-nilai kebaikan-keburukan, kebenaran-kesalahan, menjadi — dalam istilah KH Zainuddin MZ — remang-remang dan sulit dibedakan. Yang tampak hanyalah watak rakus berkuasa. Sebab, kendali dirinya bukan lagi akal dan agama sebagai ciri khas umat beragama, tapi nafsu serakahnya. Padahal, "nafsu (buruk) itu, dapat membawa manusia pada keserakahan," demikian peringatan Tuhan pada kita.

Tapi anehnya, manusia tak peduli, dan terus serakah. Itulah watak krisis moral manusia.

Dah perlu disadari semua pihak, terutara para pejabat kita, fakta sejarah menunjukkan bahwa betapa banyak peradaban-peradaban besar yang tumbang akibat runtuhnya Kiri, Indonesia pun pelan-pelan ikut tu karena krisis moral tadi. Dalam kondisi Profesor MT Zen menggugat: "... s akan kita tidak tahu lagi perbedaan *good* dan *evil*; karena sejak itu pula, dan pesan-pesan keagamaan sekadar dari ritual saja, lepas dari konteks ke sehari-hari."

Di sini terdapat dialektika krisis mc spiritual. Secara dialektis, maraknya moral terjadi ketika pesan keagamaan sekadar ritualitas formal. Belum men ke dalari — istilah filsafat perennial — diri" manusia. Atau belum artikulatif likatif dalam konteks kehidupan seha Maka, yang terjadi justru aneka parad hidupan manusia.

Paradoks pertama, yaitu meningkatn ka jamaah haji kita di satu sisi, tapi p lain, justru meledaknya angka kemi pengangguran, dan bencana kelaparan, meningkatnya kursi umat Islam di pei kuasaan di satu sisi, tapi pada sisi lain i tru menempati kursi 10 besar negari rup di dunia (sesuai riset lembaga *Transy International* di Jerman dan *Politi Economic Risk Consultancy* — P 1997). Dan ketiga, kian berbaran gereja, dan bangunan rumah ibadah i tapi pada saat itu pula aksi kebrutalar kian berbaran di mana-mana. Sete masih terjadi aneka paradoks kehidu nusia lainnya yang tak kalah kronis

Kronisnya lagi, watak ambiguitas ma-sama pertanda dua krisis: krisis m krisis spiritual. Sayangnya, telaah S Wirosardjono dan Simuh hanya berhe krisis moral. Padahal, krisis moral it berpangkal dari krisis spiritual (manus ka, bisa dirumuskan bahwa bukan k ksisis moneter, ekonomi, politik, huk percaya maupun krisis moral, tapi itu justru (sebagai) akibat dari krisis s

Gagasan itu, secara epistemologi sarkan pada dua argumen. *Pertama*, ni moral itu merupakan hakikat dan bi agama, seperti diakui Profesor Simuh Maka, secara logis, ketika muncul kri ral, berarti itu buah dari krisis spiritual, seperti dikemukakan seorang pakar e pembangunan dan environmentalis El macher, 1981, bahwa belakangan ini sadar adanya segala krisis — baik kri nomi, bahan bakar, makanan, lingi maupun krisis kesehatan — justru be dari krisis spiritual dan krisis pengem

25/6/98

## TAJUK

# Persoalan Rakyat Saat ini

Tatkala bola reformasi bergulir, wajar jika tiap kelompok masyarakat mengambil posisi sesuai dengan kepentingannya. Tetapi, sikap itu bisa menjadi tak wajar, kalau tindakan untuk mewujudkan posisi itu tidak mempedulikan kepentingan nyata bagian terbesar rakyat banyak.

Persoalan nyata itu adalah bahwa mereka yang sudah miskin menjadi tambah miskin, karena harga kebutuhan pokok sehari-hari yang melonjak. Ketersediaan dan usaha mereka untuk mengekang konsumsi masih sering harus dihadang oleh kelangkaan pasokan barang kebutuhan, seperti susu, minyak goreng, sayur-sayuran, telur, daging, dan buah-buahan. Keadaan ini sangat berkaitan dengan belum pulihnya roda perekonomian nasional akibat kerusuhan 14 Mei lalu dan peristiwa politik-ekonomi yang mengikutinya.

Karena itu, kita menyambut gembira bahwa pemerintah maupun bagian terbesar kalangan masyarakat yang gencar menuntut reformasi sama-sama berpendapat bahwa pada saat ini hendaknya prioritas utama tindakan darurat adalah memulihkan roda perekonomian rakyat kecil. Lebih utama lagi, yang berkaitan dengan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok sehari-hari rakyat dengan harga yang terjangkau.

Langkah-langkah darurat yang dijanjikan diambil pemerintah, sebagaimana diumumkan oleh beberapa menteri usai sidang kabinet, membesarkan hati. Tampak telah ada *sense of crisis* secara merata di antara semua anggota kabinet. Kunjungan Presiden BJ Habibie ke beberapa lokasi sisa-sisa bangunan korban kerusuhan, dan sedikit dialognya dengan anggota masyarakat di lokasi itu, telah menunjukkan pemerintah berusaha menanggapi semua aspek kerusakan akibat huru-hara itu.

Permohonan yang diajukan oleh masyarakat bukan hanya bantuan modal dan rehabilitasi tempat usaha yang telah musnah terbakar, tetapi juga kelancaran pasokan barang dagangan dan stabilitas harganya, agar lebih memudahkan mereka melakukan kalkulasi harga bagi konsumennya.

Hari-hari ini Hubert Neiss, direktur IMF berada di Indonesia untuk menyaksikan semua aspek perkembangan ekonomi dan politik terakhir, sebagai bahan pertimbangan yang akan ia sampaikan pada sidang dewan direktur IMF berkaitan jadwal pencairan bantuan — sedianya berlangsung 4 Juni 1998 — yang akan dibuka lagi dengan mengucurkan dana sebesar satu miliar dolar AS.

Mudah-mudahan Neiss mempunyai pandangan yang sama dengan rakyat Indonesia. Dengan berakhirnya era pemerintahan Soeharto, hambatan utama langkah reformasi sudah berhasil disingkirkan. Sudah barang tentu sah buat Neiss untuk mencari tahu apa benar era pemerintahan Soeharto dan kepentingan keuangannya sudah benar-benar berakhir. Bukankah Soeharto sendiri sebelumnya pernah mengisyaratkan, setelah tidak menjabat sebagai presiden, ia ingin menjadi penasihat pada pemerintahan sesudahnya?

Karena itu, untuk memulihkan roda ekonomi, di samping langkah-langkah tegas mengatasi hambatan produksi, distribusi, dan impor bahan baku, tidak kurang pentingnya pemerintah mengambil langkah politik guna memulihkan kepercayaan masyarakat, pasar, dan dunia internasional — khususnya badan donor seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Segala tindakan daruratnya harus transparan, untuk menyingkirkan macam-macam dugaan adanya sisa-sisa budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme — termasuk melindungi kepentingan anak-anak dan keluarga bekas presiden Soeharto.

Sebaliknya, dalam situasi perekonomian rakyat dan keuangan pemerintah yang demikian mencekam, sungguh sangat tak bermoral kalau masih ada pihak-pihak yang mengeksploitasi kegawatan keadaan untuk tujuan politik jangka pendek. Misalnya, dengan sengaja menggagalkan upaya pemerintah menanggulangi hambatan terhadap pengadaan, distribusi, dan pengendalian harga kebutuhan pokok rakyat. Bukankah rakyat tidak bakal bisa terus bicara politik, kalau perutnya lapar?

merupakan masalah yang sangat penting bagi penulisi. Barangkali, karena kepentingan bisnisnya begitu sangat besar di Indonesia, maka Liem tidak mengabaikan masalah politik yang sangat krusial di Indonesia: Politik Islam.

Tulisan tokoh yang memiliki nama Indonesia Sudono Salim itu sungguh sangat komprehensif, tak kalah dengan tulisan pakar politik pada umumnya. Artikel itu menggambarkan politik Islam Indonesia modern dilacak dari sudut historis hingga prospeknya di masa depan. Barangkali karena besarnya kepentingan bisnisnya di Indonesia, Liem kelihatan sangat serius memikirkan masalah itu. Meskipun tulisannya tak disertai referensi atau daftar pustaka satu pun seperti artikel ilmiah lainnya, bahasanya terkesan sangat otentik, runtut, gamblang, dan begitu jelas menggambarkan

kan, selalu konflik dengan Puncak konflik Soekarno di tahun 1965. Sedang konflik Islam santri ditandai dengan runtaknya Islam di Jawa Sumatera Selatan, Kalin Menghadapi protes itu, mematahkannya dengan Jenderal Soeharto, m tumbuh besar di bawah Soekarno dengan Islam kesempatan, Soeharto s dengan "tentara Islam" terbesar barangkali adalah wesi Selatan, tempat i ngan Prof BJ Habibie,

# Amien Rais, Muadzsin

Hajriyanto Y Thohari

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah

Ketika dalam Tanwir Muhammadiyah 1993 di Surabaya Amien Rais mulai menggulirkan isu "Suksesi Kepemimpinan Nasional" dalam kerangka konsep "high politics Muhammadiyah" yang provokatif itu, tanggapan elite Muhammadiyah sangat bervariasi. Lukman Harun menolak secara kategoris, KH A Azhar Basyir meminta agenda itu di-mauquf-kan atau paling kurang, ditunda karena terasa kurang etis. Dan Din Syamsuddin secara agak pejoratif tetapi elaboratif, menyebut gagasan menggulirkan isu tersebut sebagai tidak lebih dari seruan adzan, dan Amien Rais hanyalah tukang adzan alias muadzsin.

Menjadi muadzsin itu berarti: pertama, tidak akan menjadi imam (tak lazim, muadzsin menjadi imam); kedua, umat belum tentu datang meresponsinya. Tugas seorang muadzsin adalah — dan hanyaiah — menyeru dan berseru: "hayya 'ala demokrasi, hayya 'ala suksesi..." (mari menegakkan demokrasi, ayo memperjuangkan suksesi). Soal siapa yang menjadi operator suksesi, siapa yang kelak menikmati implikasi politiknya, dan siapa suksesornya, itu semua bukan "bisnis" Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah tidak akan pernah berpikir untuk mengambil keuntungan politik praktis, karena politik Muhammadiyah adalah politik etis, adiluhung, dan tinggi (high politics).

Kritikan Din Syamsuddin — yang konon (sekali lagi: konon) diramal oleh Prof Leonard Binder, guru keduanya di The University of Chicago dan The University of California Los Angeles, berpotensi saling bersaing di Muhammadiyah — itu benar, dan dibenarkan Amien Rais. "Saya memang tukang adzan," demikian pengakuan Amien Rais dalam *Membranik Politik Adiluhung* (1998:220). Menurut Din Syamsuddin — yang menjadi murid Binder atas rekomendasi Amien Rais itu — konsep high politics seperti yang dilakukan Amien itu terlalu romantis, bahkan mungkin utopis, karena kurang berpijak pada realitas politik yang ada. Kampanye suksesi yang dilakukan Amien dengan agresif itu tak lebih dan tak kurang dari "politik kerja baik" saja. Politik muadzsin!

## Bukan muadzsin konvensional

Tapi ketika pada Oktober 1997 Amien Rais menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden, lantas menjalin "aliansi" dengan berbagai kelompok kritis, "membiarkan" terbentuknya Solidaritas Indonesia untuk Amien dan Mega (Siaga), memelopori pembentukan Majelis Amanat Rakyat (MAR), dan kemudian tampil sebagai "Bapak Reformasi", pandangan Din Syamsuddin tidak lagi valid, malah jauh dari akurat.

Penulis justru melihat Amien Rais dan indikasi telah menggeser paradigma "aktivisme politik"-nya: dari high politics ke low politics

atau paling kurang — diakuinya sendiri — ai Singkatnya, kini ia bukan Dengan serangkaian m yang dilakukannya sejak salah — tidak lagi sedar melainkan malah highly p pepatah Arab "al-'imu b Jarati bi la tsamarin" (ilm pohon tanpa buah), demik terjadi dengan Amien F Menjadi political scientist; player yang oke punya". Dulu ia memang muac Syamsuddin, tetapi mu vensional: Cerdas dan car kurang lazim — juga bei (barisan) seperti layaknya i adzan-nya ternyata mendi gegap gempita dari anak-anak rakyat.

Bukan hanya itu, malah ketika menyatakan siap sudah mulai belajar men — meski baru bersifat ini ia akan lulus. Ia telah d "imam barisan kritis di ne kusi Aktualisasi Kepem di Masjid Al-Azhar pada cholish Madjid, tokoh in luar biasa berpengaruh il sudahlah, Amien Rais saj

## Imam politik?

Saksikan, namanya ten Amerika. Peranannya dala politik semakin menjulan paling penting — aksept meluas menembus bati agama, etnis, dan negara. I player sekaligus political manuvernya juga semaki ukur, dan mempesona. Li menggedor terus tanpa ta lelah untuk "menurunkan Soeharto.

Simak juga bagaimana kemudian mengelola (1) is reformasi politik dan ekon Busang, (4) taubat nasior nal, (6) kesiapannya men (6) koalisi bersih, (7) mer kelompok kritis dan opo; jemuk, (8) dukungan ber Presiden Soeharto-BJ Hat least (6) bagaimana ia mer katannya ke AS untuk "bei kan testimony di depan Ko kecerdikannya yang ter berhak mendapatkan nilai nya, sebagai imam tampil ia berhasil.

Meski bukan satu-satu kritis di negeri ini", Amie ling mengesankan dan me kuat. Sangat meyakinkan,